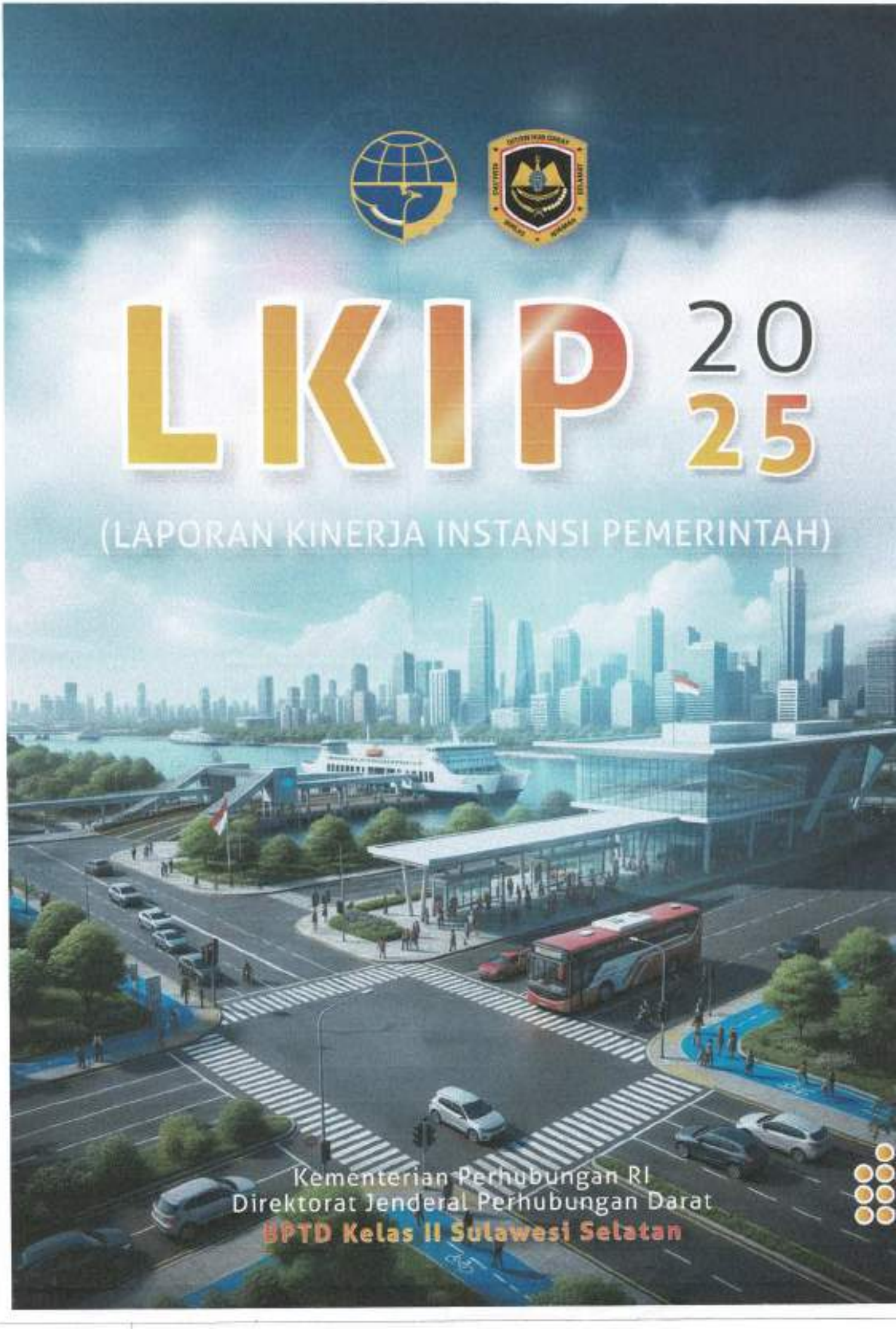


LKIP 2025

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Kementerian Perhubungan RI
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
BPTD Kelas II Sulawesi Selatan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	**Vijai Tri Handiko Silalahi, A.Md.T.**	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi	18/01/2026	
2.	Dikonsep	**Salsabilla Varadinta, S.Tr.Tra**	Pengawas Transportasi Darat	18/01/2026	
3.	Diperiksa	**Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.**	Kasubbag Tata Usaha	19/01 2026	
4.	Disetujui	**Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.**	Kasubbag Tata Usaha	19/01 2026	
5.	Disetujui	**Andy Sanjaya, S.SiT., M.M**	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	20/01 2026	
6.	Disetujui	**Thahir, S.Kom**	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	19/01 2026	
7.	Disetujui	**Ismawan Ahmad Prasetyo, S.SiT**	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	19/01 2026	

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Selatan Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Tranportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan yang di dalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

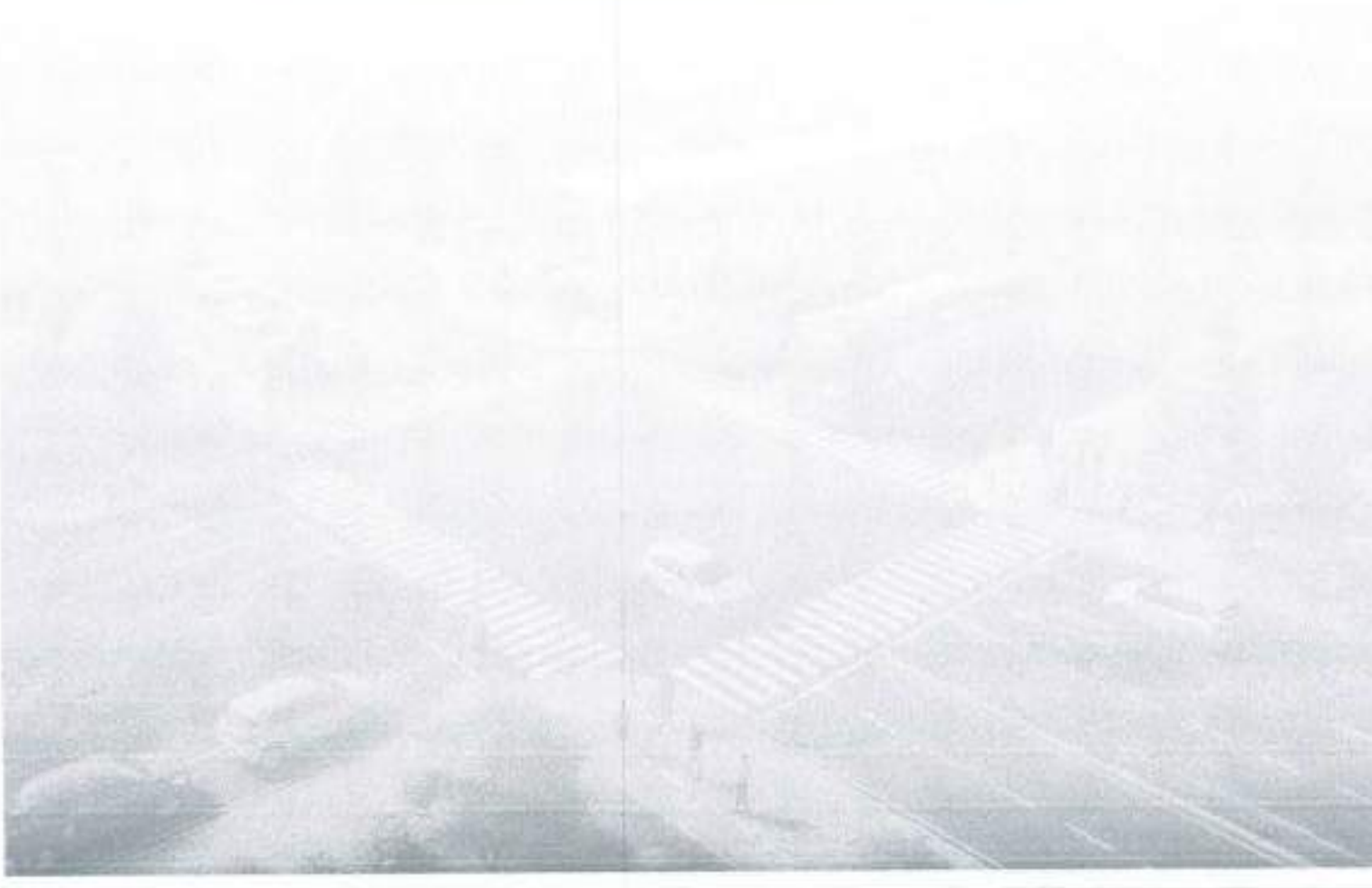
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A, Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP, Penerapan SMART Terminal Tipe A dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Makassar, 15 Januari 2025
Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 19711007 199803 1 008

RINGKASAN
EKSEKUTIF



RINGKARAN EKSEKUTIF

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025-2029 mengusung Visi **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 8 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfeksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan telah menetapkan visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu: **Transportasi Darat Maju, Menuju Indonesia Emas 2045** dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".** Renstra memuat 8 (delapan) Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, yakni:

1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi darat;
8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan (SK). Setiap Sasaran Kegiatan (SK) tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui

pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sudah baik. Dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Selatan Tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (SK≥100%) dan 1 (satu) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% (0%≤SK<100%). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 1268 Ritase (target 1316 Ritase) tercapai 96.35%;
2. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebesar 3980 Trip (target 4000 Trip) tercapai 99.50%;
3. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM terealisasi sebesar 3 Lokasi (target 3 Lokasi) tercapai 100%;
4. IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM terealisasi sebesar 8 Lokasi (target 8 Lokasi) tercapai tercapai 100%;
5. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terealisasi sebesar 4 Kegiatan (target 4 Kegiatan) tercapai 100%;
6. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM terealisasi sebesar 9 Lokasi (target 10 Lokasi) tercapai 90%;
7. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebesar 5 Lokasi (target 5 Lokasi) tercapai 100%;
8. IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan terealisasi sebesar 2 Lokasi (target 2 Lokasi) tercapai 100%;
9. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan) tercapai 100%;
10. IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan terealisasi sebesar 8 Lokasi (target 8 Lokasi) tercapai 100%;
11. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman terealisasi sebesar 12 Kegiatan (target 12 Kegiatan) tercapai 100%;
12. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah terealisasi sebesar 10 Kegiatan (target 10 Kegiatan) tercapai 100%;

13. IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle terealisasi sebesar 5 Kegiatan (target 5 Kegiatan) tercapai 100%;
14. 1KK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda terealisasi sebesar 51 Orang (target 50 Orang) tercapai 102,00%;
15. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan) tercapai 100%;
16. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 5 Dokumen (target 5 Dokumen) tercapai 100%;
17. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan) tercapai 100%;
18. IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebesar 1 Dokumen (target 1 Dokumen) tercapai 100%;
19. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen) tercapai 100%;
20. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip terealisasi sebesar 12 Kegiatan (target 12 Kegiatan) tercapai 100%;
21. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 5 Kegiatan (target 5 Kegiatan) tercapai 100%;
22. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebesar 14 Kegiatan (target 14 Kegiatan) tercapai 100%;
23. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan) tercapai 100%;

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem menajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem

Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktek terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

RINGKARAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xix

DAFTAR GAMBAR xxii

DAFTAR LAMPIRAN xxvii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Tugas Pokok Dan Fungsi 2

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi 3

I.3 Sumber Daya Manusia 7

I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan 8

I.4.1 Kewenangan 8

I.4.2 Sumber Daya Manusia 10

I.4.3 Anggaran 10

I.4.4 Isu Strategis 10

I.5 Sistematika Laporan 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 25

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis 25

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 28

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 31

II.3 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja 45

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja 45

III.2.1 SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK 51
1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan 51
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 51
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 51
a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 52
a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 55
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024..... 56
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 57
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 58
III.2.2 SK5 Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan 58
1. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP..... 58
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 58
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 59
a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 59
a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 62
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024..... 62
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 63
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 64
III.2.3 SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan..... 64
1. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM 64

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 64

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 65

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 66

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 72

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 73

SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi 73

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 74

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 74

2. IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM 75

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 75

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 76

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 76

a.4). Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 78

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020 84

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 86

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 87

III.2.4 SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP 87

1. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

.....87
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 87
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 88
a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan..... 88
a.4). Upaya untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang Akan Datang..... 95
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024..... 95
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 97
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 97
2. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM 97
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 97
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 98
a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 99
a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang 106
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024..... 106
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 108
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 108
3. IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan 108
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 108
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 109

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 110

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 113

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 113

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 114

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 115

III.2.5 SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan barang 115

1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata 115

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 115

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 116

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 116

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 119

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020 119

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 120

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 121

2. IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan 121

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 121

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 122

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 122

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 125

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 125

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 126

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 127

III.2.6 SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety 127

1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman 127

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 127

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 128

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 129

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 131

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. 132

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029. 133

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 134

2. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah 134

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 134

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 135

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 136

A 484

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 138

a.5). Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. 139

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 140

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 141

3. IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle 141

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 141

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 142

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 142

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 145

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024..... 145

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 146

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 147

III.2.7 SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan 147

1. IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda 147

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 147

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 148

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 149

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 151

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 151

SK12 Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan 152

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 153

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 153

III.2.8 SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perhubungan 154

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat 154

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 154

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 154

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 155

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 157

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 157

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 158

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 159

2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat 159

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 159

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 160

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 160

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 162

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 162

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 163

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 164

3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan 164

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 164

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 165

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 165

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 167

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 167

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 168

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 169

4. IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan 169

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 169

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 170

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 170

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu: 172

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 172

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 173

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 174

5. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat 174

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 174

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 175

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 175

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 177

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 178

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 179

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 180

6. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip 180

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 180

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 181

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 181

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 183

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 183

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 184

a.7). Benchmark Nasional/Internasional 185

7. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 185
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 185
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 186
a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 186
a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 188
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 188
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 189
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 190
8. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja 190
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 190
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 191
a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 191
a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 193
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 193
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 194
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 195
9. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI 195
a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan 195
a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 196

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 196
a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang 198
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 198
a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 199
a.7). Benchmark Nasional/Internasional 200
III.3 Realisasi Anggaran 200
III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025 200
1. Pagu Anggaran 200
2. Refocusing Anggaran Tahun 2025 205
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2025 210
III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 211
III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 216
BAB IV PENUTUP 218
IV.1 Penutup 218
IV.1.1 Ringkasan Capaian 218
IV.1.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, Unit Kerja Penanggung Jawab 221

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pegawai BPTD Kelas II Sulawesi Selatan 7
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 25
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 28
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025 32
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025 47
Tabel 3.2 Laporan Bulan September Pekerjaan Layanan Angkutan Perintis Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 54
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan 56
Tabel 3.4 Realisasi Trip kapal Hingga September Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP 61
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP 63
Tabel 3.6 Terminal Tipe A BPTD Kelas II Sulawesi Selatan 65
Tabel 3.7 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM 69
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM 73
Tabel 3.9 Jumlah Operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM 75
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok 85
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok 89
Tabel 3.12 Realisasi Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM 90
Tabel 3.13 Poin Penilaian Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM 92
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM 96
Tabel 3.15 Pelabuhan Sungai dan Danau yang terdapat pada DIPA BPTD Kelas II Sulawesi

Selatan 99
Tabel 3.16 Realisasi Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM 101
Tabel 3.17 Poin Penilaian Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM .. 101
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM 107
Tabel 3.19 Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP 112
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan 113
Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata 118
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata 119
Tabel 3.23 Realisasi indikator kinerja jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan 124
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Untuk Mendukung Keselamatan 126
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman 132
Tabel 3.26 Realisasi Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah 137
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah 139
Tabel 3. 28 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle 144
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle 146
Tabel 3.30 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda 150
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda 152
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat 157

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat 163
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan 168
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan 173
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat 178
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip .. 184
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 189
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja 193
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI 198
Tabel 3.41 Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025 200
Tabel 3.42 Rincian Per Sumber Dana Revisi ke-22 Pagu Anggaran Tahun 2025 200
Tabel 3.43 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025 201
Tabel 3.44 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Anggaran Revisi 22 Tahun 2025 201
Tabel 3.45 Rincian Revisi Per Sumber Dana TA 2025 205
Tabel 3.46 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025 206
Tabel 3.47 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025 208
Tabel 3.48 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 209
Tabel 3. 49 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 211
Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025 212
Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 212
Tabel 3.52 Analisis Data Yang Tidak terserap Oleh Unit Kerja 214
Tabel 3.53 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 214
Tabel 3.54 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2025 214
Tabel 3.55 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM 216
Tabel 3.56 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab 221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Sulawesi Selatan 3
Gambar 3. 1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan 52
Gambar 3.2 Grafik IKK 2.1 Target, Realisasi, Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 57
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Jalan Penyeberangan Layanan Subsidi Transportasi Jalan tahun 2025 yang Beroperasi Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola 58
Gambar 3.4 Grafik Capaian IKK Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP 59
Gambar 3.5 Grafik IIK 6 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025..... 63
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 64
Gambar 3.7 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM.... 66
Gambar 3.8 IKK 7.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 74
Gambar 3.9 Perbandingan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 74
Gambar 3.10 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM..... 76
Gambar 3.11 Grafik IKK 7.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025..... 80
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 81
Gambar 3.13 Grafik Capaian IKK Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok..... 82
Gambar 3.14 Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok 86
Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024. 87
Gambar 3.16 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM..... 88
Gambar 3.17 Grafik IKK 8.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM..... 96
Gambar 3.18 Perbandingan Realisasi Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 97
Gambar 3.19 Grafik Capaian IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM 98
Gambar 3.20 Grafik IKK 8.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 2025 IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM 107
Gambar 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 108
Gambar 3.22 Grafik Capaian IKK Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan 110
Gambar 3.23 Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan..... 114
Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 115
Gambar 3.25 Grafik Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata 116
Gambar 3.26 Grafik IKK 9.1 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025..... 120
Gambar 3.27 Perbandingan Realisasi Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. 121
Gambar 3.28 Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan

dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan 122
Gambar 3.29 Grafik IKK 9.3 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025..... 126
Gambar 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 127
Gambar 3.31 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman 129
Gambar 3.32 Grafik IKK 10.1 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 133
Gambar 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 134
Gambar 3.34 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah 136
Gambar 3.35 Grafik IKK 10.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 140
Gambar 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 141
Gambar 3.37 Grafik Capaian IKK Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle 142
Gambar 3.38 Grafik IKK 10.4 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 146
Gambar 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 147
Gambar 3.40 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda..... 148
Gambar 3.41 Grafik IKK 12.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 152

Gambar 3.59 Grafik IKK 4.8 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 184
Gambar 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 185
Gambar 3.61 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 186
Gambar 3.62 Grafik IKK 4.9 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 189
Gambar 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 190
Gambar 3.64 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja 191
Gambar 3.65 Grafik IKK 10.4 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 194
Gambar 3.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 195
Gambar 3.67 Grafik Capaian IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI..... 196
Gambar 3.68 Grafik IKK 4.11 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 199
Gambar 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 200
Gambar 3.70 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi 2020-2025..... 210
Gambar 3.71 Grafik Realisasi Anggaran Per Triwulan IV Tahun 2025..... 214

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Rencana Aksi Tahun 2025
5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dituntut untuk menyelenggaraan sistem pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip **Good Governance** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Salah satu azas penyelenggaraan **Good Governance** yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun angggaran dalam rangka memenuhi capaian target kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan setiap Tahunnya, yang terbagi dalam tiap triwulan dan pada akhir Tahun.

I.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KSOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) terdiri atas:

a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Kelas II Sulawesi Selatan terdiri atas:

a. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
d. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
e. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Bagan Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam PM 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Sulawesi Selatan

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Adapun tugas kepala Subbag Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam PM 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

   a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan laporan evaluasi kinerja;
   b. Pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
   c. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi,
   d. Urusan Sumber Daya Manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan;
   e. Pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga;
   f. Evaluasi dan pelaporan;

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Adapun tugas kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam PM 06 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa;
b. Pengoperasian Terminal Tipe A;
c. Pengoperasian Terminal Barang untuk umum;
d. Pengoperasian UPPKB;
e. Pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
f. Bantuan teknis pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Adapun tugas kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam PM 06 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala;
b. Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor;
c. Pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
d. Analisis trayek angkutan jalan AKAP;
e. Analisis trayek angkutan jalan perintis (Subsidi);
f. Penetapan jadwal operasi;
g. Pemberian subsidi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
h. Bantuan teknis penyedia sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan.

Adapun tugas Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan, dan Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam PM 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional;
b. Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan perlengkapan jalan;

c. Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan rambu sungai, danau dan SBNP;
d. Melaksanakan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan;
e. Melaksanakan pengerukan dan reklamasi kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau;
f. Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol;
g. Pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai, danau;
h. Pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan;
i. Pengamatan dan pemantauan kegiatan karoseri;
j. Pengamatan dan pemantauan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
k. Pengamatan dan pemantauan pelabuhan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersial;
l. Pengamatan dan pemantauan operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan;
m. Pengamatan dan pemantauan kendaraan bermotor di jalan;
n. Pengamatan dan pemantauan tarif angkutan jalan, SDP;
o. Pemberian subsidi angkutan jalan;
p. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
q. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan jalan;
r. Pelaksanaan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas;
s. Pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan;
t. Pemenuhan kelaiklautan kapal SDP, ketepatan waktu pelayanan;
u. Pemenuhan pemberian subsidi angkutan SDP;
v. Pemenuhan SBNP, rambu dan alur sungai dan danau;
w. Pemanfaatan bantuan teknis;
x. Pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pelabuhan SDP;
y. Penegakan hukum peraturan perundangan bidang LLAJSDP;
z. Patroli dan pengamanan pelayaran SDP.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pelayanan yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan antara lain :

a. Satuan Pelayanan UPPKB Maccopa;
b. Satuan pelayanan UUPKB Larompong;
c. Satuan pelayanan UPPKB Datae;
d. Satuan pelayanan UPPKB Sajoanging;
e. Satuan pelayanan UPPKB Tanah Batue;
f. Satuan pelayanan UPPKB Pallangga;
g. Satuan pelayanan UPPKB Somba Opu;
h. Satuan pelayanan UPPKB Walenrang;
i. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Lumpue Pare-Pare;
j. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Watampone;
k. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae;
l. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bajoe;
m. Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa);
n. Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong);
o. Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Rammang-Rammang);
p. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bira;
q. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata);
r. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang);
s. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilambena);
t. Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu);
u. Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takabonerate);
v. Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimasunggu);
w. Pelabuhan Danau Sorowako;
x. Pelabuhan Danau Wilker Sorowako (PD Nuha);
y. Pelabuhan Danau Timampu; dan
z. Pelabuhan Danau Wilker Timampu (PD Tokalimbo).

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan menaungi sebanyak 399 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- SDM PNS sebanyak 210 orang
- SDM PPPK sebanyak 175 orang
- SDM PPNPN sebanyak 29 orang
- SDM Outsourching sebanyak 8 orang

Tabel 1.1 Jumlah pegawai BPTD Kelas II Sulawesi Selatan

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI				KETERANGAN
		PNS	PPPK	PPNPN	OS	
1.	Kantor Induk	68	19	7	7	Beroperasi
2.	Satuan Pelayanan UPPKB Maccopa	16	22	3	-	Beroperasi
3.	Satuan Pelayanan UPPKB Larompong	11	6	-	-	Beroperasi
4.	Satuan Pelayanan UPPKB Datae	14	12	-	-	Beroperasi
5.	Satuan Pelayanan UPPKB Sajoanging	9	13	-	-	Beroperasi
6.	Satuan Pelayanan UPPKB Tanabatue	11	16	1	-	Beroperasi
7.	Satuan Pelayanan UPPKB Palangga	14	16	4	-	Beroperasi
8.	Satuan Pelayanan UPPKB Somba Opu	8	15	3	-	Beroperasi
9.	Satuan Pelayanan UPPKB Walenrang	6	10	1	-	Beroperasi
10.	Satuan PelayananTerminal Tipe A Induk Lumpue Parepare	17	11	1	1	Beroperasi
11.	Satuan PelayananTerminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae	7	6	2	-	Beroperasi
12.	Satuan PelayananTerminal Tipe A Watampone	3	13	-	-	Beroperasi
13.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	9	7	-	-	Beroperasi
14.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)	3	1	1	-	Beroperasi
15.	Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Rammang-Rammang)	-	-	-	-	Beroperasi
16.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bira	5	-	2	-	Beroperasi
17.	Satuan Pelayanan Pelabuhan	1	-	1	-	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI				KETERANGAN
		PNS	PPPK	PPNPN	OS	
	Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)					Beroperasi
18.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang)	1	2	-	-	Beroperasi
19.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilambena)	-	-	-	-	Belum beroperasi
20.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu)	1	2	1	-	Beroperasi
21.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takabonerate)	1	2	1	-	Beroperasi
22.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimasunggu)	-	-	-	-	Belum beroperasi
23.	Pelabuhan Danau Sorowako dan Pelabuhan Danau Wilker Sorowako (PD Nuha)	3	2	-	-	Beroperasi
24.	Pelabuhan Danau Timampu dan Pelabuhan Danau Wilker Timampu (PD Tokalimbo)	2	-	1	-	Beroperasi
Total		210	175	29	8	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha (2025)

I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

I.4.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;

2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);

3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di Tahun-Tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah

Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);

2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2) Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
3) Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.4.2 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan berpedoman kepada pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

I.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan:

1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
2) Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3) Pengoperasian Terminal Penumpang;
4) Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5) Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6) Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7) ODOL (Over Dimensi Over Loading);
8) Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9) Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
I.3. Sumber Daya Manusia
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
II.2.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
II.2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
II.3. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja
III.2.1. SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK
1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.2. SK5 Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

1. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.3. SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

1. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 7.4 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

II.2.4 SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

1. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

II.2.5 SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan barang

1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

II.2.6 SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety

1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan

Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

II.2.7 SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

1. IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

II.2.8 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan

Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

4. IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

5. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

6. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

7. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

8. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

9. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III. 3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran
    a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
    b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
    c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
    a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
    b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
    c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
    d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2025

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV. 1. Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV. 2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
4. Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan bidang perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Trasnportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai PengelolaTrasnportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025. Tabel sasaran dan indikator kinerja program Balai Pengelol Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025-2029
1.	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316
2.	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025-2029
3.	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	8
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
4.	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
			IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2
5.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan	Lokasi	8

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025-2029
			untuk mendukung Keselamatan		
6.	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12
		IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10
		IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5
7.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak. Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50
8.	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK 4.5	Tindak Lanjut	Dokumen	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025-2029
			Rekomendasi Audit/Pemeriksaan		
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
2.	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000
3.	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasii Jalan	IKK7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	8
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
4.	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
			IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2
5.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8
6.	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5
7.	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak. Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50
8.	SK 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja BPTD Kela II Sulawesi Selatan mengalami 2 (dua) kali revisi sebagai berikut :

Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat di BPTD Kelas II Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK AWAL
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316
2.	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000
3.	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	8
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
4.	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
			IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK AWAL
5.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8
6.	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5
7.	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak. Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50
8.	SK 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5
			IKK 4.3	Kegiatan terkait	Kegiatan	2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK AWAL
			Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan		
		IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 118.767.867.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 2.300.000.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 56.154.970.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6.275.570.000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 534.000.000,-
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 27.489.802.000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 35.435.330.000,-

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

II.3 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan dengan total anggaran Rp.173,546,289,000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1.	SK2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	Ritase	1694,5	SAJSDP
2.	SK5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3904	SAJSDP
3.	SK7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	PJSDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
		IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Unit	8	PJSDP
		IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	TU
4.	SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	10	PJSDP
		IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	PJSDP
		IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyebrangan	Unit	2	LLJSDP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
5.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, Pariwisata	Kegiatan	2	LLAJSDPP
			IKK 9.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang di Bangun dan Dioperasikan Untuk Mendukung Keselamatan	Lokasi	8	LLAJSDPP
			IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5	LLAJSDPP
6.	SK10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	SAJSDP
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	SAJSDP
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang	Kegiatan	5	SAJDSP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
				menerapkan blue full cycle			
7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendaping Sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda	Orang	50	TU
8.	SK4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	TU
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	TU
			IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	TU
			IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit /Pemeriksaan	Dokumen	1	TU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	TU
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	TU
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	TU
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	TU
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	TU

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 54,093,997,000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 2,300,000,000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 53,934,957,000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5,425,570,000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 534,000,000,-
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 26,816,241,000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan	Rp. 30,441,524,000,-

	Umum Transportasi Darat	

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

2. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Perubahan Pejabat Pimpinan di Lingkungan Balai BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, yaitu dari Kepala Balai kepada Plt. Kepala Balai.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan dengan total anggaran Rp.179,471,797,000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1 Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1.	SK2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	Ritase	1694,5	SAJSDP
2.	SK5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyebrangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3904	SAJSDP
3.	SK7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	PJSDP
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Unit	8	PJSDP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	TU
4.	SK8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyebrangan Sesuai SPM	Unit	10	PJSDP
			IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	PJSDP
			IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyebrangan	Unit	2	LLJSDPP
5.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, Pariwisata	Kegiatan	2	LLAJSDPP
			IKK 9.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang di Bangun dan Dioperasikan Untuk Mendukung Keselamatan	Lokasi	8	LLAJSDPP
			IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel	Kegiatan	5	LLAJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
				Karoseri			
6.	SK10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	SAJSDP
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	SAJSDP
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5	SAJDSP
7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendaping Sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda	Orang	50	TU
8.	SK4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	TU
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan	Dokumen	5	TU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
			Darat			
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	TU
		IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit /Pemeriksaan	Dokumen	1	TU
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	TU
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	TU
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	TU
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	TU
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	TU

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

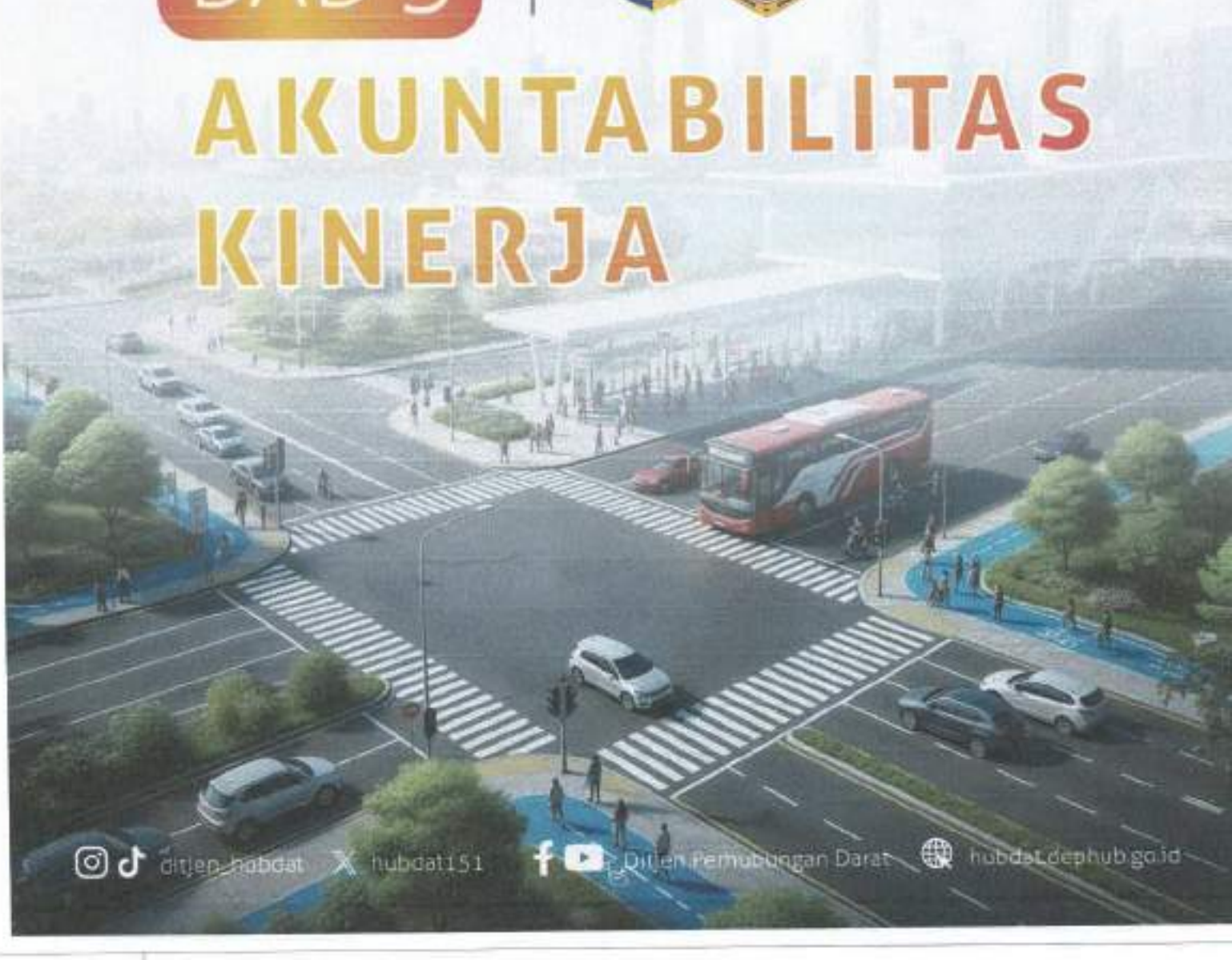
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 52,626,950,000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 2.300.000.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 54,554,307,.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6,275,570,000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 534,000,000,-

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 26,816,241,000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 36,426,168,000,-

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updatang dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat https://www.eperformance.dephub.go.id dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportas Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

3. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Monitoring Capaian Kinerja, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan, bermuara pada terwujudnya 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q4 Target	Q4 Realisasi	Capaian
SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK					96,35
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316	1316	1.268	96,35
SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan					99,50

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q4		Capaian
				Target	Realisasi	
IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000	4000	3.980	99,50
SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					100,00
IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3	3	3	100,00
IKK 7.4	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Lokasi	8	8	8	100,00
IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	4	4	100,00
SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP					96.66
IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10	10	9	90,00
IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	5	5	100,00
IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2	2	2	100,00
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					100,00

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q4		
				Target	Realisasi	Capaian
IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	2	2	100,00
IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8	8	8	100,00
SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety					100,00
IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	12	12	100,00
IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	10	10	100,00
IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5	5	5	100,00
SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan					102,00
IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak. Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	50	51	102,00
SK 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan					100,00
IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100,00

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q4		
				Target	Realisasi	Capaian
IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	5	5	100,00
IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	1	2	100,00
IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100,00
IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	2	2	100,00
IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12	12	12	100,00
IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	5	5	100,00
IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14	14	14	100,00
IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	1	100,00
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						99,31%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						99,47%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≤100%)						20
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						3

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025).

III.2.1 SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK

1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan biaya (subsidi) kepada penyelenggara atau operator angkutan jalan agar tarif yang dibayar masyarakat tetap terjangkau, terutama bagi wilayah atau kelompok masyarakat yang secara ekonomi dan geografis sulit dijangkau oleh layanan transportasi komersial biasa.

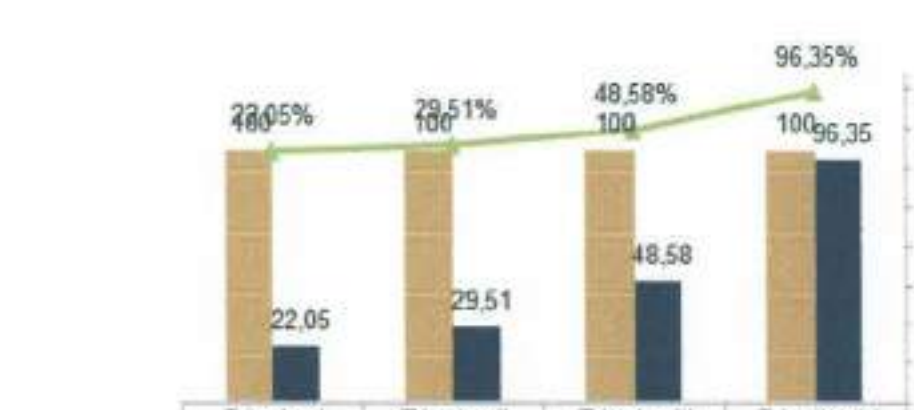
Capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung indikator Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Realisasi untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 1.268 Ritase jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 adalah sebesar 1316 Ritase maka capaian kinerja mencapai 96,35%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	100	100	100	100
Realisasi	22,05	29,51	48,58	96,35
Capaian	22,05%	29,51%	48,58%	96,35%

Gambar 3. 1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025, sebanyak 6 (enam) trayek ditetapkan untuk melayani Angkutan Jalan Perintis di Wilayah Sulawesi Selatan antara lain:

  1. Terminal Daya - Tondong (via Malino Sinjai);
  2. Masamba – Rongkong;
  3. Terminal Bungoro - Pelabuhan Maccini-Stasiun Mangilu;
  4. Ujung Lero Pinrang - Terminal Lumpue-Pelabuhan Garongkong - Stasiun Kereta Api Pekkae;
  5. Terminal Sinjai - Pelabuhan Bira;
  6. Terminal Benteng - Pelabuhan Pattumbukang.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terhadap konektivitas transportasi memiliki target 1316 Ritase yang diperoleh dari capaian terhadap

Perjanjian Kinerja (PK) di tahun sebelumnya dengan berdasarkan kepada arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:

1. Dukungan kebijakan nasional untuk meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DPTK;
2. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya atas dukungan anggaran sehingga Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dalam terlaksana;
3. Monitoring rutin melalui sistem pelaporan digital yang meningkatkan akurasi data operasional.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor Kegagalan tercapainya indikator Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:

1. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
2. Koordinasi yang baik dengan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan Layanan angkutan jalan perintis.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebesar 96,35%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Laporan Bulan September Pekerjaan Layanan Angkutan Perintis Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	Lintasan	Target Ritase Kontrak	Target Ritase Adendum 5	Realisasi Ritase	Sisa Ritase Efisiensi	% Capaian Ritase
1.	Terminal Daya-Tondong (Via Malino Sinjai)	290,5	123	121	2	98
2.	Masamba-Rongkong	295	23	23	0	100
3.	Terminal Bungoro-Pelabuhan Maccini-stasiun Mangilu	257	456	449	7	98
4.	Ujung Lero Pinrang-Terminal Lumpue-Pelabuhan Garongkong-Stasiun Kereta Api Pekkae	295	258	243	15	94
5.	Terminal Sinjai-Pelabuhan Bira	127,5	156	136	20	87
6.	Terminal Benteng-Pelabuhan Pattumbukang	295	300	300	0	100
Total		1560	1316	1268	44	96,35

Sumber: Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan (2025).

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapaianya target perjalanan pulang pergi (Ritase) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi

Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{96{,}35\%}{100\%} \text{ x } 100\% = 96{,}35\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp1.695.982.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp1.515.493.478 atau mencapai 96,35%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute/trayek angkutan perintis di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
3. Komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
4. Dapat terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
5. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
6. Dapat terus mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;

7. Selalu menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Persentase Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Jalan Tahun 2025 sebesar 96% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 100%, maka capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 96% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Jalan sebesar 101,6% dengan target 90% maka capaian kinerja mencapai 103%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

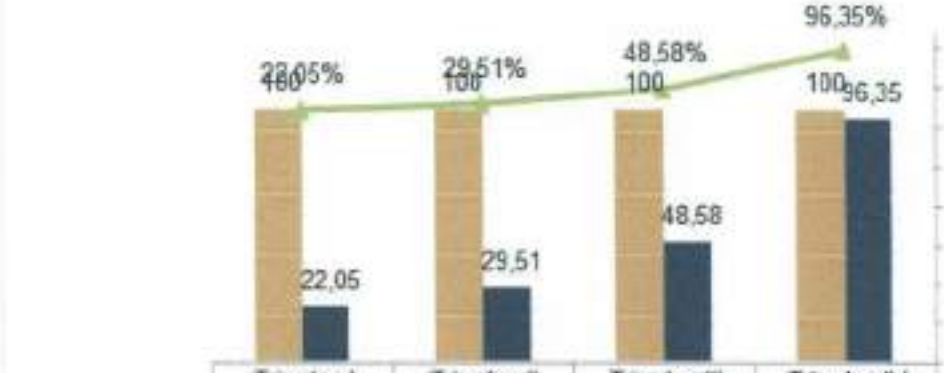
SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 1.1	80%	83,78%	104,73	Turun 15,51%
2.	2022	IKK 1.1	80%	83,79%	110	Naik 5,27%
3.	2023	IKK 1.1	100%	100%	100	Turun 10%
4.	2024	IKK 1.1	100%	97%	97	Turun 3%
5.	2025	IKK 2.1	100%	96%	96	Turun 1%



Gambar 3.2 Grafik IKK 2.1 Target, Realisasi, Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Jalan tahun 2025 sebesar 96% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 96%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Layanan Subsidi Transportasi Jalan tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	100	100	100	100
Realisasi	22,05	29,51	48,58	96,35
Capaian	22,05%	29,51%	48,58%	96,35%

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Jalan Penyeberangan Layanan Subsidi Transportasi Jalan tahun 2025 yang Beroperasi Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.2 SK5 Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

1. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

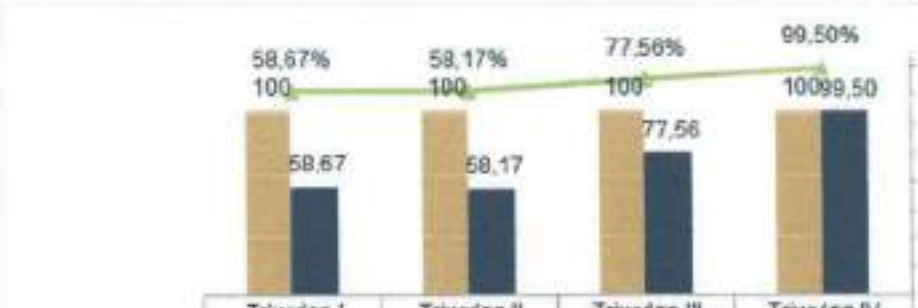
Pelaksanaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP merupakan kegiatan BPTD Kelas II Sulawesi Selatan yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip penyeberangan yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung indikator Persentase Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja pelaksanaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 6 lintasan dari target 6 lintasan alur yang sesuai SK Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2025 yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4000 trip, maka capaian kinerja Triwulan IV mencapai 99,50%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.3 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	100	100	100	100
Realisasi	58,67	58,17	77,56	99,50
Capaian	58,67%	58,17%	77,56%	99,50%

Gambar 3.4 Grafik Capaian IKK Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis maka ditetapkan untuk pengawasan dan pelayanan angkutan perintis pelabuhan penyeberangan oleh BPTD Kelas II Sulawesi Selatan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi

Transportasi Angkutan ASDP terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 4000 Trip yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain:

1. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya atas dukungan anggaran sehingga dapat melakukan pengawasan operasional dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
2. Disamping itu, juga atas peran aktif para personil satuan pelayanan di masing-masing satpel yang intens melakukan koordinasi dengan para penyelenggara angkutan penyeberangan serta intens melakukan pengawasan operasional penyelenggaraan angkutan penyeberangan di lapangan.

- **Faktor-Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain:

1. Operator pelabuhan belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di pelabuhan sehingga dalam menjaga ketertiban dan kelancaran terhadap kegiatan di pelabuhan penyeberangan, beberapa tugas dan fungsi yang seharusnya dikerjakan oleh operator pelabuhan namun dikerjakan oleh Personil Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat.
2. Terbatasnya jumlah aparatur Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang Pengawasan Operasional di lapangan serta kurang updatenya para personil satpel terhadap regulasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan operasional di lapangan.

3. Cakupan wilayah secara geografis yang luas sehingga dalam implementasi membutuhkan waktu yang cukup sehingga perlunya manajemen personil dan waktu dalam pelaksanaannya.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 3.980 Trip dengan rincian capaian ritase untuk masing-masing trayek adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Trip kapal Hingga September Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

No	Nama Kapal	Lintasan	Target Trip Sesuai Kontrak	Realisasi Trip	% Capaian trip
1.	KMP. Sangke Palangga	BIRA - JAMPEA	154	152	98,70
		JAMPEA - LABUAN BAJO	88	86	97,73
		JAMPEA - MARAPOKOT	66	66	100,00
2.	KMP. Takabonerate	BIRA - PATTUMBUKAN	132	128	96,97
		PATTUMBUKAN - KAYUADI	132	128	96,97
		KAYUADI - JINATO	124	120	96,97
		JINATO - KAYUADI	12	8	66,67
		KAYUADI - JAMPEA	20	14	70,00
		JINATO - JAMPEA	112	114	101,79
		JAMPEA - BONERATE	132	128	96,97
		BONERATE – KALAOTOA	132	128	96,97
3.	KMP. Bontoharu	BIRA - SIKELI	88	88	100,00
		SIKELI - KASIPUTE	88	88	100,00

4.	KMP. Opudi	SOROWAKO - NUHA	880	880	100,00
5.	KMP. Pangkilang	TIMAMPU - TOKALIMBO	792	648	81,82
6.	KMP. Arwana	PANGKAJENE - P. SABUTUNG	1148	1130	98,43
		P. SABUTUNG - BALANG LOMPO	88	74	84,09
Rata-Rata Persentase Realisasi Trip					**99,50**

Sumber: Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan (2025).

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perbaikan implementasi melalui rapat koordinasi bersama para penyelenggara angkutan penyeberangan untuk membahas tugas dan fungsi masing-masing;
2. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Diperlukan sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

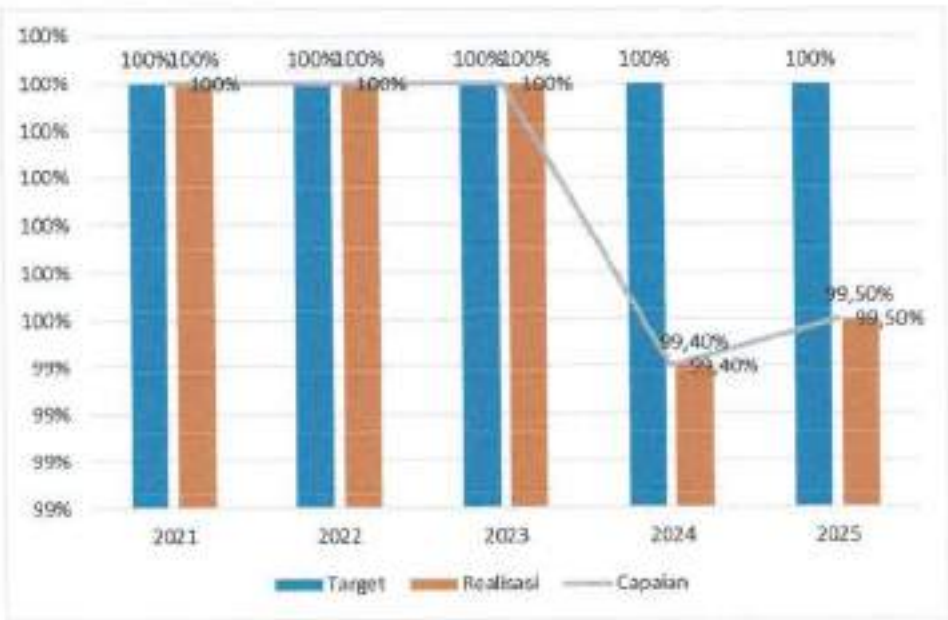
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar 3.980 trip jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebesar 100%, maka capaian kinerja Tahun 2024 menapai 99,5% sedangkan pada 2021, 2022, 2023, dan 2024 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 99,85% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 99,85%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 lebih besar dibandingkan

dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	2021	IKK 1.5	100%	100%	100%	Tetap
2.	2022	IKK 1.5	100%	100%	100%	Tetap
3.	2023	IKK 1.5	100%	100%	100%	Tetap
4.	2024	IKK 1.5	100%	99,4%	99,4%	Turun 0,6%
5.	2025	IKK 6	4000 trip	3.980 trip	99,5%	Naik 1%



Gambar 3.5 Grafik IIK 6 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 sebesar 3.980 trip jika dibandingkan dengan

target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 4.000 trip maka capaian kinerja mencapai 99,44%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan IV Tahun 2024
Target	100	100	100	100
Realisasi	24,31	49,27	78,58	99,44
Capaian	24,31%	49,27%	78,58%	99,44%

Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.3 SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

1. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dihitung pada Terminal Tipe A yang dikelola oleh

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan mengelola 3 (tiga) terminal yaitu Terminal Tipe A Watampone Kabupaten Bone, Terminal Tipe A Latenri Sessu Barru, Terminal Tipe A Parepare. Adapun 3 (tiga) Terminal Tipe A tersebut antara lain:

Tabel 3.6 Terminal Tipe A BPTD Kelas II Sulawesi Selatan

NO	Terminal Tipe A dikelola	Lokasi
1.	Terminal Tipe A Watampone Bone	Jl. MT. Haryono, Kec. Watampone, Kabupaten Bone
2.	Terminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae Barru	Kelurahan Lalolang, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru
3.	Terminal Tipe A Induk Lumpue Parepare	Jl. Mardin Kasim, Lumpue, Kota Parepare

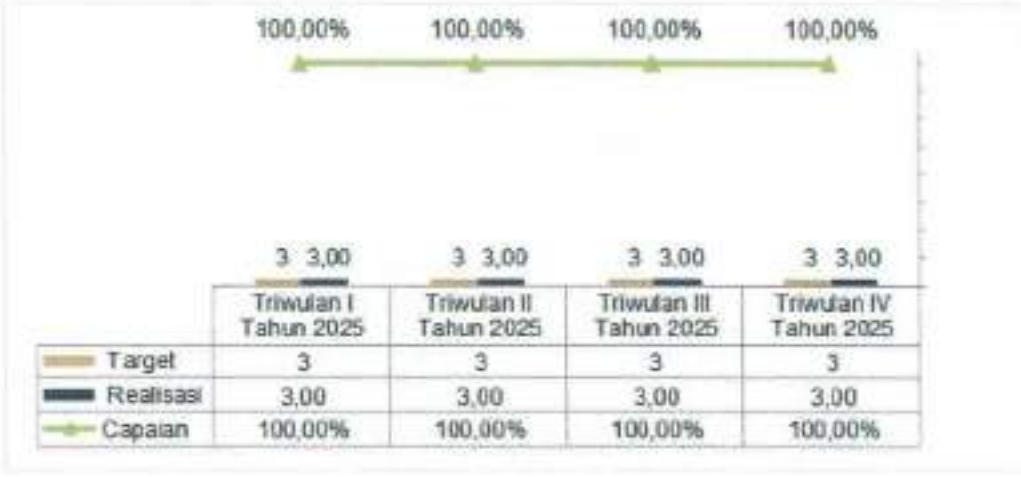
Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

Untuk menghitung indikator Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Triwulan IV Tahun 2025 adalah 3 (tiga) lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 (tiga) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.3 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	3	3	3	3
Realisasi	3,00	3,00	3,00	3,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.7 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Pelaksanaan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Terminal Tipe A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan jalan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Capaian Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 100% sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM terhadap Pelayanan Transportasi Darat memiliki target 3 lokasi yang diperoleh dari capaian kinerja Tahun sebelumnya sebesar 3 lokasi.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM antara lain:

1. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan;
2. Tersedianya SDM yang kompeten yang dapat melakukan inventarisir Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Kordinasi yang berkesinambungan dengan Pemerintah Daerah tentang upaya peramaian terminal.

- **Faktor-Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM antara lain:

1. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal Tipe A yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
   a. Terminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae

      Terminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae merupakan salah satu terminal tipe A yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Barru, dimana terminal ini bukan merupakan terminal asal tujuan melainkan sebagai terminal perlintasan dari Kota Makassar ke daerah Sulawesi lainnya dan sebaliknya. Adapun juga kondisi terminal yang sudah mulai rusak di makan usia baik dari segi fasilitas utama maupun fasilitas penunjangnya karena kurangnya pengunjung pada terminal tersebut serta lokasi terminal yang jauh dari jalan utama.

   b. Terminal Tipe A Induk Lumpue

Terminal Tipe A Induk Lumpue Kota Parepare merupakan salah satu Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan yang bertempat di Kota Parepare, dimana terminal ini bukanlah terminal asal dan tujuan melainkan sebagai terminal perlintasan dari Kota Makassar ke daerah Sulawesi lainnya dan sebaliknya. Adapun juga kondisi terminal ini masih dalam tahap pembangunan dan banyak fasilitas utama serta fasilitas penunjang yang belum dibangun seluruhnya serta lokasi terminal yang jauh dari jalan utama.

c. Terminal Tipe A Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

   Terminal Tipe A Watampone merupakan salah satu terminal tipe A yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Kabupaten Bone, dimana terminal ini bukan merupakan terminal asal tujuan melainkan terminal lintasan dari Kota Makassar ke daerah Sulawesi Lainnya dan sebaliknya. Adapun juga kondisi terminal yang sudah mulai rusak termakan usia baik dari segi fasilitas utama maupun fasilitas penunjangnya karena kurangnya pengunjung pada terminal tersebut dan perlukan dilakukan revitalisasi.

d. Banyaknya Perusahan Otobus yang tidak menaikkan dan menurunkan penumpang pada terminal yang mengakibatkan terminal sepi dan kurang pengunjung.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebanyak 3 lokasi. Adapun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 3 lokasi terminal tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

No		Trayek	TTA Latenri Sessu		TTA Induk Lumpue		TTA Watampone	
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	**Pelayanan Keselamatan**							
	a.	Lajur pejalan kaki		✓		✓	✓	
	b.	Fasilitas keselamatan jalan		✓	✓		✓	
	c.	Jalur evakuasi		✓		✓		✓
	d.	Alat pemadam kebakaran		✓	✓			✓
	e.	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	✓		✓		✓	
	f.	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksaan kelaikan kendaraan AKAP		✓		✓		✓
	g.	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum		✓		✓		✓
	h.	Informasi fasilitas keselamatan		✓		✓	✓	
	i.	Informasi Fasilitas Kesehatan		✓		✓		✓
	j.	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor		✓		✓		✓
	Pelayanan Keamanan							

No		Trayek	TTA Latenri Sessu		TTA Induk Lumpue		TTA Watampone	
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
2.	a.	Fasilitas keamanan		✓		✓		✓
	b.	Media pengaduan gangguan keamanan		✓		✓		✓
	c.	Petugas kemanan		✓		✓		✓
3.	Pelayanan Kehandalan / Keteraturan							
	a.	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan AKAP beserta realisasi jadwal secara tertulis	✓		✓			✓
	b.	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan bserta realisasi jadwal		✓		✓		✓
	c.	Loket penjualan tiket		✓	✓		✓	
	d.	Kantor penyelenggaraan terminal, ruang kendali dan manajemen system informasi terminal	✓		✓		✓	
	e.	Petugas operasional terminal	✓		✓		✓	
	Pelayanan Kenyamanan							

No	Trayek		TTA Latenri Sessu		TTA Induk Lumpue		TTA Watampone	
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
4.	a.	Ruang tunggu	✓		✓		✓	
	b.	Toilet	✓		✓		✓	
	c.	Fasilitas peribadatan / Mushola		✓	✓		✓	
	d.	Ruang terbuka hijau	✓		✓		✓	
	e.	Fasilitas dan petugas kebersihan	✓		✓		✓	
	f.	Tempat istirahat awak kendaraan		✓		✓		✓
	g.	Area merokok (smoking area)	✓		✓		✓	
	h.	Drainase	✓		✓		✓	
	i.	Area dengan jaringan internet (hot spot area)	✓		✓			✓
	j.	Ruang baca (reading corner)		✓		✓		✓
	k.	Lampu penerangan ruangan	✓		✓		✓	
	Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan							
	a.	Letak jalur pemberangkatan	✓		✓		✓	
	b.	Letak jalur kedatangan	✓		✓		✓	
	c.	Informasi pelayanan		✓	✓		✓	
	d.	Informasi angkutan lanjutan		✓		✓		✓

No	Trayek		TTA Latenri Sessu		TTA Induk Lumpue		TTA Watampone	
			Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
5.	e.	Informasi gangguan perjalanan mobil bus		✓		✓		✓
	f.	Tempat penitipan barang		✓		✓		✓
	g.	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)		✓		✓		✓
	h.	Tempat naik/turun penumpang	✓		✓		✓	
	i.	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	✓		✓		✓	
6.	**Pelayanan Kesetaraan**							
	a.	Fasilitas penyandang cacat (difabel)		✓	✓			✓
	b.	Ruang ibu menyusui	✓		✓		✓	
	Presentasi Pemenuhan SPM		**42,5**		**57,5**		**52,5**	

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialiasi kepada Perusahaan Otobus agar menaikan atau menurunkan penumpang wajib di Terminal Tipe A yang sudah tersedia yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dengan kompleksnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dengan beberapa indikator yang setiap saat harus dipantau maka

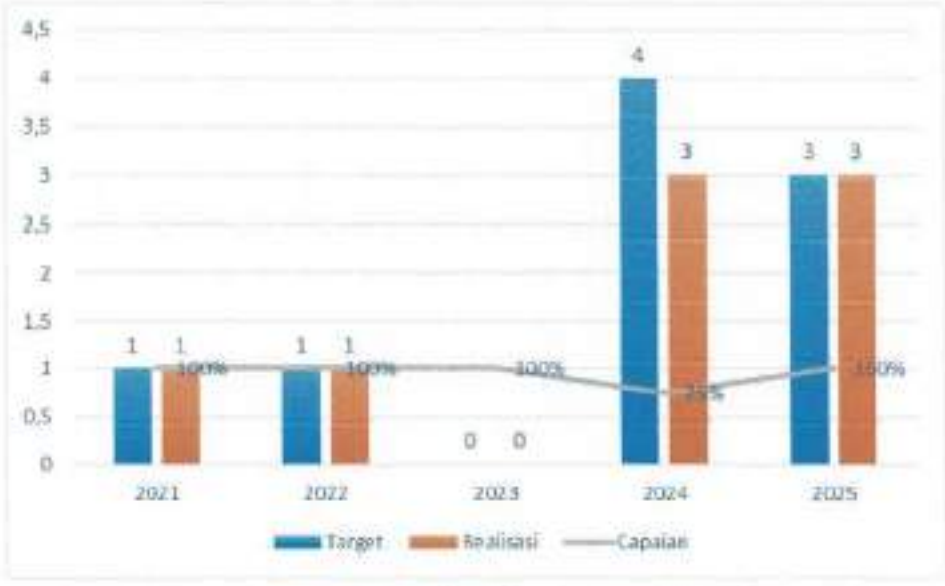
diperlukan sistem informasi yang dapat mempermudah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebesar 3 lokasi, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM sebesar 2 Lokasi dengan target 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 sama dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 1.3	1 Lokasi	1 Lokasi	100	Tetap
2.	2022	IKK 1.3	1 Lokasi	1 Lokasi	100	Tetap
3.	2023	IKK 1.3	-	-	100	Tetap
4.	2024	IKK 1.3	4 Lokasi	3 Lokasi	75%	Turun 25%
5.	2025	IKK 7.2	3 Lokasi	3 Lokasi	100%	Naik 25%



Gambar 3.8 IKK 7.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	3	3	3	3
Realisasi	3,00	3,00	3,00	3,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.9 Perbandingan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM adalah ukuran kinerja yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya pelaksanaan kegiatan operasional Fasilitas Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Indikator ini menilai sejauh mana BPTD mampu menjalankan operasional fasilitas penimbangan secara teratur, berkesinambungan, dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Saat ini terdapat 8 (delapan) Fasilitas Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang penganggarannya masuk kedalam Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Adapun 8 (delapan) Fasilitas Penimbangan Kendaraan tersebut antara lain:

Tabel 3.9 Jumlah Operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

No	UPPKB dikelola	Lokasi
1.	UPPKB Maccopa	Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros
2.	UPPKB Somba Opu	Jl. Poros Pallangga, Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
3.	UPPKB Pallangga	Jl. Poros Pallangga, Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
4.	UPPKB Tana Batue	Tanah Batue, Kec. Libureng, Kabupaten Bone
5.	UPPKB Sajoangin	Jl. Poros, Barangmamase, Kec. Sajoanging, Kabupaten Wajo
6.	UPPKB Larompong	Jl. Poros Makassar-Belopa Kec. Larompong, Kab. Luwu
7.	UPPKB Walenrang	Jl. Barammase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu
8.	UPPKB Datae	Lawawoi, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

Untuk menghitung indikator Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Triwulan IV berjumlah 8 unit UPPKB. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 8 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.4 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	8	8	8	8
Realisasi	8,00	8,00	8,00	8,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.10 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada ketentuan Keputusan Direktur

Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM 8 unit yang diperoleh dari capaian Perjanjian Kineja tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM antara lain:

1. Kesiapan fasilitas dan peralatan, seluruh UPPKB beroperasi dengan alat timbang yang terkalibrasi dan berfungsi baik;
2. Kedisiplinan Personel, petugas penimbangan melaksanakan jadwal kerja sesuai SOP;
3. Pemanfaatan Sistem Pelaporan Elektronik, penerapan sistem pelaporan digital membantu monitoring real time kegiatan UPPKB.

- **Faktor-Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM antara lain:

1. Keterbatasan SDM teknis yang mencakup keterbatasan jumlah petugas yang memiliki kompetensi khusus yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional;
2. Kendala Teknis Peralatan berupa gangguan fungsi peralatan penimbangan yang berdampak pada terhambatnya keberlangsungan operasional;

3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UPPKB yang masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu sebanyak 8 lokasi.

- **Capaian Kinerja**

  Capaian Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM tahun 2025 adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{8\ \text{Unit}}{8\ \text{Unit}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp11.500.963.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 5.955.683.051 atau mencapai 51,8%.

a.4). Upaya untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

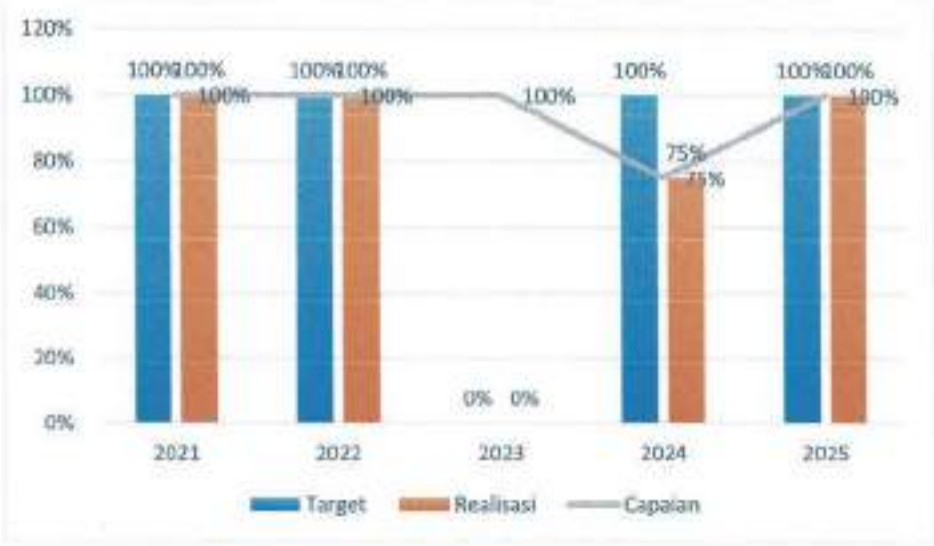
1. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
2. Optimalisasi dan Pemenuhan SDM Operasional dan Teknis;
3. Penguatan Sarana dan Prasarana Kantor Fasilitas Penimbangan Kendaraan.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2024 sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja Tahun 2024 menapai 75% sedangkan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebesar 1 Lokasi dengan target 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk rincian capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:
Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

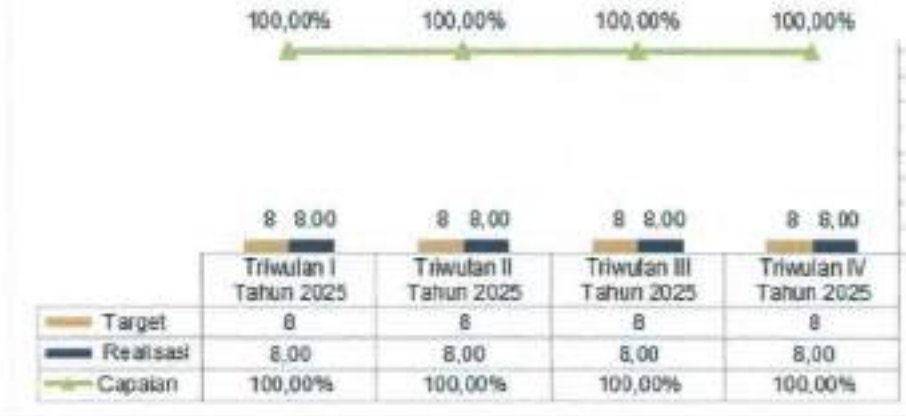
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 1.3	1	1	100	Tetap
2.	2022	IKK 1.3	1	1	100	Tetap
3.	2023	IKK 1.3	-	-	100	Tetap
4.	2024	IKK 1.3	4	3	75	Turun 25%
5.	2025	IKK 7.4	8	8	100	Naik 25%



Gambar 3.11 Grafik IKK 7.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025 sebanyak 8 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebanyak 8 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.12 Perbandingan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	8	8	8	8
Realisasi	8,00	8,00	8,00	8,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

a.6). Benchmark Nasional/Internasional

2. dan Pokok

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, penilaian, dan tindak lanjut terhadap seluruh kegiatan pelayanan publik yang menjadi tugas dan kewenangan BPTD Kelas II Sulawesi Selatan.

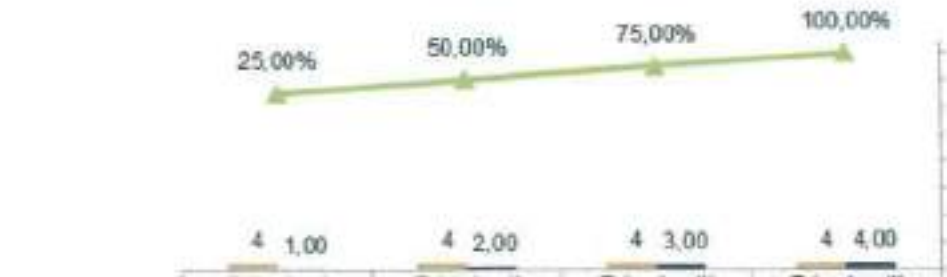
Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana BPTD Kelas II Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat, termasuk efektivitas pelaksanaan SPM, efisiensi layanan, dan pencapaian target kinerja tahunan.

Untuk menghitung indikator Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah 4 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 berjumlah 4 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.5 Grafik Capaian IKK Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025
Target	4	4	4	4
Realisasi	1,00	2,00	3,00	4,00
Capaian	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Gambar 3.13 Grafik Capaian IKK Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka telah ditetapkan laporan hasil pemantauan Unit Kepatuhan Internal.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok memiliki target 4 kegiatan yang diperoleh dari capaian Perjanjian Kineja tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain:

  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Fokusnya tidak hanya pada layanan eksternal atau publik, tetapi juga pada aspek internal: disiplin pegawai, kepegawaian, BMN, integritas.
  2. Ketersediaan SDM yang kompeten, petugas monev memiliki kemampuan analisis, dokumentasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.
  3. Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah pelacakan hasil monev, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan akurasi data.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

  Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain:

  1. Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih terbatas, menghambat pelaksanaan monev di seluruh wilayah kerja sesuai jadwal.
  2. Beberapa fasilitas Satuan Pelayanan yang menjadi lokasi monev masih memerlukan peningkatan, seperti ruang kerja, perangkat komputer, serta sarana dan prasarana pendukung.

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 terhadap

target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 4 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

  Capaian Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 ialah 100%, dengan rincian sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait kinerja Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp890.775.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara lebih sistematis, terencana, dan terukur dengan mengacu langsung pada pedoman KM 42/2019;
2. Memperkuat peran UKI di lingkungan BPTD sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan pemantauan kepatuhan internal;
3. Menyelenggarakan rapat evaluasi triwulanan guna menilai kemajuan pelaksanaan monev dan mengidentifikasi hambatan di lapangan.

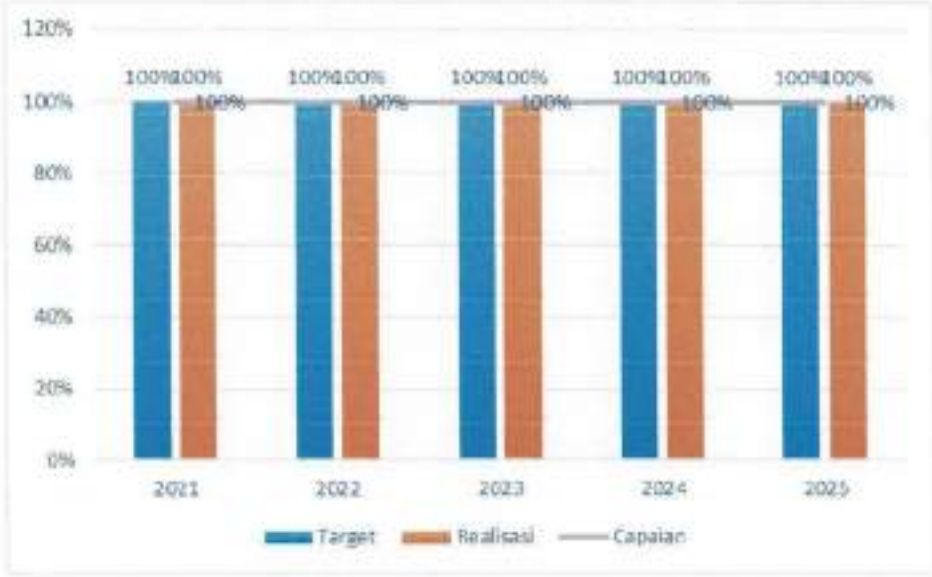
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebanyak 4 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebanyak 4 kegiatan, maka capaian kinerja Tahun 2025 menapai 100% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebesar 100% dengan target 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk rincian capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 5.1	90 Nilai	90 Nilai	100	Tetap
2.	2022	IKK 5.1	90 Nilai	90 Nilai	100	Tetap
3.	2023	IKK 5.1	90 Nilai	90 Nilai	100	tetap
4	2024	IKK 5.1	90 Nilai	90,2 Nilai	100	Tetap
5.	2025	IKK 7.5	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Tetap

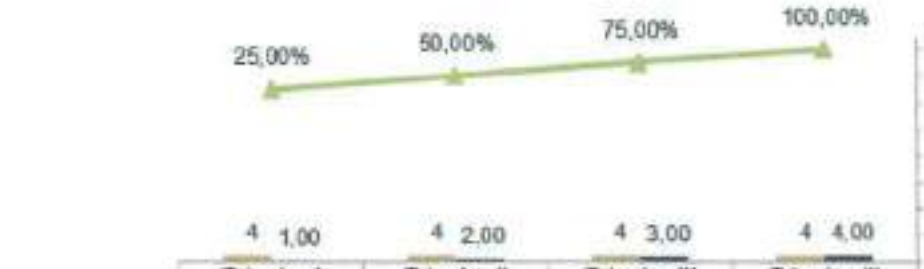


Gambar 3.14 Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 sebanyak 4 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar sebanyak 4 kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 terhadap

target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025
Target	4	4	4	4
Realisasi	1,00	2,00	3,00	4,00
Capaian	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024.

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.4 SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

1. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

   a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

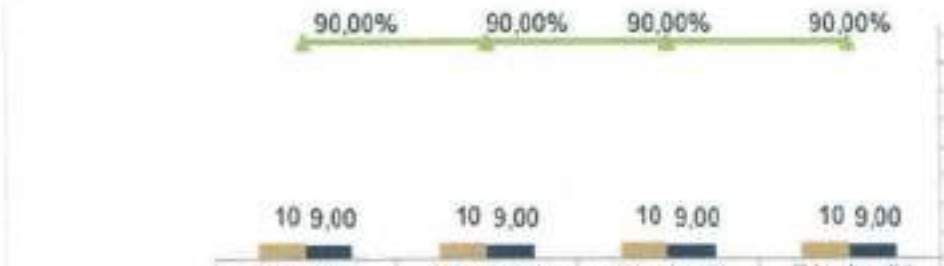
   Pelaksanaan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM merupakan ukuran tingkat keterlaksanaan kegiatan operasional layanan di pelabuhan penyeberangan di bawah pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan yang beroperasi sesuai standar, kelayakan fasilitas, keselamatan pelayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif pelayanan publik.

   Untuk menghitung indikator Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah 9 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 10 unit, maka capaian kinerja mencapai 90%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.6 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	10	10	10	10
Realisasi	9,00	9,00	9,00	9,00
Capaian	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Gambar 3.16 Grafik Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan terdata 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 ada 15 (lima belas) Pelabuhan SDP yang terdapat pada DIPA BPTD Kelas II Sulawesi Selatan diantaranya 10 Pelabuhan Penyeberangan dan 5 Pelabuhan Sungai dan Danau. Adapun 10 Pelabuhan Penyeberangan tersebut diantaranya:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

No	Pelabuhan dikelola
1.	Pelabuhan Penyeberangan Bajoe
2.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)
3.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)
4.	Pelabuhan Penyeberangan Bira
5.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)
6.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang)
7.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilambena)
8.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu)
9.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takabonerate)
10.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimasunggu)

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM memiliki target 10 unit sesuai dengan DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan tahun 2025.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan indikator kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM adalah sebagai berikut:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Koordinasi yang baik antara BPTD dan operator kapal penyeberangan;
3. Pemantauan dan evaluasi berkala oleh tim pengawasan.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

  Adapun faktor yang memengaruhi Kegagalan indikator kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM adalah sebagai berikut:

  - Terdapat 1 pelabuhan penyeberangan yang Belum ada pembangunan, sehingga tidak beroperasi pada tahun 2025, namun untuk penganggaran sudah masuk ke dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2025;
  - Keadaan alam seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar kantor;
  - Masih perlu peningkatan fasilitas sarana dan prasana dalam meningkatkan SPM.

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 10 lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

No	Pelabuhan dikelola	Keterangan
1.	Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Beroperasi
2.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)	Beroperasi
3.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)	Beroperasi
4.	Pelabuhan Penyeberangan Bira	Beroperasi
5.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)	Beroperasi
6.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang)	Beroperasi
7.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilambena)	Beroperasi

No	Pelabuhan dikelola	Keterangan
8.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu)	Beroperasi
9.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takabonerate)	Beroperasi
10.	Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimasunggu)	Belum ada pembangunan

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

Tabel 3.13 Poin Penilaian Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT (%)	PAMATATA	BIRA	PATTUMBUKAN	BAJOE	GARONGKONG	SIWA
			48,89	55,06	28,55	89,47	52,09	43,17
			SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.	**PELAYANAN PENUMPANG DI PELABUHAN**	**33%**	**33%**	**33%**	**33%**	**33%**	**33%**	**33%**
A.1.	**Pelayanan Area Pintu Pengantar dan Penjemput**	**9,80%**						
	A.1.1. Keselamatan	2,88%	2,88	2,88	1,77	2,88	2,88	0,00
	A.1.2. Keamanan	2,88%	1,20	2,16	0,00	2,88	0,00	2,16
	A.1.3. Kenyamanan	1,73%	1,73	1,73	1,38	1,73	1,73	1,73
	A.1.4. Kehandalan Keteraturan	2,31%	2,31	2,31	1,92	2,31	2,31	2,31
A.2.	**Pelayanan Gedung Terminal**	**9,80%**						
	A.2.1. Keselamatan	2,13%	1,56	0,00	0,00	2,13	0,68	1,69
	A.2.2. Keamanan	2,13%	0,89	1,60	0,00	2,13	0,00	1,60
	A.2.3. Kenyamanan	1,28%	0,99	1,12	0,16	1,12	1,28	1,28
	A.2.4. Kemudahan Keterjangkauan	1,28%	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	A.2.5. Kehandalan Keteraturan	1,71%	1,31	1,31	0,66	1,31	1,71	1,46
	A.2.6. Kesetaraan	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
A.3.	**Pelayanan Jalur Pejalanan Kaki (Gangway)**	**9,80%**						
	A.3.1. Keselamatan	2,13%	0,00	1,07	0,00	1,07	2,13	0,00
	A.3.2.	2,13%	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00
	A.3.3. Kenyamanan	1,28%	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28	1,28
	A.3.4. Kemudahan Keterjangkauan	1,28%	0,00	1,28	0,00	0,64	1,28	0,00
	A.3.5. Kehandalan Keteraturan	1,71%	0,00	1,71	0,00	1,71	1,71	1,71
	A.3.6. Kesetaraan	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	**Pelayanan Area Titik Kumpul Evakuasi (Muster Station)**	**3,92%**						
	A.4.1. Keselamatan	1,96%	1,96	1,96	0,67	1,96	1,96	0,00
	A.3.2. Keamanan	1,96%	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
B.	**PELAYANAN KENDARAAN DI PELABUHAN**	**33%**						
B.1.	**Pelayanan Jembatan Timbang**	**7,14%**						

	B.1.1 Keselamatan	2,10%	0,68	1,48	0,00	1,44	0,26	0,00
	B.1.2 Keamanan	2,10%	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
	B.1.3 Kenyamanan	1,26%	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00
	B.1.4 Kehandalan Keteraturan	1,68%	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00
B.2	**Pelayanan kendaraan di Loket Masuk**	**7,14%**						
	B.2.1 Keselamatan	1,79%	1,02	1,02	0,00	1,79	0,00	0,00
	B.2.2 Keamanan	1,79%	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00
	B.2.3 Kenyamanan	1,07%	1,07	1,07	0,00	1,07	1,07	1,07
	B.2.4 Kemudahan Keterjangkauan	1,07%	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00
	B.2.5 Kehandalan Keteraturan	1,43%	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43	1,43
B.3	**Pelayanan Area parkir siap muat untuk kendaraan yang sudah berliket / Zona E (jika ada)**	**11,90%**						
	B.3.1 Keselamatan	2,98%	1,08	1,08	0,00	2,44	0,88	0,54
	B.3.2 Keamanan	2,98%	1,36	0,99	0,00	2,98	0,00	2,23
	B.3.3 Kenyamanan	1,79%	1,58	1,45	1,35	1,79	1,45	1,45
	B.3.4 Kemudahan Keterjangkauan	1,79%	0,00	1,79	0,00	1,79	1,79	0,00
	B.3.5 Kehandalan Keteraturan	2,38%	1,08	1,08	0,54	2,38	1,08	1,08
B.4	**Pelayanan Area parkir siap muat untuk kendaraan listrik yang sudah berliket**	**2,38%**						
	B.4.1 Keselamatan	0,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.4.2 Keamanan	0,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.4.3 Kenyamanan	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	**Pelayanan Area pemeriksaan tiket kendaraan sebelum masuk ke kapal**	**4,76%**						
	B.5.1 Keselamatan	1,40%	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	B.5.2 Keamanan	1,40%	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,78
	B.5.3 Kenyamanan	0,84%	0,84	0,84	0,00	0,84	0,84	0,84
	B.5.4 Kemudahan keterjangkauan	1,12%	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
C.	**PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN**	**33%**						

C.1.a	**Pelayanan Dermaga beserta fasilitasnya (Untuk Pelabuhan yang hanya memiliki 1 Dermaga)**	13,89%						
	C.1a.1. Keselamatan	3,47%	0,87	0,00	0,55	3,47	0,00	0,55
	C.1a.2 Keamanan	3,47%	1,72	0,00	2,17	3,47	0,00	0,79
	C.1a.3 Kenyamanan	2,08%	1,28	0,00	1,28	2,08	0,00	2,08
	C.1a.4. Kemudahan Keterjangkauan	2,08%	2,08	0,00	2,08	2,08	2,08	2,08
	C.1a.5. Kehandalan keteraturan	2,78%	1,49	0,00	1,49	2,78	0,99	1,49
C.1.b	**Pelayanan Dermaga beserta fasilitasnya (Untuk Pelabuhan yang memiliki 2 Dermaga atau lebih)**	13,89%						
	C.1b.1. Keselamatan	3,47%	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.1b.2 Keamanan	3,47%	0,00	1,18	0,00	0,00	0,79	0,00
	C.1b.3 Kenyamanan	2,08%	0,00	1,04	0,00	0,00	2,08	0,00
	C.1b.4. Kemudahan Keterjangkauan	2,08%	0,00	1,04	0,00	0,00	2,08	0,00
	C.1b.5. Kehandalan keteraturan	2,78%	0,00	0,74	0,00	0,00	0,99	0,00
C.2.	**Pelayanan Kolam Pelabuhan**	5,56%						
	C.2.1 Keselamatan	2,78%	2,78	2,78	1,39	2,78	2,78	2,78
	C.2.2. Keamanan	2,78%	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00
C.3.	**Pelayanan Alur Pelayaran**	5,56%						
	C.3.1. Keselamatan	5,56%	4,49	5,56	4,49	5,56	2,78	4,49
C.4.	**Pelayanan Fasilitas Bunker BBM**	2,78%						
	C.4.1. Keselamatan	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
	C.4.2. Keamanan	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
	C.4.3. Kenyamanan	0,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
	C.4.4. Kehandalan Keteraturan	0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5.	**Pelayanan Air Tawar**	2,78%						
	C.5.1. Keselamatan	0,82%	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00
	C.5.2. Keamanan	0,82%	0,37	0,59	0,00	0,82	0,00	0,00
	C.5.3. Kenyamanan	0,49%	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00
	C.5.4. Kehandalan Keteraturan	0,65%	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

- **Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{9 \text{ Lokasi}}{10 \text{ Lokasi}} \text{ x } 100\% = 90\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp3.568.677.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp2.476.702.863 atau mencapai 69%.

a.4). Upaya untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Optimalisasi koordinasi dengan operator kapal dan stakeholder terkait;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan penyeberangan;
3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap pelabuhan mematuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal).

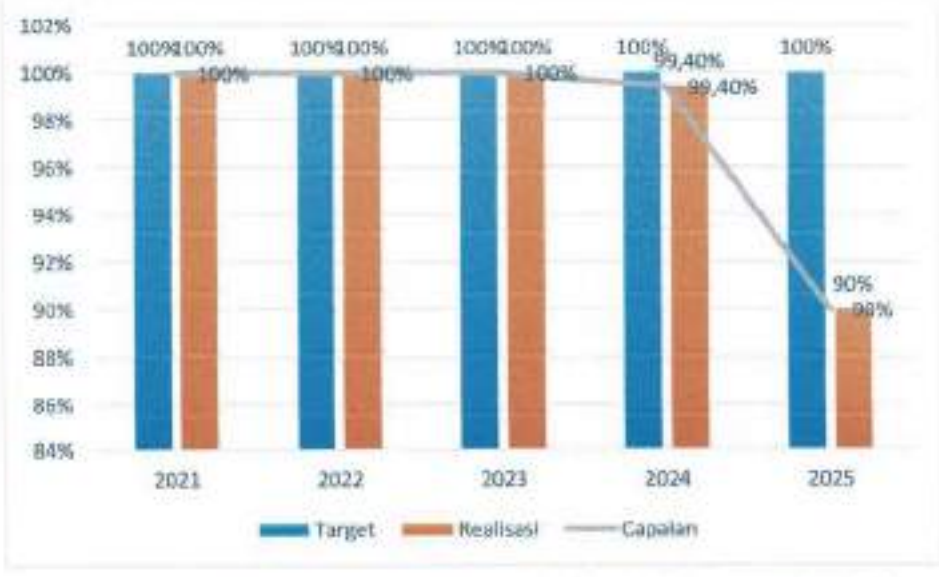
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Tahun 2025 sebanyak 9 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 100%, maka capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 90% sedangkan

pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM sebesar 99,85% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 99,85%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

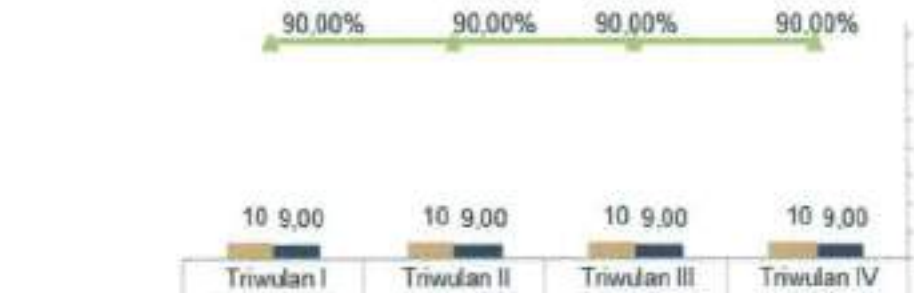
SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 1.5	100	100	100%	Tetap
2.	2022	IKK 1.5	100	100	100%	Tetap
3.	2023	IKK 1.5	100	100	100%	Tetap
4.	2024	IKK 1.5	100	99,4	99,4%	Turun 0,6%
5.	2025	IKK 8.2	10 Lokasi	9 Lokasi	90%	Turun 9,4%



Gambar 3.17 Grafik IKK 8.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM pada tahun 2025 sebanyak 9 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebanyak 10 lokasi maka capaian kinerja mencapai 90%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM pada tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	10	10	10	10
Realisasi	9,00	9,00	9,00	9,00
Capaian	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Gambar 3.18 Perbandingan Realisasi Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM merupakan ukuran tingkat keterlaksanaan kegiatan operasional layanan di pelabuhan sungai dan danau di bawah

pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan yang beroperasi sesuai standar, kelayakan fasilitas, keselamatan pelayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif pelayanan publik.

Untuk menghitung indikator Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah 5 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.7 Grafik Capaian IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	5,00	5,00	5,00	5,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.19 Grafik Capaian IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 6188 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian dan Pengawasan Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan terdata 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 ada 15 (lima belas) Pelabuhan SDP yang terdapat pada DIPA BPTD Kelas II Sulawesi Selatan diantaranya 10 Pelabuhan Penyeberangan dan 5 Pelabuhan Sungai dan Danau. Adapun 5 Pelabuhan Sungai dan Danau tersebut diantaranya:

Tabel 3.15 Pelabuhan Sungai dan Danau yang terdapat pada DIPA BPTD Kelas II Sulawesi Selatan

No	Pelabuhan dikelola
1.	Pelabuhan Sungai Rammang-rammang
2.	Pelabuhan Danau Timampu
3.	Pelabuhan Danau Beau Tokalimbo
4.	Pelabuhan Danau Sorowako
5.	Pelabuhan Danau Nuha

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM memiliki target 5 unit

sesuai dengan DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan tahun 2025.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM adalah sebagai berikut:

  1. Komitmen dan konsistensi pelaksana layanan dalam menjaga standar pelayanan publik;
  2. Ketersediaan fasilitas pelabuhan yang memadai di sebagian besar lokasi layanan;
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan yang memastikan setiap unit pelayanan memenuhi prosedur dan standar yang ditetapkan.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

  Adapun faktor yang memengaruhi kegagalan Indikator Kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM adalah sebagai berikut:

  1. Keterbatasan SDM pelaksana operasional di lapangan, khususnya pada pelabuhan kecil;
  2. Kondisi geografis dan cuaca yang tidak menentu, seperti permukaan air yang turun naik, menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan.

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu berjumlah 5 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

No	Pelabuhan dikelola	Keterangan
1.	Pelabuhan Sungai Rammang-rammang	Beroperasi
2.	Pelabuhan Danau Timampu	Beroperasi
3.	Pelabuhan Danau Beau Tokalimbo	Beroperasi
4.	Pelabuhan Danau Sorowako	Beroperasi
5.	Pelabuhan Danau Nuha	Beroperasi

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

Tabel 3.17 Poin Penilaian Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT (%)	SOROWAKO	NUHA	TIMAMPU	BEAU TOKALIMBO
			30,09	29,76	23,12	27,55
			SKOR	SKOR	SKOR	SKOR
		100%	100%	100%	100%	100%
A.	PELAYANAN PENUMPANG DI PELABUHAN	33%	33%	33%	33%	33%
A.1.	Pelayanan Area Parkir Pengantar dan Penjemput	9,80%				
	A.1.1 Keselamatan	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1.2 Keamanan	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1.3 Kenyamanan	1,73%	1,15	0,00	0,00	0,72
	A.1.4 Kehandalan Keteraturan	2,31%	2,31	2,31	1,73	1,73

A.2.	**Pelayanan Gedung Terminal**	**9,80%**				
	A.2.1. Keselamatan	2,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2.2. Keamanan	2,13%	0,00	0,00	0,89	0,89
	A.2.3. Kenyamanan	1,28%	0,00	0,00	0,69	0,27
	A.2.4. Kemudahan Keterjangkauan	1,28%	1,28	1,28	1,28	1,28
	A.2.5. Kehandalan Keteraturan	1,71%	0,66	0,66	1,05	0,66
	A.2.6. Kesetaraan	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.	**Pelayanan Jalur Pejalanan Kaki (Gangway)**	**9,80%**				
	A.3.1. Keselamatan	2,13%	2,13	2,13	0,00	2,13
	A.3.2. Keamanan	2,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3.3. Kenyamanan	1,28%	0,00	0,00	0,64	0,64
	A.3.4. Kemudahan Keterjangkauan	1,28%	1,28	0,00	0,00	0,00
	A.3.5. Kehandalan Keteraturan	1,71%	1,71	1,71	1,71	1,71
	A.3.6. Kesetaraan	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	**Pelayanan Area Titik Kumpul Evakuasi (Master Station)**	**3,92%**				
	A.4.1. Keselamatan	1,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.4.2. Keamanan	1,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**PELAYANAN KENDARAAN DI PELABUHAN**	**33%**				
B.1.	**Pelayanan Jembatan Timbang**	**7,14%**				
	B.1.1. Keselamatan	2,10%	0,00	0,00	0,00	0,00

	B.1.2 Keamanan	2,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.1.3 Kenyamanan	1,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.1.4 Kehandalan Keteraturan	1,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	**Pelayanan Kendaraan di Loket Masuk**	**7,14%**				
	B.2.1 Keselamatan	1,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.2.2 Keamanan	1,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.2.3 Kenyamanan	1,07%	0,00	0,00	0,00	0,54
	B.2.4 Kemudahan Keterjangkaua n	1,07%	0,54	0,54	0,54	0,00
	B.2.5 Kehandalan Keteraturan	1,43%	1,43	1,43	1,43	1,43
B.3	**Pelayanan Area parkir siap muat untuk kendaraan yang sudah bertiket / Zona E (jika ada)**	**11,90%**				
	B.3.1 Keselamatan	2,98%	0,00	0,68	0,68	0,68
	B.3.2 Keamanan	2,98%	0,00	0,99	0,00	0,99
	B.3.3 Kenyamanan	1,79%	0,00	0,00	0,00	0,56
	B.3.4 Kemudahan Keterjangkaua n	1,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.3.5 Kehandalan Keteraturan	2,38%	1,08	1,08	0,34	0,54
B.4	**Pelayanan Area parkir siap muat untuk kendaraan listrik yang sudah bertiket**	**2,38%**				
	B.4.1 Keselamatan	0,92%	0,57	0,57	0,00	0,00
	B.4.2 Keamanan	0,92%	0,51	0,51	0,00	0,00

	B.4.3. Kenyamanan	0,55%	0,27	0,00	0,00	0,00
B.5.	**Pelayanan Area emeriksaan tiket kendaraan sebelum masuk ke kapal**	**4,76%**				
	B.5.1. Keselamatan	1,40%	0,70	1,40	1,40	1,40
	B.5.2. Keamanan	1,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.5.3. Kenyamanan	0,84%	0,00	0,00	0,00	0,42
	B.5.4. Kemudahan Keterjangkauan	1,12%	1,12	1,12	1,12	1,12
C.	**PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN**	**33%**				
C.1.a	**Pelayanan Dermaga beserta fasilitasnya (Untuk Pelabuhan yang hanya memiliki 1 Dermaga)**	**13,89%**				
	C.1a.1 Keselamatan	3,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.1a.2 Keamanan	3,47%	1,58	1,58	2,37	2,37
	C.1a.3 Kenyamanan	2,08%	0,00	0,00	1,39	1,39
	C.1a.4. Kemudahan Keterjangkauan	2,08%	2,08	2,08	2,08	2,08
	C.1a.5 Kehandalan keteraturan	2,78%	1,49	1,49	1,49	1,88
C.1.b	**Pelayanan Dermaga beserta fasilitasnya (Untuk Pelabuhan yang memiliki 2 Dermaga atau lebih)**	**13,89%**				
	C.1b.1 Keselamatan	3,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.1b.2 Keamanan	3,47%	1,58	1,58	0,00	0,00

	C.1b.3 Kenyamanan	2,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.1b.4. Kemudahan Keterjangkauan	2,08%	2,08	2,08	0,00	0,00
	C.1b.5. Kehandalan keteraturan	2,78%	1,49	1,49	0,00	0,00
C.2.	**Pelayanan Kolam Pelabuhan**	**5,56%**				
	C.2.1 Keselamatan	2,78%	2,78	2,78	0,00	0,00
	C.2.2. Keamanan	2,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.	**Pelayanan Alur Pelayaran**	**5,56%**				
	C.3.1. Keselamatan	5,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.	**Pelayanan Fasilitas Bunker BBM**	**2,78%**				
	C.4.1. Keselamatan	0,82%	0,00	0,00	0,82	0,82
	C.4.2. Keamanan	0,82%	0,27	0,27	0,44	0,27
	C.4.3. Kenyamanan	0,49%	0,00	0,00	0,49	0,49
	C.4.4. Kehandalan Keteraturan	0,65%	0,00	0,00	0,65	0,65
C.5.	**Pelayanan Air Tawar**	**2,78%**				
	C.5.1. Keselamatan	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.5.2. Keamanan	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.5.3. Kenyamanan	0,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.5.4. Kehandalan Keteraturan	0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
C.6.	**Pelayanan Fasilitas Penampungan dan/atau Pengolahan Limbah**	**2,78%**				
	C.6.1. Keselamatan	1,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.6.2. Keamanan	1,39%	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025).

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5\ \text{Unit}}{5\ \text{Unit}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp943.663.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp529.474.430 atau mencapai 56%.

a.4). Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan operasional dan pengawasan keselamatan pelayaran sungai dan danau;
2. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas pelayanan dan keselamatan untuk memperkuat kompetensi dan profesionalitas;
3. Melaksanakan kegiatan monev rutin untuk menilai kepatuhan terhadap SPM dan menindaklanjuti hasil temuan dengan langkah perbaikan cepat.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Realisasi kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM Tahun 2025 sebanyak 5 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 5 lokasi, maka capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 sama dengan tahun 2025.

Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 2.3	70	70	100	Tetap
2.	2022	IKK 2.3	70	70	100	Tetap
3.	2023	IKK 2.3	100	100	100	Tetap
4.	2024	IKK 2.3	100	100	100	Tetap
5.	2025	IKK 8.4	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	-



Gambar 3.20 Grafik IKK 8.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 2025 IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM tahun 2025 sebanyak 5 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2020-2024 sebanyak 5 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	5,00	5,00	5,00	5,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di

Pelabuhan Penyeberangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, serta pemeliharaan fasilitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar kegiatan transportasi penyeberangan berjalan tertib, aman, selamat, efisien, dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk menghitung Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 0 unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.8 Grafik Capaian IKK Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	-	-	-	2,00
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Gambar 3.22 Grafik Capaian IKK Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan terdata 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 ada 15 (lima belas) Pelabuhan SDP yang terdapat pada DIPA BPTD Kelas II Sulawesi Selatan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan memiliki target 2 unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Operasional

dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan antara lain:

1. Komitmen dan kedisiplinan petugas OTP serta Satpel pelabuhan dalam melaksanakan pengawasan;
2. Ketersediaan fasilitas dasar dan peralatan keselamatan yang memadai.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan antara lain:

1. Beberapa fasilitas pendukung belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Keterbatasan SDM pelaksana operasional dan pemeliharaan di lapangan, khususnya pada pelabuhan kecil.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi indikator kinerja kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 2 lokasi.

Tabel 3.19 Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP

KEDATANGAN	TRIP	PENUMPANG	RODA2	RODA4	BUS	TRUK	ALAT BERAT
BAJOE	89	14822	1769	465	230	551	4
BIRA	107	9434	1499	1068	95	486	0
PAMATATA	105	9536	1782	1056	102	497	1
PATUMBUKAN	6	24	9	4	0	8	0
GARONGKONG	4	351	13	14	0	14	0
SIWA	93	8483	1131	1275	9	609	1
SOROWAKO	27	105	93	112	11	4	0
NUHA	27	61	40	44	0	12	0
TIMAMPU	36	326	191	70	0	31	0
BEAU TOKALIMBO	36	371	239	55	0	126	0
TOTAL	530	42513	6766	4163	447	2318	6
KEBERANGKATAN	TRIP	PENUMPANG	RODA2	RODA4	BUS	TRUK	ALAT BERAT
BAJOE	90	14982	2007	950	236	937	46
BIRA	105	9536	1782	1056	102	497	1
PAMATATA	90	9045	1421	1093	118	444	0
PATUMBUKAN	6	452	114	6	0	0	0
GARONGKONG	5	377	45	18	0	22	3
SIWA	93	5145	1014	1199	9	639	6
SOROWAKO	27	62	40	44	0	12	0
NUHA	27	105	93	112	11	4	0
TIMAMPU	36	371	239	55	6	126	0
BEAU TOKALIMBO	36	326	191	70	0	31	0
TOTAL	515	40401	6986	4603	476	2732	56

Sumber: Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan (2025).

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp100.000.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan kapasitas SDM pengawasan OTP di pelabuhan penyeberangan;
2. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas instansi.

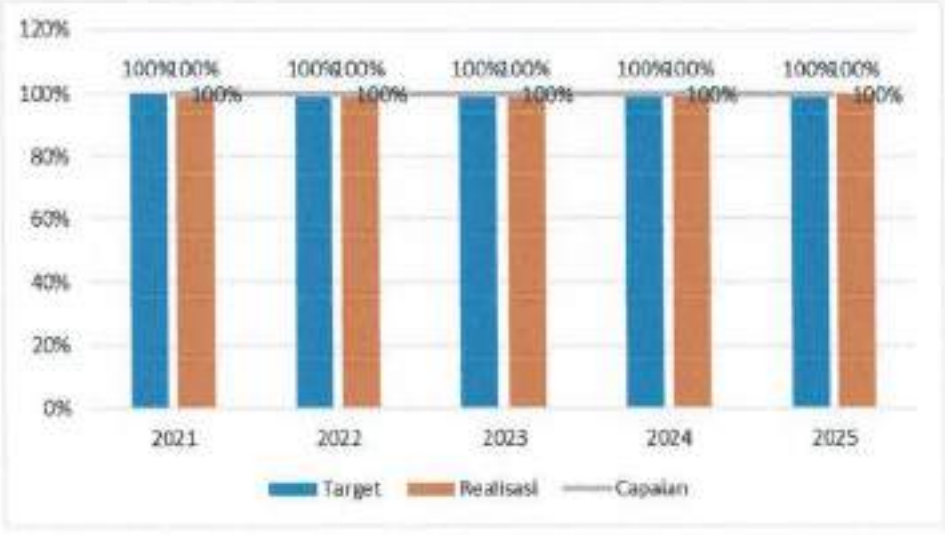
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Realisasi kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 sebanyak 2 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 2 lokasi, maka capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan sebesar 100% dengan target 85% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 sama dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 2.3	70	70	100	Tetap
2.	2022	IKK 2.3	70	70	100	Tetap
3.	2023	IKK 2.3	100	100	100	Tetap
4.	2024	IKK 2.3	100	100	100	Tetap

5.	2025	IKK 8.4	2 Lokasi	2 Lokasi	100	-



Gambar 3.23 Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan tahun 2025 sebanyak 2 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 2 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.24 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	-	-	-	2,00
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.5 SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan barang

1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Antar Kabupaten/Kota (AJAP), dan Angkutan Pariwisata merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam rangka menjamin keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan operator angkutan jalan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghitung indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata digunakan rumus sebagai

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.9 Grafik Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	1,00	2,00	2,00	2,00
Capaian	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.25 Grafik Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata pada terminal tipe A sesuai dengan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata pada terminal tipe A menjadi kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan dibawah Dirjen Hubdat sesuai

dengan PM 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata memiliki target senilai 2 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan tercapainya Indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata antara lain:

1. Komitmen petugas satuan pelayanan dalam melakukan pengawasan dan kegiatan lapangan secara rutin dan disiplin;
2. Koordinasi efektif dengan instansi mitra seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Daerah, dan stakeholder terkait dalam melakukan operasi gabungan;
3. Pemanfaatan sistem digital agar memudahkan pengumpulan data.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor yang memengaruhi kegagalan tercapainya indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata antara lain:

1. Masih perlu penambahan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan pengawasan;
2. Belum Optimalnya Kepatuhan Perusahaan Otobus (PO) serta masih ditemukannya kendaraan angkutan bus yang belum memenuhi standar kelayakan teknis dan administrasi, khususnya terkait uji berkala kendaraan bermotor (KIR);

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), belum terpenuhinya kebutuhan jumlah petugas yang memiliki spesifikasi khusus dalam pengawasan.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata Darat Tahun 2025 adalah sebesar 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata

SATUAN PELAYANAN	JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN DAN PENUMPANG							
	AKAP				AKDP			
	KEDATANGAN		KEBERANGKATAN		KEDATANGAN		KEBERANGKATAN	
	KENDARAAN	PENUMPANG	KENDARAAN	PENUMPANG	KENDARAAN	PENUMPANG	KENDARAAN	PENUMPANG
TTA INDUK LUMPUE	913	19166	913	19171	2452	53019	2462	53180
TTA LATENRI SESSU PEKKAE	347	7014	347	7014	606	12785	606	12785
TTA PETTA PONGGAWAE	266	3868	266	3825	185	788	185	793
TOTAL	1526	30048	1526	30010	3243	66570	3253	66758

Sumber: Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan (2025).

- **Capaian Kinerja**

Dengan demiklan, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2\ \text{Kegiatan}}{2\ \text{Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp200.000.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp196.543.246 atau mencapai 98,3%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun prioritas pengawasan pada trayek dan operator dengan tingkat pelanggaran tertinggi untuk efisiensi waktu dan biaya;
2. Melakukan pembinaan kepada operator dan pengemudi angkutan umum mengenai pentingnya kelaikan kendaraan, ketepatan waktu, serta pelayanan kepada penumpang;
3. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

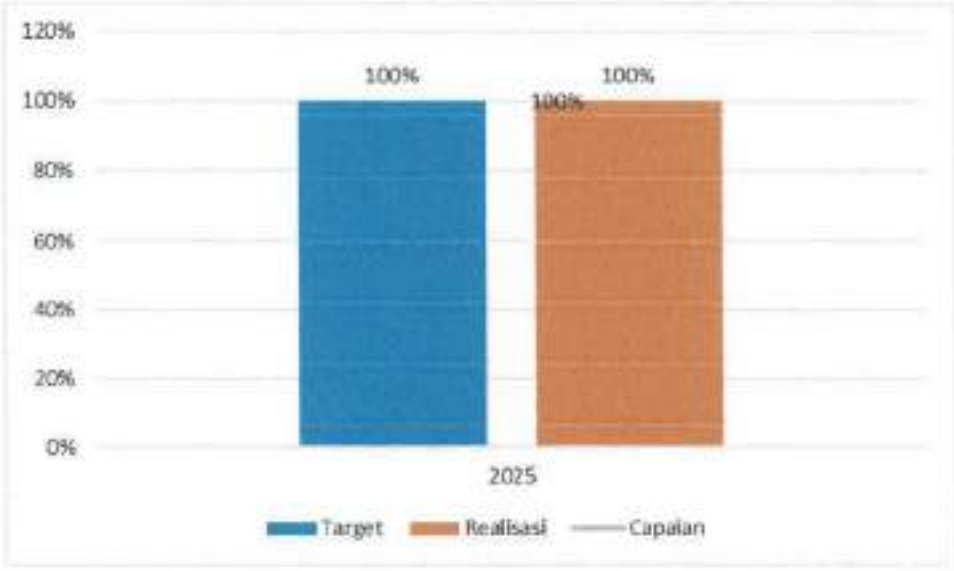
Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata pada tahun 2025 tercatat sebesar 2 kegiatan. Nilai tersebut belum mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 2 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan barang						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 9.1	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.26 Grafik IKK 9.1 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2020-2024 sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	1,00	2,00	2,00	2,00
Capaian	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.27 Perbandingan Realisasi Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Suawesi Selatan untuk memastikan tersedianya Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang berfungsi dalam pengendalian kelebihan muatan kendaraan (Over Dimension Over Loading/ODOL) dan peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Indikator ini mengukur jumlah fasilitas timbangan yang telah dioperasionalkan selama tahun berjalan, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan barang.

Untuk menghitung indikator Jumlah fasilitas penimbangan yang

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan digunakan rumus sebagai berikut:

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 8 Lokasi dari target 8 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.11 Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	8	8	8	8
Realisasi	8,00	8,00	8,00	8,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.28 Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang mengatur penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai sarana pengawasan terhadap kelebihan muatan dan dimensi kendaraan Dalam PM 18 Tahun 2021 ini dijelaskan bahwa penimbangan kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, melindungi infrastruktur jalan dan jembatan dari kerusakan akibat beban berlebih, serta mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan memiliki target 8 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan antara lain:

1. Pemberian edukasi dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar dengan memberikan efek siginifikan dari pelanggaran;
2. Adanya koordinasi yang baik antara pihak penegak hukum dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan;
3. Pelayanan serta etos kerja yang semakin baik khususnya di UPPKB.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor Kegagalan tercapainya indikator Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan antara lain:

1. Ketersediaan SDM yang dapat mendukung pelaksanaan capaian indikator kegiatan;
2. Kondisi sarana dan prasarana fasilitas UPPKB yang kurang

menunjang.

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan Tahun 2025 sebagai berikut:

  Tabel 3.23 Realisasi indikator kinerja jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

Januari-Desember	Jumlah Kendaraan		
	Diperiksa	Melanggar	Tidak Melanggar
UPPKB Palangga	48446	4440	44006
UPPKB Somba Opu	13732	1145	12587
UPPKB Maccopa	18727	2163	16564
UPPKB Tanabatue	29267	2781	26486
UPPKB Datae	34218	2431	31787
UPPKB Sajoangin	20030	2409	17621
UPPKB Larompong	22918	2840	20078
UPPKB Walenrang	13010	816	12194
Total	**200348**	**19025**	**181323**

Sumber: Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan (2025).

- **Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{8\ \text{Lokasi}}{8\ \text{Lokasi}} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung keselamatan

Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp 550.000.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 536.990.648 atau mencapai 97,6%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

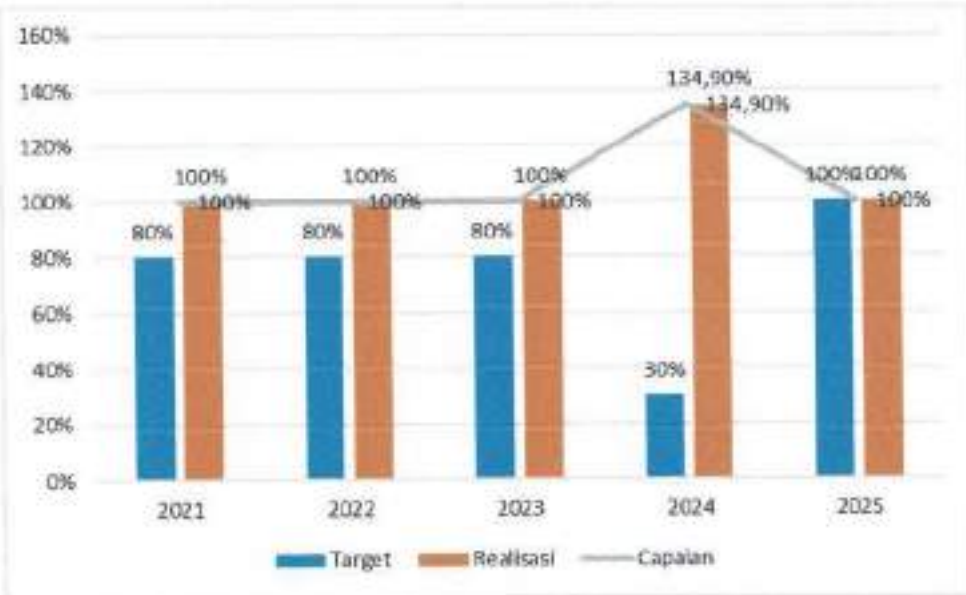
1. Perbaikan implementasi dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum agar proses penindakan dapat berjalan dengan baik;
2. Melakukan monitoring perbaikan-perbaikan fasilitas yang ada di UPPKB;
3. Melakukan sosialisasi kegiatan penegakan hukum bagi pelaku transportasi.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 sebanyak 8 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 8 lokasi, maka capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Untuk Mendukung Keselamatan sebesar 108,7% dengan target 67,5% maka capaian kinerja mencapai 108,7%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 sama dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan Untuk Mendukung Keselamatan

SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan barang						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	2021	IKK 3.2	80	80	100	Naik 37%
2.	2022	IKK 3.2	80	80	100	Tetap
3.	2023	IKK 3.2	80	80	100	Tetap
4.	2024	IKK 3.2	30	19,5	134,9	Naik 34,9%
5.	2025	IKK 9.3	8 Lokasi	8 Lokasi	100	Turun 34,9%

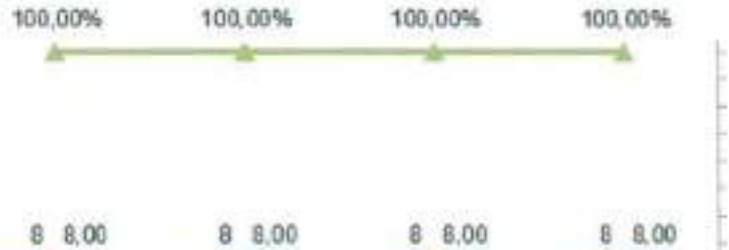


Gambar 3.29 Grafik IKK 9.3 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025

sebanyak 8 lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2020-2024 sebanyak 8 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.30 Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	8	8	8	8
Realisasi	8,00	8,00	8,00	8,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.6 SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety

1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

   a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

   Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam rangka memastikan kesesuaian rancang bangun kendaraan bermotor dengan ketentuan teknis dan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan fisik ini dilakukan sebagai tahapan penting sebelum pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor, untuk memastikan bahwa kendaraan hasil karoseri, rakitan, maupun modifikasi harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, Sesuai dengan spesifikasi teknis rancang bangun yang telah disetujui, dan dapat diajukan untuk memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan fisik mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DJPD/2020, yang mengatur tata cara pemeriksaan meliputi pengukuran dimensi kendaraan, pemeriksaan komponen keselamatan, kekuatan struktur rangka, dan perlengkapan pendukung kendaraan.

Untuk menghitung indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A digunakan rumus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah 12 unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 12 unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.6 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman.



Gambar 3.31 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta harus melalui proses uji tipe sebelum dioperasikan.

Sebagai acuan teknis pelaksanaan di lapangan, kegiatan ini juga berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DJPD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan, yang mengatur tata cara pemeriksaan, parameter pengujian, dan standar hasil pemeriksaan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan

Pedoman memiliki target 12 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman antara lain:

1. Tersedianya pedoman teknis yang jelas, melalui Surat Edaran Dirjen Hubdat Nomor AJ.510/1/6/DJPD/2020, yang menjadi acuan baku dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
2. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa, melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan;
3. Kesadaran dan kepatuhan pelaku industri karoseri yang semakin meningkat, terutama dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebelum uji tipe.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya Indikator Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman antara lain:

1. Keterlambatan permohonan pemeriksaan dari bengkel karoseri atau pemohon uji tipe, sehingga beberapa kegiatan tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan;
2. Masih adanya perbedaan tingkat pemahaman antar pelaku karoseri, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pembinaan, terhadap pentingnya pemeriksaan fisik sesuai pedoman.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan

Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 adalah sebesar 12 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebesar 12 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{12 \text{ Kegiatan}}{12 \text{ Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp68.700.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa, melalui pelatihan teknis dan sertifikasi sesuai pedoman;
2. Pembinaan berkelanjutan kepada bengkel karoseri, agar seluruh pelaku industri memahami pentingnya pemeriksaan fisik sebagai bagian dari keselamatan transportasi jalan;
3. Pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat pelaporan hasil pemeriksaan dan meningkatkan akurasi data.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

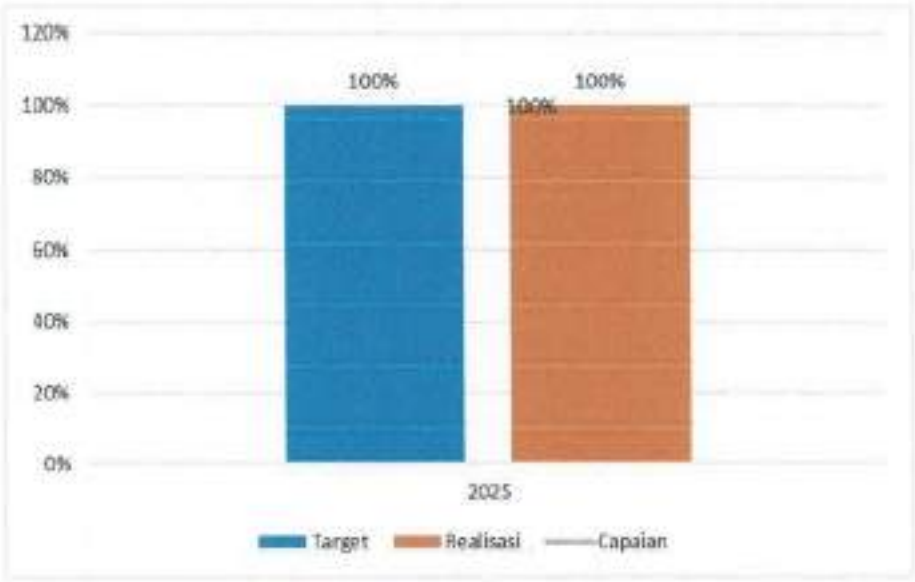
Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman pada tahun 2025 tercatat sebesar 12 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 12 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

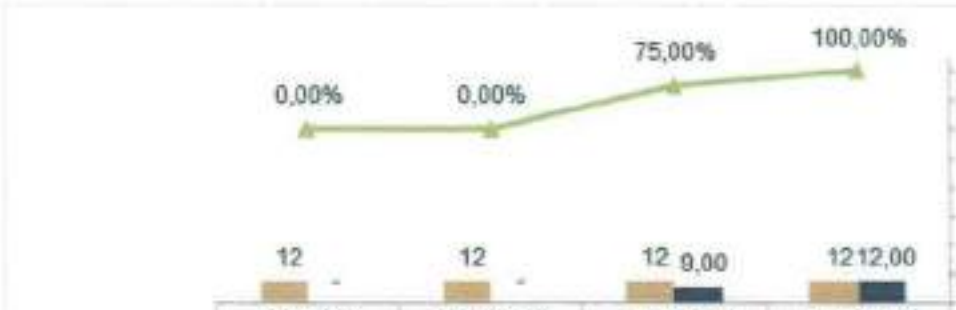
SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 10.1	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.32 Grafik IKK 10.1 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029.

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 sebanyak 12 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 12 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	12	12	12	12
Realisasi	-	-	9,00	12,00
Capaian	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%

Gambar 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. BPTD Kelas II Sulawesi Selatan memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

kendaraan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Triwulan IV tahun 2025 sebesar 10 kegiatan kalibrasi alat uji di Kabupaten/Kota, jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 10 kegiatan, maka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.14 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	10	10	10	10
Realisasi	-	3,00	6,00	10,00
Capaian	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%

Gambar 3.34 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Pelaksanaan kegiatan Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, standar teknis alat uji, serta kewajiban setiap unit pelaksana pengujian untuk menjaga ketertelusuran hasil pengujian melalui kegiatan kalibrasi secara periodik.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah memiliki target 10 kegiatan yang diperoleh total seluruh UPUBKB di Provinsi Sulawesi Selatan di bandingkan dengan seluruh Kab/Kota di Sulawesi Selatan dan dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah antara lain:

1. SDM yang memadai khusunya penguji sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Adanya Uji Mobil Keliling yang menunjang kegiatan pengujian;
3. Koordinasi yang intensif dengan Pemda terkait dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah antara lain:

1. Pelayanan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki sarana dan prasarana pengujian;
2. Membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menggambarkan dalam rangka pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Perbaikan Sistem informasi dan digitalisasi.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 adalah sebesar 10 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebesar 10 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Realisasi Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

No	UPUBKB	Status	No	UPUBKB	Status
1.	BULUKUMBA	✓	13.	PAREPARE	×
2.	MAROS	✓	14.	LUWU UTARA	×
3.	BONE	✓	15.	PALOPO	×
4.	GOWA	✓	16.	LUWU	×

No	UPUBKB	Status	No	UPUBKB	Status
5.	TAKALAR	✓	17.	WAJO	×
6.	TANA TORAJA	✓	18.	SOPPENG	×
7.	PINRANG	✓	19.	PANGKEP	×
8.	JENEPONTO	✓	20.	BANTAENG	Tidak Aktif
9.	MAKASSAR	✓	21.	ENREKANG	Tidak Aktif
10.	LUWU TIMUR	✓	22.	BARRU	Tidak Aktif
11.	SIDRAP	×	23.	TORAJA UTARA	Tidak Aktif
12.	SINJAI	×	24.	KEP. SELAYAR	Tidak Aktif

Sumber: Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025)

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{10\ \text{Kegiatan}}{10\ \text{Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp150.000.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp148.296.000 atau mencapai 98,9%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perbaikan implementasi dengan menyediakan dan mengadakan peralatan alat kalibrasi alat uji kendaraan bermotor dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing peralatan di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan pelayanan kalibrasi alat uji;
2. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan alat kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap 1 tahun sekali guna menjamin keakurasian alat kalibrasi yang dimiliki;
3. Melakukan Diklat lanjutan untuk peningkatan kompetensi.

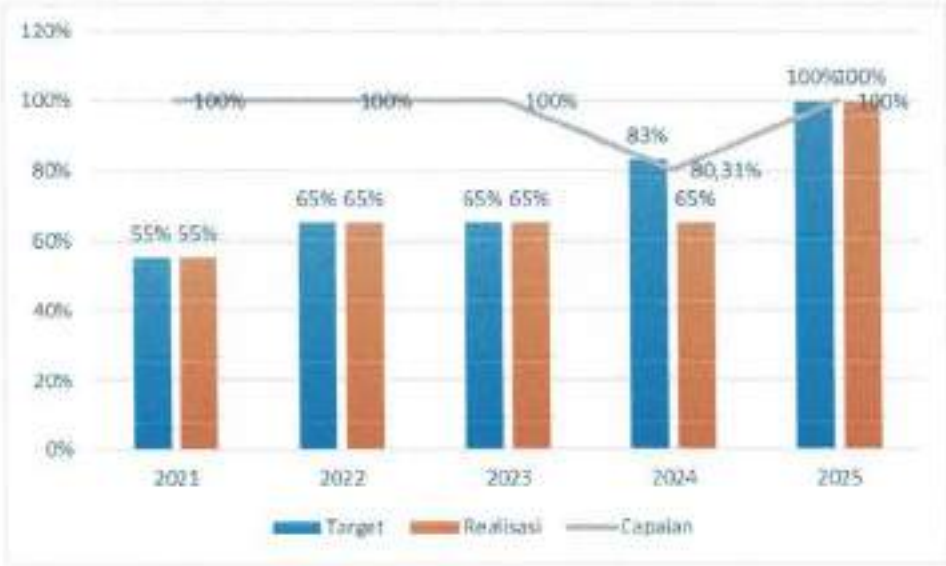
a.5). Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 sebanyak 10 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebanyak 10 kegiatan, maka capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 rata-rata capaian Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah sebesar 95% dengan target 67,5% maka capaian kinerja mencapai 95%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 sama dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 3.5	55%	55%	100	Tetap
2.	2022	IKK 3.5	65%	65%	100	Tetap

3.	2023	IKK 3.5	65%	65%	100	Tetap
4.	2024	IKK 3.5	83%	66,67%	80,31	Turun 19,69%
5.	2025	IKK 10.2	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	Tetap



Gambar 3.35 Grafik IKK 10.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 sebanyak 10 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 10 kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	10	10	10	10
Realisasi	-	3,00	6,00	10,00
Capaian	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%

Gambar 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Terkait Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle adalah sistem integrasi digital yang menghubungkan seluruh proses pengujian kendaraan bermotor mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, kalibrasi alat, hingga penerbitan hasil uji secara online dan transparan.

Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan akurasi hasil pengujian, mencegah manipulasi data, dan memperkuat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di seluruh daerah.

Untuk menghitung Indikator Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Terkait Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Triwulan IV tahun 2025 sebesar 5 kegiatan Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle, jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5 kegiatan, maka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.15 Grafik Capaian IKK Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	1,00	1,00	1,00	5,00
Capaian	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%

Gambar 3.37 Grafik Capaian IKK Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/54/10DJPD/2024 tanggal 14 juni 2024 tentang Pedoman Penerapan Mekanisme BLUe Fullcycle yang Terintegrasi, Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/123/17/DJPD/2025 Kewajiban Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (*fullcycle*) dan PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang menugaskan BPTD sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan sistem pengujian kendaraan di daerah.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle memiliki target 5 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle antara lain:

1. Dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat dari Kementerian Perhubungan terkait digitalisasi sistem pengujian;
2. Peningkatan kompetensi petugas uji dalam pengoperasian sistem Blue Full Cycle;
3. Koordinasi efektif antara BPTD, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dan Dinas Perhubungan Daerah.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah antara lain:

1. Kendala teknis pada alat uji lama yang belum kompatibel dengan sistem digital;
2. Pelayanan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki sarana dan prasarana pengujian.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait

Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 adalah sebesar 5 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebesar 5 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle

No	UPUBKB	Status	No	UPUBKB	Status
1.	BULUKUMBA	✓	13.	LUWU TIMUR	×
2.	MAROS	×	14.	LUWU UTARA	×
3.	BONE	✓	15.	PALOPO	✓
4.	GOWA	✓	16.	LUWU	×
5.	TAKALAR	×	17.	WAJO	×
6.	TANA TORAJA	×	18.	SOPPENG	×
7.	PINRANG	×	19.	PANGKEP	×
8.	JENEPONTO	✓	20.	BANTAENG	Tidak Aktif
9.	SINJAI	×	21.	ENREKANG	Tidak Aktif
10.	PAREPARE	×	22.	BARRU	Tidak Aktif
11.	SIDRAP	×	23.	TORAJA UTARA	Tidak Aktif
12.	MAKASSAR	×	24.	KEP. SELAYAR	Tidak Aktif

Hijau = Terlaksana

Kuning = Pengajuan

Merah = Belum Terlaksana

Abu-Abu = Tidak Aktif

Sumber: Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (2025)

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah

Kegiatan Terkait Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5\ \text{Kegiatan}}{5\ \text{Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Terkait Jumlah Kegiatan Terkait Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp68.700.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memperluas integrasi sistem Blue Full Cycle ke seluruh alat uji kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM teknis melalui pelatihan dan sertifikasi operator sistem;
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, agar implementasi Blue Full Cycle berjalan berkelanjutan dan sesuai standar nasional.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle pada tahun 2025 tercatat sebesar 5 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 5 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

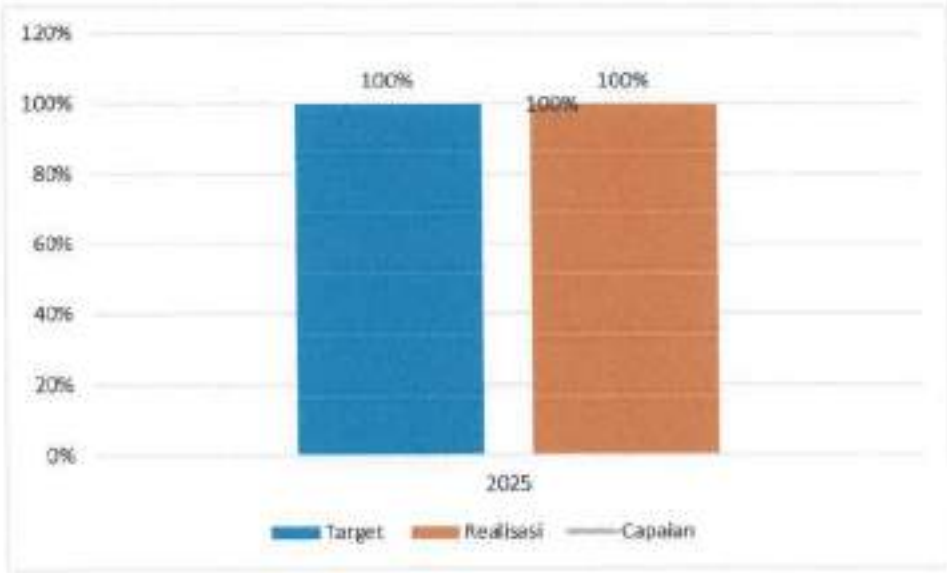
Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun

2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle

SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 10.4	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.38 Grafik IKK 10.4 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 5 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.33 Perbandingan

Realisasi Kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	1,00	1,00	1,00	5,00
Capaian	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%

Gambar 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Alat Pengujian Berkala yang Menerapkan Blue Full Cycle Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.7 SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

1. IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan bersama lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD, TK, atau kelompok bermain) untuk menanamkan nilai-nilai keselamatan berlalu lintas sejak dini. Kegiatan ini meliputi, edukasi dasar tentang rambu lalu lintas, perilaku aman di jalan, dan penggunaan transportasi umum, simulasi keselamatan, serta

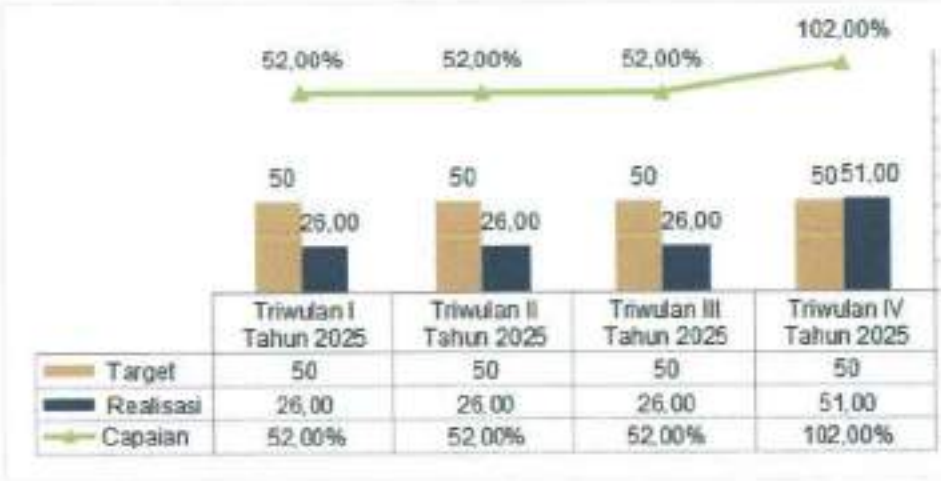
Pendampingan bagi guru dalam menerapkan materi LLAJ di kegiatan belajar mengajar.

Untuk menghitung indikator Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 51 orang jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 50 orang maka capaian kinerja mencapai 102%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.16 Grafik Capaian Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	50	50	50	50
Realisasi	26,00	26,00	26,00	51,00
Capaian	52,00%	52,00%	52,00%	102,00%

Gambar 3.40 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir B "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda memiliki target 50 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda antara lain:

  1. Antusiasme guru dan siswa PAUD/TK dalam mengikuti kegiatan pembelajaran keselamatan;
  2. Metode pengajaran yang menarik dan interaktif, seperti permainan, simulasi, dan media visual;
  3. Pendampingan langsung oleh petugas sosialisasi BPTD yang berpengalaman dalam bidang keselamatan LLAJ.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

  Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau

Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda antara lain:

1. Keterbatasan anggaran operasional untuk menjangkau lebih banyak lokasi kegiatan;
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan di sekolah-sekolah mitra, karena kegiatan pengajaran keselamatan harus menyesuaikan dengan jadwal akademik dan agenda internal lembaga pendidikan anak usia dini.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 adalah sebanyak 51 orang dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 50 orng dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda

No.	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Masyarakat Tersosialisasi (orang)
1.	TITK Rafasya Baitul Makmur	26
2.	TK PAUD Al Maa"rif	25
Total		51

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{51\ \text{Orang}}{50\ \text{Orang}} \times 100\% = 102\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp107.142.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta lembaga PAUD dan TK, agar pelaksanaan kegiatan dapat dijadwalkan secara lebih terencana;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi guru serta pendidik anak usia dini, supaya mereka mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran keselamatan LLAJ secara mandiri di sekolah masing-masing;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi, melalui kegiatan daring dan media sosial.

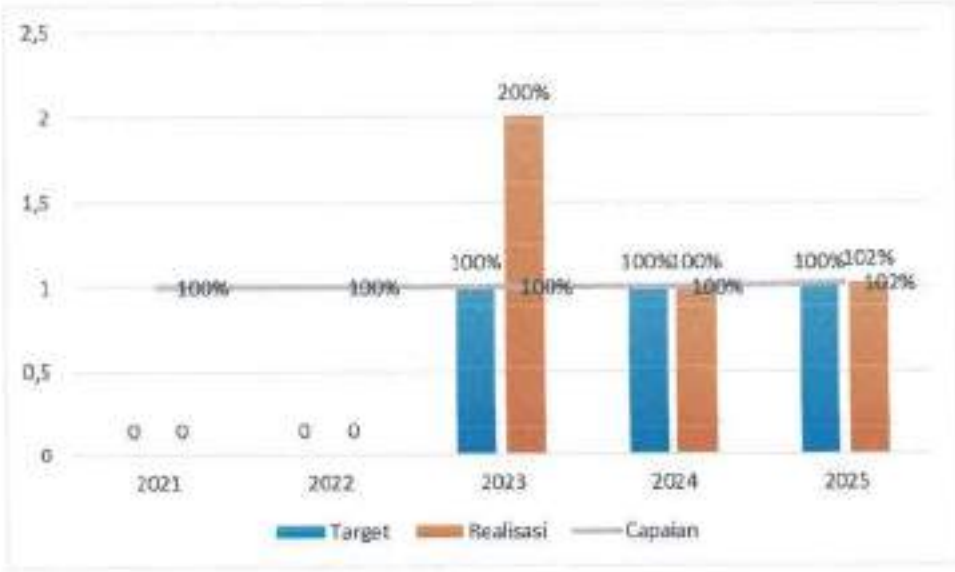
a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda sebesar 51 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebesar 50 orang, maka capaian kinerja Tahun 2024 menapai 102% sedangkan pada tahun 2021, 2022,

2023, dan 2024 rata-rata capaian kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda sebesar 1000 orang dengan target 750 orang maka capaian kinerja mencapai 133%. Jadi realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025. Untuk rincian capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda

SK12 Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2021	IKK 3.5	0	0	100	Tetap
2.	2022	IKK 3.5	0	0	100	Tetap
3.	2023	IKK 3.5	500 orang	1000 orang	200	Naik 100%
4.	2024	IKK 3.5	1000 orang	1000 orang	100	Tetap
5.	2025	IKK 12.2	50 orang	51 orang	102	Naik 2%



Gambar 3.41 Grafik IKK 12.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 sebesar 51 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 50 orang maka capaian kinerja mencapai 102%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.41 Perbandingan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	50	50	50	50
Realisasi	26,00	26,00	26,00	51,00
Capaian	52,00%	52,00%	52,00%	102,00%

Gambar 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.2.8 SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perhubungan

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan serangkaian aktivitas dalam proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan transportasi darat yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayah kerjanya.

Indikator ini mengukur jumlah kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan sektor transportasi darat seperti, Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Alokasi, Pagu Anggaran dan Pagu Kebutuhan.

Untuk menghitung indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebesar 3 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.17 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	3	3	3	3
Realisasi	3,00	3,00	3,00	3,00
Capaian	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

Gambar 3.43 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 06 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: PR.201/5/21/STJ/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Penyusunan Pagu Anggaran TA. 2026 Per Unit Eselon I Kementerian Perhubungan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat memiliki target 3 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kedisiplinan dalam mengikuti tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. Kompetensi pegawai perencanaan dan teknis yang semakin meningkat melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Perubahan kebijakan pagu dari pusat, yang mengharuskan penyesuaian cepat terhadap dokumen yang telah disusun;
2. Perubahan sistem dan format penyusunan dokumen perencanaan yang ditetapkan secara nasional.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 adalah sebanyak 3 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 3 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3\ \text{Kegiatan}}{3\ \text{Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp890.775.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mendorong percepatan penyusunan dokumen melalui pemanfaatan sistem digital perencanaan dan penganggaran;
2. Menyusun dan memperbarui standar operasional prosedur (SOP) penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk menjamin konsistensi, kualitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang perencanaan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta pendampingan.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2025 tercatat sebesar 3 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 3 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan

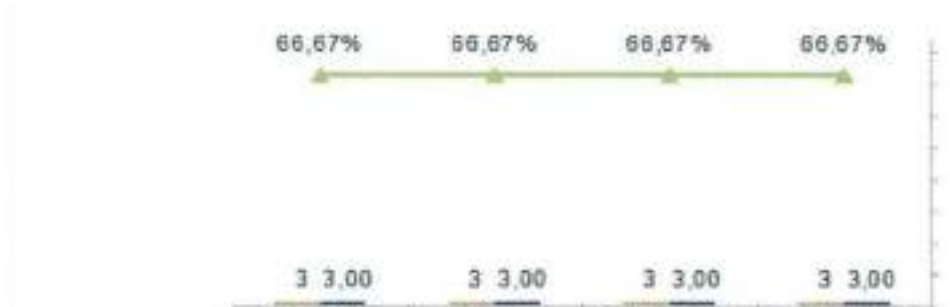
1.	2025	IKK 4.1	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.44 Grafik IKK 4.1 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 3 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.44 Perbandingan kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	3	3	3	3
Realisasi	3,00	3,00	3,00	3,00
Capaian	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

Gambar 3.45 Perbandingan Realisasi kinerja Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

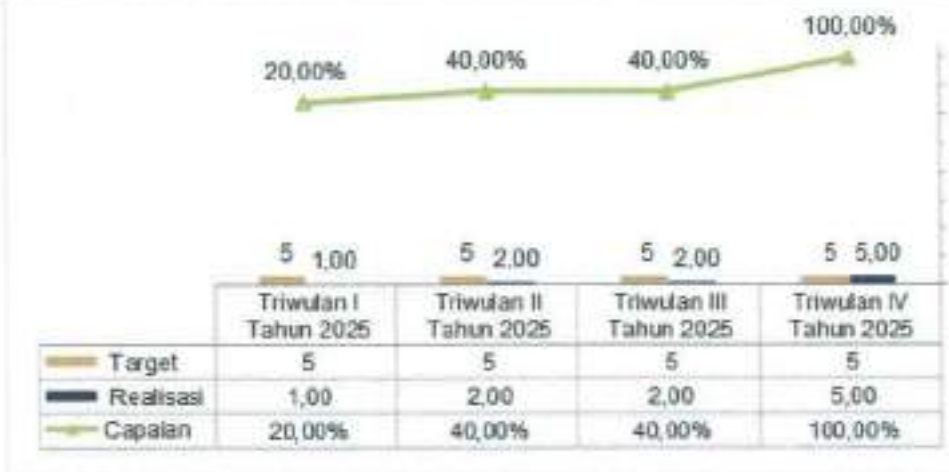
Pelaksanaan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan. untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Indikator ini mengukur jumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat seperti, Penyusunan dan pelaporan Perjanjian Kinerja (PK), Monitoring Rencana Aksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK).

Untuk menghitung indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 5 dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.18 Grafik Capaian IKK Terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	1,00	2,00	2,00	5,00
Capaian	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%

Gambar 3.46 Grafik Capaian IKK Terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR.102/2/14/DJPD/2024 perihal Sosiaslisasi dan Pengumpulan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat memiliki target 5 dokumen yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Pemanfaatan sistem digital pelaporan kinerja (E-SAKIP dan E-Performance) yang meningkatkan efisiensi dan keterpaduan data;
2. Peningkatan pemahaman pegawai perencanaan dan pelaporan kinerja melalui pelatihan dan bimbingan teknis SAKIP.;
3. Kolaboratif antara bidang perencanaan, pelaporan, dan teknis dalam memastikan keterpaduan laporan monitoring kinerja.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan tercapainya indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Keterbatasan waktu dalam melakukan konsolidasi data kinerja terutama menjelang periode pelaporan triwulan dan akhir tahun;
2. Perbedaan pemahaman antar unit terhadap indikator kinerja, yang terkadang menimbulkan interpretasi berbeda dalam pelaporan.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 adalah sebesar 5

dokumen dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebesar 5 dokumen.

- **Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5\ \text{Dokumen}}{5\ \text{Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) SAKIP;
2. Memperkuat koordinasi antara bidang teknis, keuangan, dan perencanaan, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi kegiatan, output, dan capaian indikator;
3. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

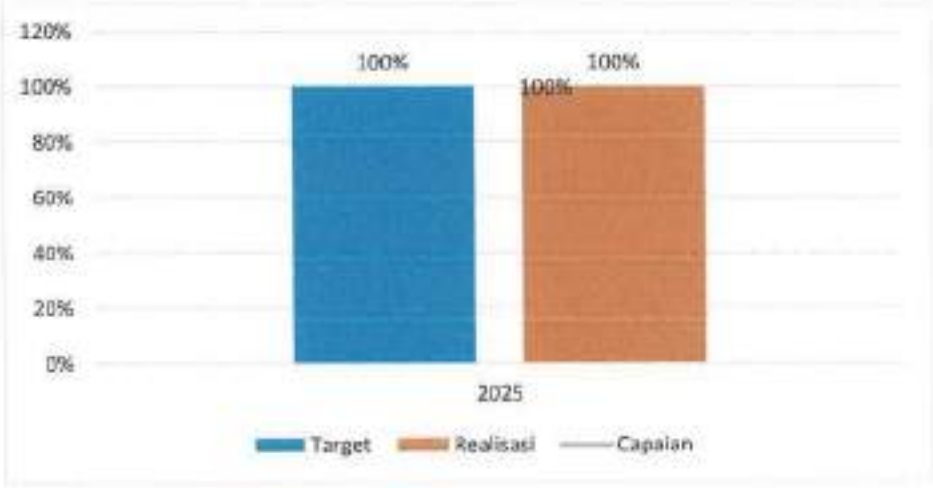
Realisasi kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2025 tercatat sebesar 5 dokumen. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 5 dokumen, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.2	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	-



Gambar 3. 47 Grafik IKK 4.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebanyak 5 dokumen jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebanyak 5 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.41 Perbandingan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	1,00	2,00	2,00	5,00
Capaian	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%

Gambar 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator ini mengukur jumlah kegiatan pembinaan, penguatan, dan implementasi SPIP yang dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap peningkatan tingkat maturitas SPIP Kementerian Perhubungan seperti pembinaan dan sosialisasi manajemen risiko serta pengendalian intern dan pelaporan tindak lanjut hasil reviu atau audit pengendalian intern.

Untuk menghitung indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.19 Grafik Capaian IKK Terkait Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	2,00	2,00	2,00	2,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.49 Grafik Capaian IKK Terkait Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

  Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern di seluruh unit kerja.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan memiliki target 2 kegiatan yang

diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan antara lain:

  1. Dukungan penuh dari pimpinan dan pegawai BPTD dalam menerapkan pengendalian intern dan manajemen risiko di setiap kegiatan;
  2. Peningkatan pemahaman pegawai tentang konsep risiko dan pengendalian intern;
  3. Ketersediaan pedoman dan alat ukur yang jelas sehingga pelaksanaan evaluasi berjalan sistematis.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

  Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan antara lain:

  1. Belum meratanya pemahaman teknis mengenai Manajemen Risiko (MR);
  2. Masih terdapat beberapa proses kerja yang belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk prosedur formal (SOP);
  3. Perubahan format pelaporan maturitas SPIP dari BPKP yang menuntut penyesuaian cepat terhadap sistem dan kriteria penilaian terbaru.

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 adalah sebanyak 2 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2\ \text{Kegiatan}}{2\ \text{Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp282.100.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp1.390.000 atau mencapai 0,5%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memperkuat kapasitas SDM di bidang Manajemen Risiko (MR) dan SPIP, melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap efektivitas pengendalian intern dan tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Jenderal.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 tercatat sebesar 2 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

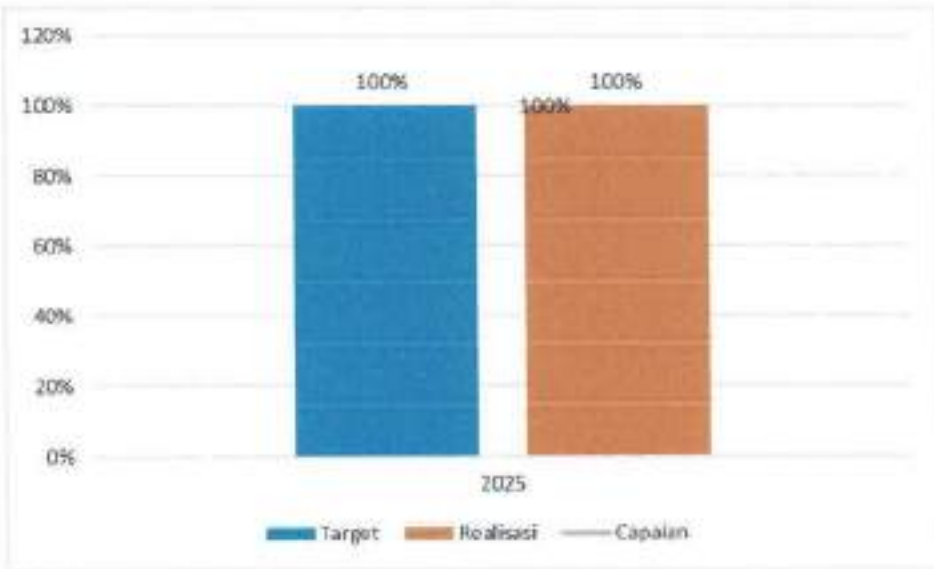
Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena

itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.3	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-

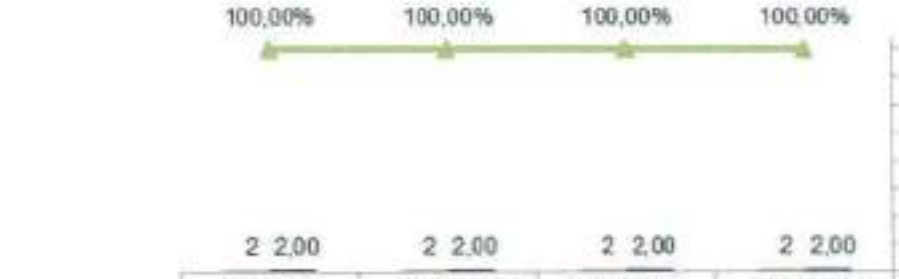


Gambar 3.50 Grafik IKK 4.3 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Realisasi kinerja Operasional Layanan Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 2 kegiatan maka

capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Realisasi kinerja Operasional Layanan terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	2,00	2,00	2,00	2,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Realisasi kinerja Operasional Layanan Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

4. IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (ITJEN Kemenhub). Indikator ini mengukur jumlah rekomendasi hasil audit atau pemeriksaan yang

telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Untuk menghitung indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.20 Grafik Capaian IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	1	1	1	1
Realisasi	1,00	1,00	1,00	1,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.52 Grafik Capaian IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) berlandaskan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di

Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan memiliki target 1 dokumen yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan antara lain:

1. Peningkatan pemahaman pegawai tentang sistem pengawasan internal yang mempermudah pelaporan;
2. Kedisiplinan dalam pelaporan progres tindak lanjut melalui sistem daring dan rapat evaluasi rutin triwulanan.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan antara lain:

1. Pergantian personel atau pejabat pelaksana di unit kerja, yang kadang menunda proses verifikasi penyelesaian karena perlu penyesuaian data dan tanggung jawab;
2. Keterbatasan dokumentasi atau bukti pendukung pada beberapa temuan lama, yang memerlukan proses klarifikasi tambahan.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 adalah sebanyak 1 dokumen dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 1 dokumen.

- **Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp147.400.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memperkuat dokumentasi bukti tindak lanjut, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, untuk mempermudah proses verifikasi oleh auditor;
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi;
3. Menetapkan prioritas penyelesaian tindak lanjut, dengan fokus pada rekomendasi yang berdampak layanan publik.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1 dokumen. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 1 dokumen, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

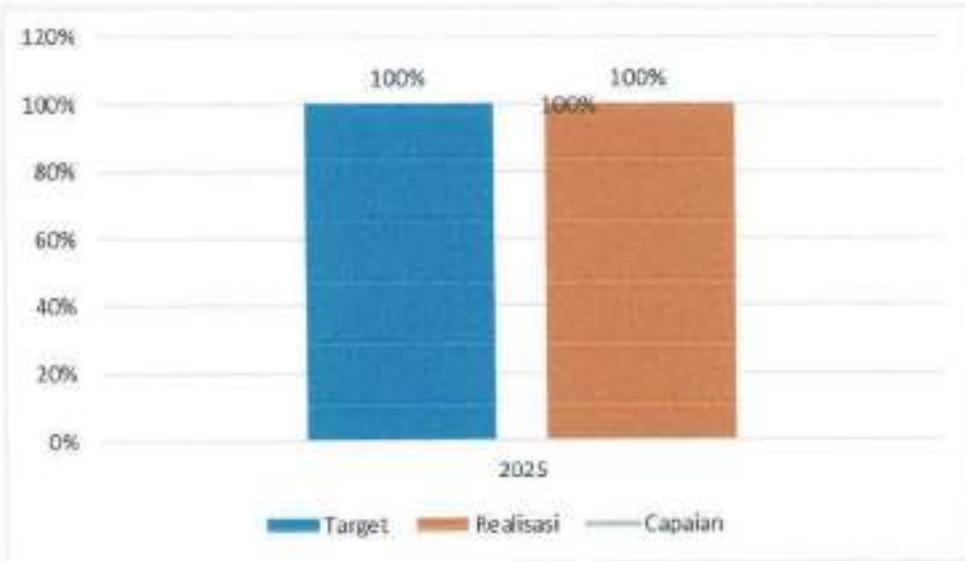
Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang

sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.5	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-



Gambar 3.53 Grafik IKK 4.5 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebanyak 1 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini

digambarkan pada Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	1	1	1	1
Realisasi	1,00	1,00	1,00	1,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

5. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan upaya yang dilakukan dalam memastikan bahwa seluruh barang milik negara (BMN) yang dikuasai dan digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi darat dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator ini mengukur sejauh mana BPTD melaksanakan kegiatan pengelolaan aset sesuai ketentuan yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset, pengadaan dan pemanfaatan BMN, pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset, pemeliharaan serta pengamanan aset, dan penghapusan atau pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan siklus manajemen aset

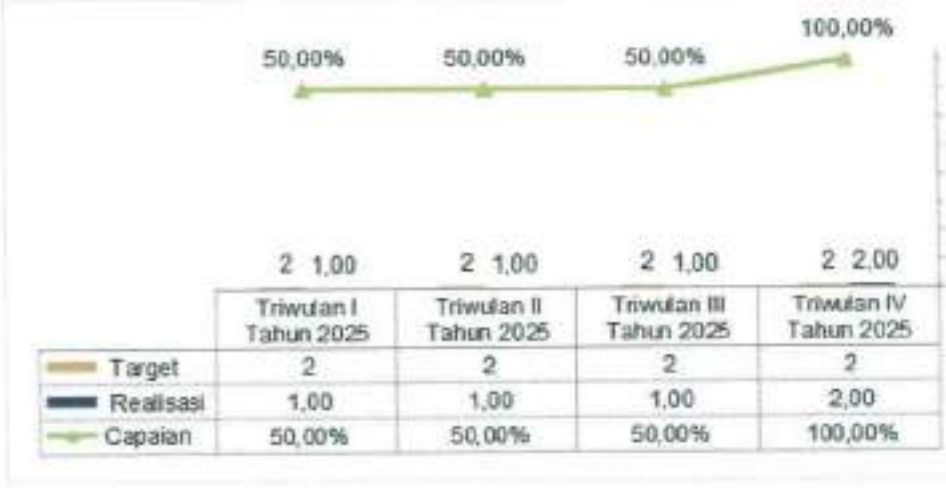
pemerintah.

Untuk menghitung indikator Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 2 dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.21 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	1,00	1,00	1,00	2,00
Capaian	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%

Gambar 3.55 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit eselon III yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022

tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat memiliki target 2 dokumen yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital yang mempercepat pelaporan dan mengurangi potensi kesalahan data;
2. Kegiatan pembinaan teknis dan monitoring rutin, sehingga pengelolaan aset lebih tertib dan terdokumentasi;
3. Peningkatan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga dan menggunakan aset negara secara bertanggung jawab.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kendala teknis pada kondisi fisik aset lapangan, seperti peralatan yang rusak atau tidak berfungsi optimal, sehingga membutuhkan proses perbaikan panjang sebelum dapat dilaporkan;

2. Beberapa aset masih dalam proses penetapan status penggunaan atau penghapusan, sehingga belum dapat dicatat secara final;
3. Kurangnya jumlah SDM pengelola aset di beberapa satuan kerja.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 adalah sebanyak 2 dokumen dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 dokumen.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2\ \text{Dokumen}}{2\ \text{Dokumen}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp1.858.775.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp1.667.810.077 atau mencapai 89,7%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas SDM pengelola aset;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset secara berkala, untuk mengantisipasi potensi kehilangan, kerusakan, atau ketidaksesuaian data;
3. Mendorong tertib administrasi dan budaya pelaporan yang disiplin, agar setiap perubahan status aset segera tercatat dan dilaporkan dengan benar.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

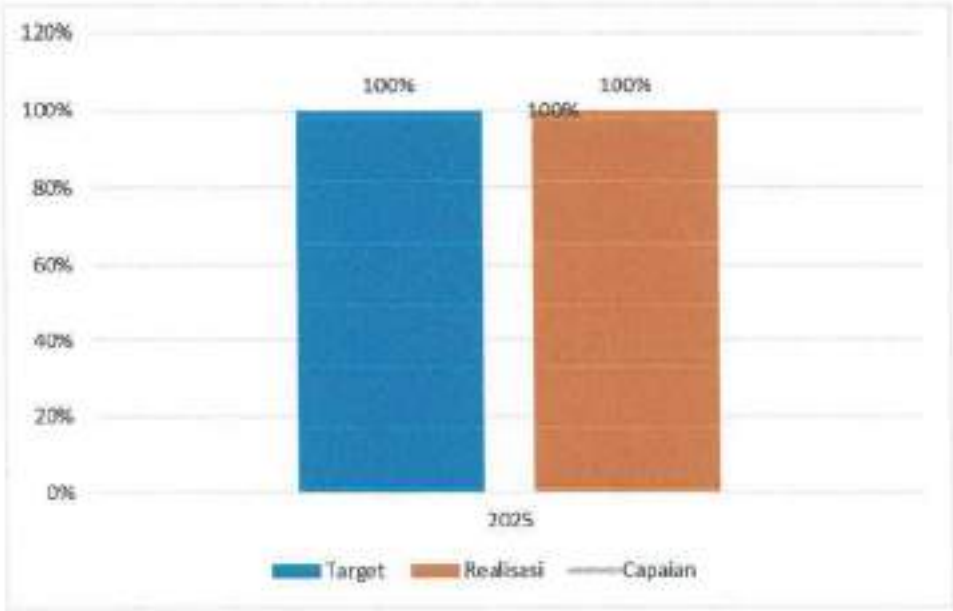
Realisasi kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2025 tercatat sebanyak 10 dokumen. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebanya 10 dokumen, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.6	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-



Gambar 3.56 Grafik IKK 4.6 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebanyak 2 dokumen, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebanyak 2 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	2	2	2	2
Realisasi	1,00	1,00	1,00	2,00
Capaian	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%

Gambar 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

6. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Arsip merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung tata kelola administrasi dan kearsipan yang modern, efektif, dan akuntabel. Digitalisasi arsip bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dokumen yang efisien melalui penerapan teknologi informasi, dengan cara mengonversi arsip fisik menjadi arsip elektronik yang tersimpan secara aman dan mudah diakses.

Dalam implementasinya, BPTD telah menggunakan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), yaitu aplikasi umum bidang kearsipan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 sebagai platform nasional untuk persuratan dan pengelolaan arsip elektronik.

Untuk menghitung indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip digunakan

rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 12 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 12 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.22 Grafik Capaian IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	12	12	12	12
Realisasi	3,00	6,00	9,00	12,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.58 Grafik Capaian IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) berlandaskan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang menegaskan pentingnya pengendalian risiko terhadap kehilangan atau kerusakan dokumen melalui penerapan sistem kearsipan digital dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 yang

menetapkan SRIKANDI sebagai aplikasi umum nasional bidang kearsipan dinamis. Dengan dasar hukum tersebut, pelaksanaan digitalisasi arsip melalui aplikasi SRIKANDI menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan dan penguatan tata kelola kearsipan yang transparan, aman, serta akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip memiliki target 12 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip antara lain:

1. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti jaringan internet, perangkat komputer;
2. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap pentingnya tata kelola dokumen elektronik dan keamanan arsip digital;
3. Dukungan penuh dari pimpinan terhadap implementasi SRIKANDI sebagai sistem arsip resmi instansi.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip antara lain:

1. Masih terdapat pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi SRIKANDI, sehingga memerlukan pelatihan lanjutan;
2. Keterbatasan kapasitas server dan jaringan internet yang menghambat proses unggah arsip berukuran besar.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 12 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{12 \text{ Kegiatan}}{12 \text{ Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran terkait Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun 2025 yaitu memiliki target senilai Rp134.000.000 (target pada rencana aksi) dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp0 atau mencapai 0%.

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melanjutkan pelatihan teknis dan pendampingan bagi pegawai agar mahir menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dan persuratan;
2. Mendorong budaya kerja berbasis digital (*paperless office*) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan SRIKANDI dan kepatuhan pengarsipan elektronik.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip pada tahun 2025 tercatat sebanyak 12 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebanyak 12 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun

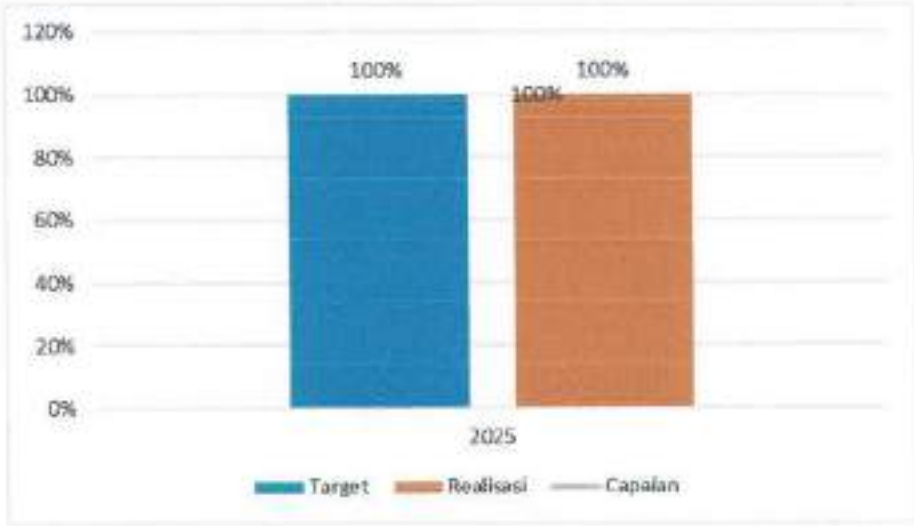
2025 mencapai 100%.

Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Kegiatan Digitalisasi Arsip belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.8	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	-

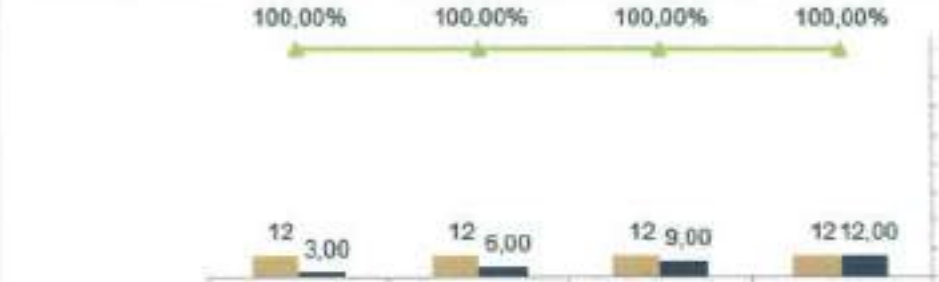


Gambar 3.59 Grafik IKK 4.8 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun 2025 sebanyak 12

kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 12 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	12	12	12	12
Realisasi	3,00	6,00	9,00	12,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

7. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bentuk upaya dalam memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dilaksanakan secara transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini mengukur pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana umum pengadaan, pelaksanaan pemilihan

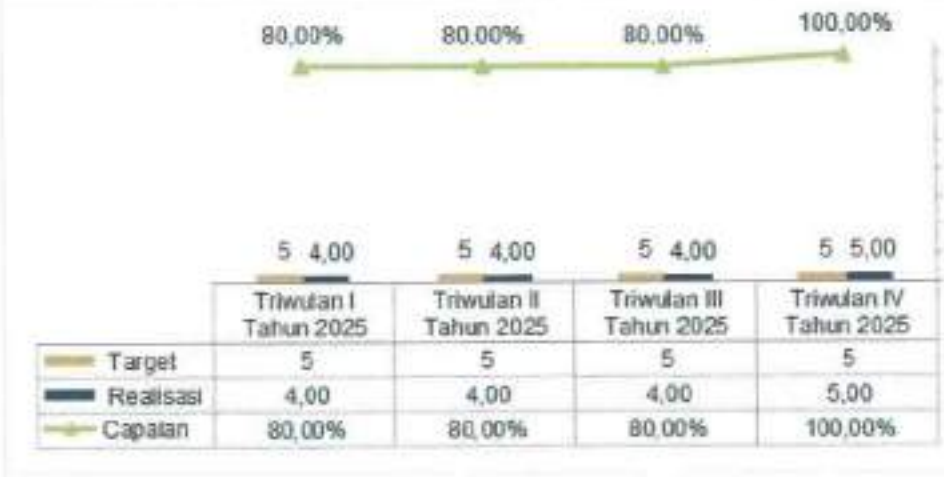
penyedia, pengendalian kontrak, serta monitoring dan evaluasi hasil pengadaan.

Untuk menghitung indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.23 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	4,00	4,00	4,00	5,00
Capaian	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%

Gambar 3.61 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum ini, kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi bagian integral dari fungsi tata kelola organisasi yang efisien, transparan, dan akuntabel di bawah koordinasi Ditjen Perhubungan Darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 5 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Ketersediaan sistem pengadaan elektronik yang memudahkan proses pengadaan dan pelaporan;
3. Koordinasi yang baik antarbagian dalam penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan.

- **Faktor Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Keterbatasan jumlah SDM bersertifikat pengadaan;
2. Kendala teknis dalam sistem elektronik, seperti gangguan jaringan.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang

dan Jasa Tahun 2025 adalah sebanyak 5 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 5 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5 \text{ Kegiatan}}{5 \text{ Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem e-Katalog, untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi kesalahan administrasi;
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pengadaan, untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di setiap periode kerja.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

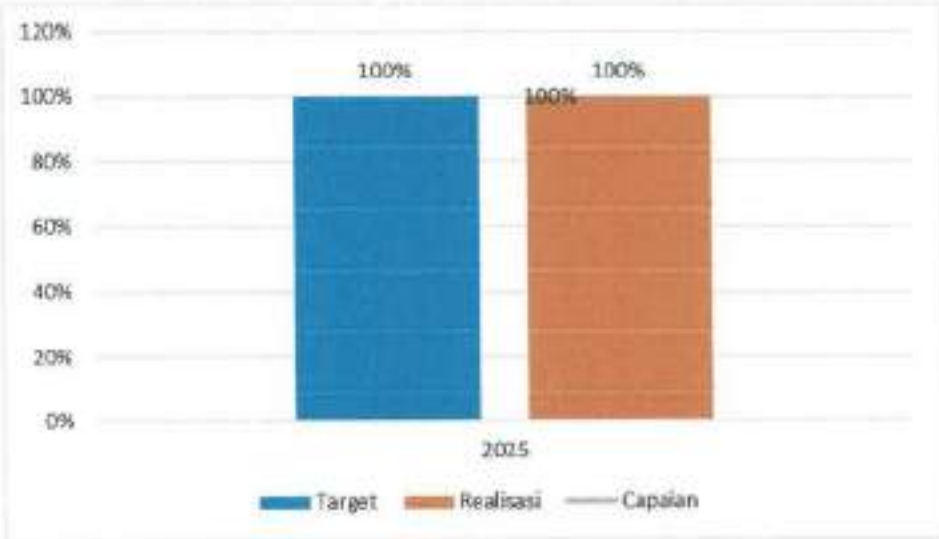
Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat

menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.9	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.62 Grafik IKK 4.9 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 5 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terhadap target

kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	5	5	5	5
Realisasi	4,00	4,00	4,00	5,00
Capaian	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%

Gambar 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

8. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja merupakan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembayaran hak-hak pegawai, termasuk gaji, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, serta kewajiban kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025, perubahan kedua atas PM 6 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa salah satu fungsi BPTD adalah melakukan pengelolaan administrasi, keuangan, dan kepegawaian, termasuk pembayaran hak-hak pegawai secara tertib dan tepat waktu.

Untuk menghitung indikator Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 14 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 14 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.24 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	14	14	14	14
Realisasi	3,00	8,00	11,00	14,00
Capaian	20,00%	60,00%	80,00%	100,00%

Gambar 3.64 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja di lingkungan BPTD Kelas II Sulawesi Selatan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025, perubahan kedua atas PM 6 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi BPTD adalah melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, dan pengembangan kompetensi

sumber daya manusia.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

  Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja memiliki target 12 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

  Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja antara lain:

  1. Kepatuhan terhadap jadwal pembayaran gaji dan tunjangan;
  2. Ketelitian petugas administrasi dalam memutakhirkan data kepegawaian agar tidak terjadi kesalahan pembayaran;
  3. Konsistensi pengawasan internal untuk memastikan akurasi data dan ketertiban administrasi kepegawaian.

- **Faktor-Faktor Kegagalan**

  Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja antara lain:

  1. Perubahan data pegawai mendadak seperti mutasi, cuti, atau penyesuaian jabatan yang membutuhkan pembaruan cepat dalam sistem;
  2. Kendala teknis pada sistem aplikasi keuangan elektronik;
  3. Keterbatasan SDM administratif, khususnya dalam proses validasi data dan pelaporan gaji berkala.

- **Realisasi Kinerja**

  Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 adalah sebanyak 9 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 12 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{14 \text{ Kegiatan}}{14 \text{ Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas petugas administrasi kepegawaian melalui pelatihan dasar pengelolaan keuangan dan data pegawai;
2. Meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi pelaporan;

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja pada tahun 2025 tercatat sebanyak 14 kegiatan. Nilai tersebut belum mencapai target kinerja tahun 2025 sebanyak 14 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

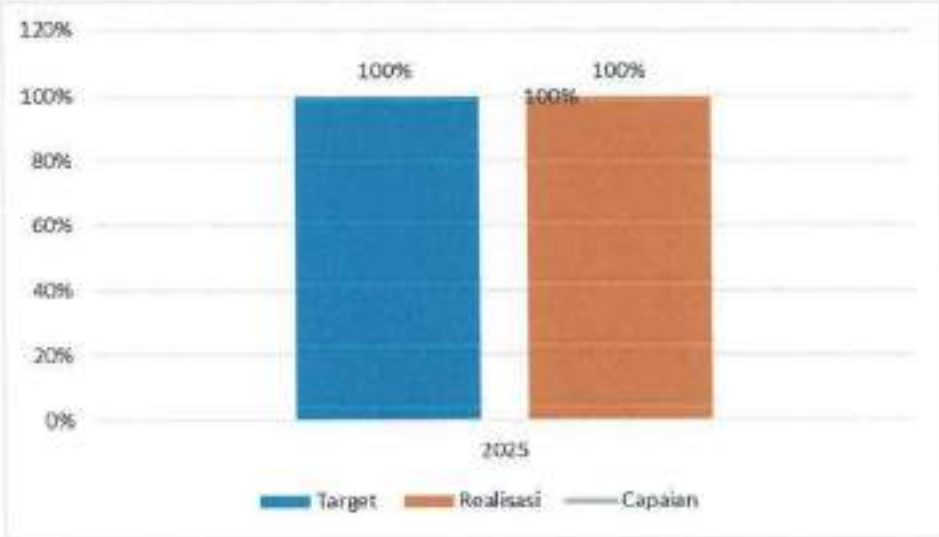
Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

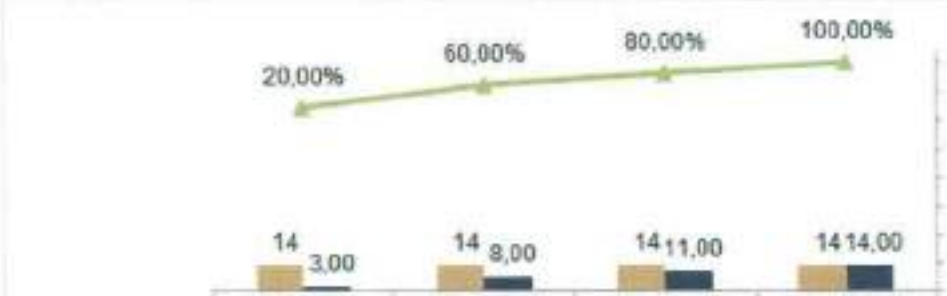
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.10	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.65 Grafik IKK 10.4 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 sebanyak 14 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 14 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.65 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	14	14	14	14
Realisasi	3,00	8,00	11,00	14,00
Capaian	20,00%	60,00%	80,00%	100,00%

Gambar 3.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

9. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

a.1). Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan bentuk komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam upaya mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Indikator ini mengukur pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.

Untuk menghitung indikator Kegiatan mendukung Pembangunan ZI digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 2.25 Grafik Capaian IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	1	1	1	1
Realisasi	1,00	1,00	1,00	1,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.67 Grafik Capaian IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Pelaksanaan Kegiatan mendukung Pembangunan ZI berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Negara.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI memiliki target 1 kegiatan yang diperoleh dari

capaian terhadap Perjanjian Kinerja di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan mendukung Pembangunan ZI antara lain:

1. Komitmen kuat pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung implementasi nilai-nilai integritas dan pelayanan publik.
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan internalisasi ZI, seperti apel integritas, sosialisasi, dan penandatanganan pakta integritas;
3. Keterbukaan informasi publik, yang memperkuat kepercayaan masyarakat.

- **Faktor-Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Kegiatan mendukung Pembangunan ZI antara lain:

1. Kendala teknis pengumpulan dan pengunggahan eviden;
2. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan internalisasi nilai-nilai integritas;
3. Belum meratanya budaya kerja berorientasi pelayanan publik.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Tahun 2025 adalah sebanyak 1 kegiatan dari target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yaitu sebanyak 1 kegiatan.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \text{ x } 100\% = 100\%$$

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas eviden ZI dengan pendampingan teknis secara periodik;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan media digital dalam sosialisasi, edukasi, dan pelaporan kegiatan ZI;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja.

a.5). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Realisasi kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1 kegiatan. Nilai tersebut mencapai target kinerja tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%.

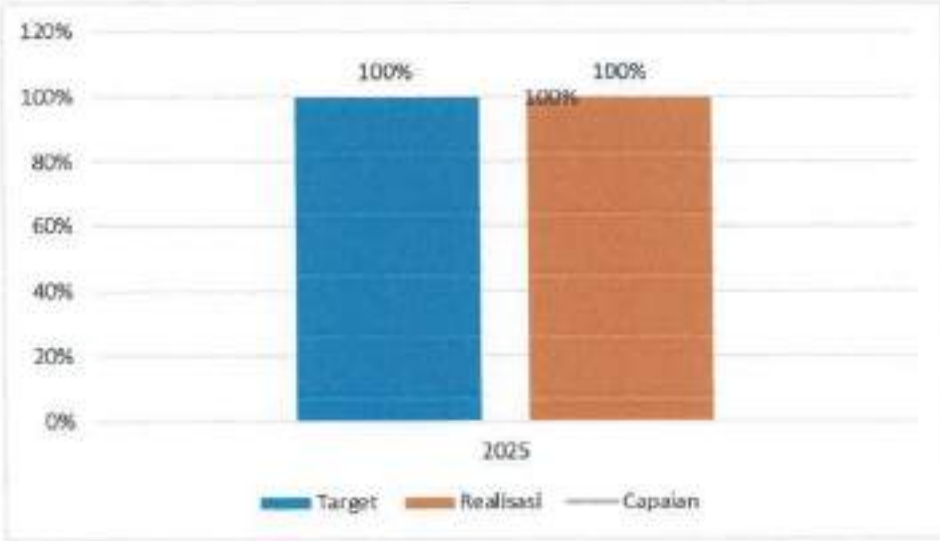
Pada periode tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Kegiatan mendukung Pembangunan ZI belum dilaksanakan dengan indikator dan pengukuran kinerja yang sama sebagaimana ada pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun tersebut belum dapat menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2025.

Untuk rincian capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	2025	IKK 4.11	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-



Gambar 3.68 Grafik IKK 4.11 Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025

a.6). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025 – 2029

Realisasi kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan 2025-2029 sebesar 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.68 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.



	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
Target	1	1	1	1
Realisasi	1,00	1,00	1,00	1,00
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

a.7). Benchmark Nasional/Internasional

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp173.546.289.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.41 Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	126.813.374.000,-	73,07%
PNBP	Rp.	46.732.915.000,-	26,93%
SBSN	Rp.	0,-	0%
Total	Rp.	173.546.289.000	100%

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

Tabel 3.42 Rincian Per Sumber Dana Revisi ke-22 Pagu Anggaran Tahun 2025

RM	Rp.	135.344.084.000,-	74,27%
PNBP	Rp.	46.882.915.000,-	25,73%

SBSN	Rp.	0,-	0%
Total	Rp.	182.226.999.000	100%

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel 3.43 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	30.441.524,-	17,54%
Belanja Barang	Rp.	116.771.809,-	67,28%
Belanja Modal	Rp.	26.332.956,-	15,17%
Total	Rp.	173.546.289.000	100%

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan TA. 2025 akibat adanya Revisi DIPA di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2025, sehingga Total Pagu Akhir Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Pagu Revisi 23 DIPA TA. 2025 sebesar Rp182.226.999.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.44 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Anggaran Revisi 22 Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	35.435.330.000,-	19,45%
Belanja Barang	Rp.	118.958.050.000,-	65,28%
Belanja Modal	Rp.	27.833.619.000,-	15,27%
Total	Rp.	182.226.999.000	100%

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Penambahan dan pergeseran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 02 Desember 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA awal);
2) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 21 Januari 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 1);
3) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 2);
4) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 3);
5) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 April 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 4);
6) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 01 Juli 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 5);
7) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 6);
8) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 7);

9) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 8);

10) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 9);

11) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 10);

12) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 11);

13) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 September 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 12);

14) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 September 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 13);

15) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 06 Oktober 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 14);

16) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 15);

17) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 16);

18) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 04 November 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 17);

19) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 05 November 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 18);

20) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 November 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 19);

21) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 21 November 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 20);

22) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 01 Desember 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 21);

23) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 22).

24) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2025 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403860/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 (DIPA Revisi 23).

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan yang dilakukan penyesuaian anggaran sampai dengan Triwulan IV sebanyak 22 (dua puluh dua) kali revisi DIPA, maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana:

Rincian Revisi Per Sumber Dana TA 2025

Tabel 3.45 Rincian Revisi Per Sumber Dana TA 2025

Pagu	Sumber Dana Rp. (1000)			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	Rp. (1000)
Pagu Awal	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi I	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi II	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi III	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi IV	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi V	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi VI	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi VII	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi VIII	126.813.374	46.732.915	0	173.546.289
Revisi IX	131.455.929	46.732.915	0	178.188.844
Revisi X	131.455.929	46.732.915	0	178.188.844
Revisi XI	131.455.929	46.732.915	0	178.188.844
Revisi XII	132.588.882	46.882.915	0	179.471.797
Revisi XIII	132.588.882	46.882.915	0	179.471.797
Revisi XIV	132.588.882	46.882.915	0	179.471.797
Revisi XV	135.599.922	46.882.915	0	182.482.837
Revisi XVI	135.599.922	46.882.915	0	182.482.837

Pagu	Sumber Dana Rp. (1000)			Jumlah Rp. (1000)
	RM	PNBP	SBSN	
Revisi XVII	135.599.922	46.882.915	0	182.482.837
Revisi XVIII	135.599.922	46.882.915	0	182.482.837
Revisi XIX	135.599.922	46.882.915	0	182.482.837
Revisi XX	135.344.084	46.882.915	0	182.226.999
Revisi XXI	135.344.084	46.882.915	0	182.226.999
Revisi XXII	135.344.084	46.882.915	0	182.226.999
Revisi XXIII	135.344.084	46.882.915	0	182.226.999

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun rincian revisi per jenis belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu	Jenis Belanja Rp. (1000)			Jumlah Rp. (1000)
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu Awal	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi I	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi II	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi III	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi IV	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi V	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi VI	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi VII	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi VIII	30.441.524	116.771.809	26.332.956	173.546.289
Revisi IX	36.426.168	115.529.720	26.232.956	178.188.844
Revisi X	36.426.168	115.529.720	26.232.956	178.188.844
Revisi XI	36.426.168	115.529.720	26.232.956	178.188.844
Revisi XII	36.426.168	116.812.673	26.232.956	179.471.797
Revisi XIII	36.426.168	116.812.673	26.232.956	179.471.797
Revisi XIV	36.426.168	116.812.673	26.232.956	179.471.797
Revisi XV	36.426.168	118.223.050	27.833.619	182.482.837
Revisi XVI	36.426.168	118.223.050	27.833.619	182.482.837
Revisi XVII	36.426.168	118.223.050	27.833.619	182.482.837

Pagu	Jenis Belanja Rp. (1000)			Jumlah Rp. (1000)
	Pegawai	Barang	Modal	
Revisi XVIII	36.426.168	118.223.050	27.833.619	182.482.837
Revisi XIX	36.426.168	118.223.050	27.833.619	182.482.837
Revisi XX	35.435.330	118.958.050	27.833.619	182.226.999
Revisi XXI	35.435.330	118.958.050	27.833.619	182.226.999
Revisi XXII	35.435.330	118.958.050	27.833.619	182.226.999
Revisi XXIII	35.435.330	118.958.050	27.833.619	182.226.999

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

URAIAN	PAGU AWAL (Rp. 1000)	PERUBAHAN (Rp. 1000)	PAGU AKHIR TRIWULAN I (Rp. 1000)	PERUBAHAN (Rp. 1000)	PAGU AKHIR TRIWULAN II (Rp. 1000)	PERUBAHAN (Rp. 1000)	PERUBAHAN TRIWULAN III (1000)	PERUBAHAN (Rp. 1000)	PERUBAHAN TRIWULAN IV (1000)
Belanja Pegawai	30.441.524	-	30.441.524	-	30.441.524	5.984.644	36.426.168	-990.838	35.435.330
Belanja Barang	116.771.809	-	116.771.809	-	116.771.809	1.451.241	118.223.050	735.000	118.958.050
RM	81.238.894	-	81.238.894	-	81.238.894	1.301.241	82.540.135	735.000	83.275.135
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNBP	35.532.915	-	35.532.915	-	35.532.915	150.000	35.682.915	0	35.682.915
Belanja Modal	26.332.956	-	26.332.956	-	26.332.956	1.500.663	27.833.619	0	27.833.619
RM	15.132.956	-	15.132.956	-	15.132.956	1.500.663	16.633.619	0	16.633.619
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNBP	11.200.000	-	11.200.000	-	11.200.000	-	11.200.000	0	11.200.000
Total	173.546.289	-	173.546.289	-	173.546.289	8.936.548	182.482.837	255.838	182.226.999

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.48 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Nomenklatur Awal	Pagu Awal (Rp1.000)	Pagu Per Triwulan I (Rp1.000)	Triwulan I		Pagu Per Triwulan II (Rp1.000)	Triwulan II		Pagu Per Triwulan III (Rp 000)	Triwulan III		Pagu Per Triwulan IV (Rp1.000)	Triwulan IV	
				Realisasi (Rp1.000)	%		Realisasi (Rp1.000)	%		Realisasi (Rp1.000)	%		Realisasi (Rp1.000)	%
403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan	173.546.289	173.546.289	12.912.976	7,44	173.546.289	34.289.122	19,76	182.482.837	62.896.393	34,47	182.226.999	109.914.709	60,32
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	115.754.524	115.754.524	281.215	0,24	115.754.524	11.730.329	10,13	118.767.857	27.510.586	23,16	118.767.857	58.108.391	48,93
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	54.093.997	54.093.997	208.676	0,39	54.093.997	11.657.791	21,55	54.037.327	23.018.223	42,60	54.037.327	44.834.589	82,97
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2.300.000	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	53.934.957	53.934.957	-	-	53.934.957	-	-	56.154.970	3.700.009	6,59	56.154.970	12.271.301	21,85
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.425.570	5.425.570	72.538	1,34	5.425.570	72.538	1,34	6.275.570	792.333	12,63	6.275.570	1.002.500	15,97
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	57.791.765	57.791.765	12.631.761	21,86	57.791.765	22.558.793	39,03	63.714.970	35.385.826	55,54	63.459.132	51.806.318	81,64
4636	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	534.000	534.000	-	-	534.000	-	-	534.000	-	-	534.000	-	-
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	28.816.241	28.816.241	5.425.178	20,23	28.816.241	8.854.609	32,27	28.754.802	15.280.402	42,16	27.480.802	16.712.995	60,80
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	30.441.524	30.441.524	7.206.582	23,67	30.441.524	13.904.184	45,68	36.426.168	24.105424	66,18	35.405.330	35.093.322	99,12

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari Tahun 2020-2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TAHUN	PAGU AWAL Rp.1000	PAGU AKHIR Rp.1000	REALISASI Rp.1000	
				Rp.	%
1.	2020	179.561.403	194.759.523	192.054.127	98,61
2.	2021	181.119.205	123.825.262	122.116.382	98,62
3.	2022	108.642.333	94.503.257	94.422.180	99,91
4.	2023	334.692.837	325.703.803	187.693.740	95,13
5.	2024	247.784.227	267.504.988	241.623.951	90,33
6.	2025	173.546.289	182.226.999	109,914,709	60,31

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)



Gambar 3.70 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi 2020-2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada Triwulan IV tahun 2025 anggaran yang terserap sebesar Rp109,914,709,501,- atau mencapai 60,31% dari pagu akhir Rp182.226.999.000,-

III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu Anggaran Tahun 2025 dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Nomen-klatur Awal	Pagu Awal (Rp1000)	Pagu Per Triwulan I (Rp100)	Triwulan I		Pagu Per Triwulan II (Rp100)	Triwulan II		Pagu Per Triwulan III (Rp100)	Triwulan III		Pagu Per Triwulan IV (Rp100)	Triwulan IV	
				Realisasi (Rp1000)	%		Realisasi (Rp1000)	%		Realisasi (Rp1000)	%		Realisasi (Rp1000)	%
403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan	173.546.289	173.546.289	12.912.976	7,44	173.546.289	34.289.122	19,76	182.482.837	62.896.393	34,47	182.226.999	109.914.709	60,32
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	115.754.524	115.754.524	281.215	0,24	115.754.524	11.730.329	10,13	118.767.867	27.510.566	23,16	118.767.867	58.108.391	48,93
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	54.093.997	54.093.997	208.676	0,39	54.093.997	11.657.791	21,55	54.037.327	23.018.223	42,60	54.037.327	44,834,589	82,97
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2.300.000	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	53.934.957	53.934.957	-	-	53.934.957	-	-	56.154.970	3.700.009	6,59	56.154.970	12,271,301	21,85
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.425.570	5.425.570	72.538	1,34	5.425.570	72.538	1,34	6.275.570	792.133	12,63	6.275.570	1,002,500	15,97
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	57.791.765	57.791.765	12.631.761	21,86	57.791.765	22.558.793	39,03	63.714.970	35.385.826	55,54	63.459.132	51,806,318	81,64
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	534.000	534.000	-	-	534.000	-	-	534.000	-	-	534.000	-	-
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	26.816.241	26.816.241	5.425.178	20,23	26.816.241	8.654.609	32,27	26.754.802	11.280.402	42,16	27.489.802	16,712,995	60,80
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	30.441.524	30.441.524	7.206.582	23,67	30.441.524	13.934.184	45,68	36.426.168	24.105424	66,16	35.435.330	35,093,122	99,03

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp109,914,709,501,- atau mencapai 60,31% dari total pagu anggaran sebesar Rp182.226.999.000,-

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 yang sudah di analisis per-Triwulan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Alokasi TW I (Rp1000)	Realisasi TW I (Rp1000)		Pagu Alokasi TW II (Rp1000)	Realisasi TW II (Rp1000)		Pagu Alokasi TW III (Rp1000)	Realisasi TW III (Rp1000)		Pagu Alokasi TW IV (Rp1000)	Realisasi TW IV (Rp1000)	
			Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	30.441.524	7.206.582	23,67	30.441.524	13.904.183	45,68	36.426.168	10.201.239	28.01	35.435.330	35,093,321	99.03
2.	Belanja Barang	116.771.809	5.706.393	4,89	116.771.809	20.384.938	17,46	118.223.050	15.896.540	19.26	118.958.050	67,065,392	56.38
3.	Belanja Modal	26.332.956	0	-	26.332.956	0	-	27.833.619	2.509.490	15.09	0	7,738,534	27.80
Total		173.546.289	12.912.976	7,44	173.546.289	34.289.122	19,76	182.482.837	28.607.270	21.10	182.226.999	109,897,248	60.31

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

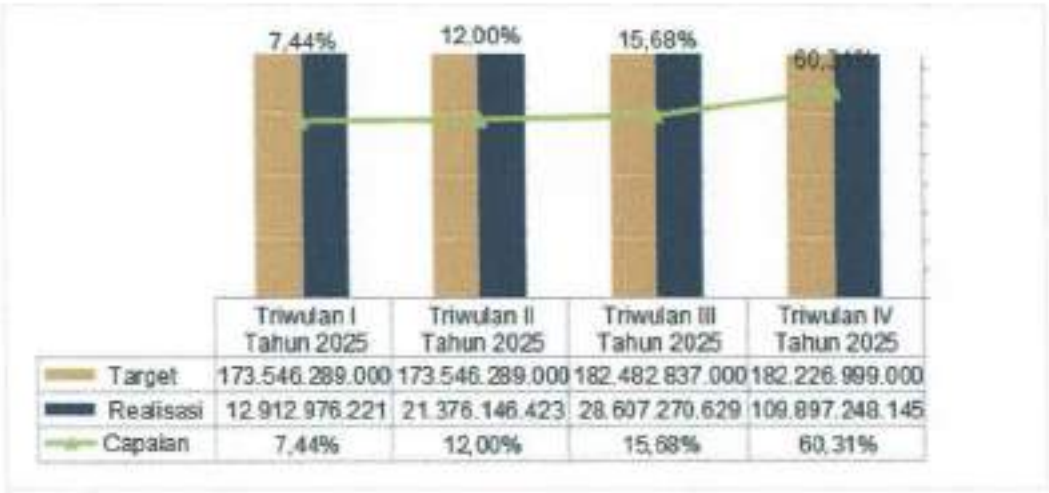
Adapun data realisasi anggaran per sumber dana pada Tahun 2025 yang sudah di analisis per-Triwulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

No	Sumber Dana	Pagu Alokasi Tw I (Rp1000)	Realisasi Tw I		Pagu Alokasi Tw II (Rp1000)	Realisasi Tw II		Pagu Alokasi Tw III (Rp1000)	Realisasi Tw III		Pagu Alokasi Tw IV (Rp1000)	Realisasi Tw IV	
			Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%
1.	RM	126.813.374	12.841.827	10,13	126.813.374	21.376.146	26,98	135.599.922	28.607.270	21.10	135,344,084	109,677,803	81.04
2.	PNBP	46.732.915	71.148.200	0,15	46.732.915	0	0,15	46.882.915	0	0	46,882,915	219,444	0.47
3.	SBSN	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0

No	Sumber Dana	Pagu Alokasi Tw I (Rp1000)	Realisasi Tw I		Pagu Alokasi Tw II (Rp1000)	Realisasi Tw II		Pagu Alokasi Tw III (Rp1000)	Realisasi Tw III		Pagu Alokasi Tw IV (Rp1000)	Realisasi Tw IV	
			Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%
Total		173.546.289	12.912.976	7,44	173.546.289	21.376.146	12	182.482.837	28.607.270	15.68	182,226,999	109,897,248	60.31

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)



Gambar 3.71 Grafik Realisasi Anggaran Per Triwulan IV Tahun 2025

4. Analisis Dana yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang belum terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.52 Analisis Data Yang Tidak terserap Oleh Unit Kerja

No	Jenis Belanja	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1.	Belanja Pegawai	35,435,330,000	35,093,321,674	342,008,326
2.	Belanja Barang	118,958,050,000	67,065,392,318	51,892,657,682
3.	Belanja Modal	27,833,619,000	7,738,534,153	20,095,084,847
Total		182,226,999,000	109,897,248,145	72,329,750,855

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

Tabel 3.53 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

No	Sumber Dana	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1.	RM	135,344,084,000	109,677,803,945	25,666,280,055
2.	PNPB	46,882,915,000	219,444,200	46,663,470,800
3.	SBSN	0	0	0
Total		182,226,999,000	109,897,248,145	72,329,750,855

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

Tabel 3.54 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2025

No	Sumber Dana	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Sisa Kontraktual		
	a. Belanja Barang	111.639.305.400	55.819.652.700
	b. Belanja Modal	7.318.744.600	11.245.739.618
2.	Sisa Non Kontraktual		
	a. Belanja Barang	27833619000	7738534153
	b. Belanja Modal	0	0
3.	Sisa Belanja Pegawai	35435330000	35093321674

Total	182.226.999.000	109.897.248.145

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha (2025)

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan sebesar Rp182.226.999.000,- (Seratus delapan puluh dua miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp109.897.248.145,- (Seratus sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 60,31% sehingga total dana yang belum terserap di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp72.329.750.855,- (Tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 39,69%.

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

   Berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran, total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebesar Rp182.226.999.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp109.897.248.145 atau 60,31% dari total pagu. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp72.329.750.855 atau 39,69 persen.

   Tingkat penyerapan anggaran ini terutama disebabkan oleh adanya blokir anggaran pada sebagian pagu, sehingga sejumlah kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan sesuai jadwal. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan serta realisasi belanja, yang baru dapat dilaksanakan setelah blokir anggaran dibuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, anggaran yang telah direalisasikan tetap difokuskan pada kegiatan prioritas dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

   Tabel 3.55 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	645	422	65%	100%	99,47%	99,47%

   Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa dibandingkan dengan rata-rata Target Kinerja sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 99,47%, menunjukkan Capaian SDM sebesar 65%, dengan Realisasi SDM sebanyak 422 SDM dari Jumlah Kebutuhan SDM 645 dimana realisasi tersebut terdiri dari :

   - SDM PNS sebanyak 210 orang;
   - SDM PPPK sebanyak 175 orang;
   - SDM PPNPN sebanyak 29 orang; dan
   - SDM Outsourching sebanyak 8 orang.

3. Hambatan dan Kendala

   Beberapa Hambatan/Kendala Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan antara lain:

1. Kegiatan terkait TUSI (Tugas dan Fungsi) sebelum adanya efisiensi sumber daya keuangan, mengalami hambatan dalam pertanggungjawaban kegiatan karena pemblokiran anggaran;
2. Realisasi daya serap keuangan mengalami keterlambatan khususnya pada bulan februari-mei 2025;
3. Kegiatan Monev (Moitoring dan Evaluasi) pengawasan ke lapangan minim dilaksanakan dikarenakan blokir anggaran.

BAB 4

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta Pengelolahan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Twirulan IV ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025, terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%) dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 1268 Ritase (target 1316 Ritase) tercapai 96.35%;
2. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebesar 3980 Trip (target 4000 Trip) tercapai 99.50%;
3. Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM terealisasi sebesar 3 Lokasi (target 3 Lokasi) tercapai 100%;
4. Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM terealisasi sebesar 8 Lokasi (target 8 Lokasi) tercapai tercapai 100%;
5. Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terealisasi sebesar 4 Kegiatan (target 4 Kegiatan) tercapai 100%;
6. Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM terealisasi sebesar 9 Lokasi (target 10 Lokasi) tercapai 90%;
7. Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebesar 5 Lokasi (target 5 Lokasi) tercapai 100%;

8. Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan terealisasi sebesar 2 Lokasi (target 2 Lokasi) tercapai 100%;
9. Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan) tercapai 100%;
10. Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan terealisasi sebesar 8 Lokasi (target 8 Lokasi) tercapai 100%;
11. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman terealisasi sebesar 12 Kegiatan (target 12 Kegiatan) tercapai 100%;
12. Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah terealisasi sebesar 10 Kegiatan (target 10 Kegiatan) tercapai 100%;
13. Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle terealisasi sebesar 5 Kegiatan (target 5 Kegiatan) tercapai 100%;
14. Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda terealisasi sebesar 51 Orang (target 50 Orang) tercapai 102,00%;
15. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan) tercapai 100%;
16. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 5 Dokumen (target 5 Dokumen) tercapai 100%;
17. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan) tercapai 100%;
18. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebesar 1 Dokumen (target 1 Dokumen) tercapai 100%;
19. Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen) tercapai 100%;
20. Kegiatan Digitalisasi Arsip terealisasi sebesar 12 Kegiatan (target 12 Kegiatan) tercapai 100%;
21. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 5 Kegiatan (target 5 Kegiatan) tercapai 100%;
22. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebesar 14 Kegiatan (target 14 Kegiatan) tercapai 100%;
23. Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 1

Kegiatan) tercapai 100%;

Untuk meningkatkan capaian kinerja di Triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target Renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

IV.1.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, tindak lanjut, dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.56 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316	1316	1.268	96,35%	Capaian Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 Sebesar 96,31% Dengan Total Rit 1.268 Rit	Pembayaran Termin XII	SAJSDP
2.	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000	4000	3.980	99,50%	Presentase Realisasi Trip Angkutan Penyeberangan Perintis Bulan Desember Tahun 2025	Kontrak berakhir dan realisasi trip sesuai dengan tabel. Selanjutnya melakukan kontrak kembali untuk tahun anggaran 2026	SAJSDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Triwulan IV (periode bulan Oktober s.d Desember 2025)	Triwulan I-IV	
4.	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10	10	9	90%	1. PP Bajoe 2. PP Bira 3. PP Pamatata 4. PP Pattumbukan 5. PP Takabonerate 6. PP Pasimarannu 7. PP Pasilambena 8. PP Siwa 9. PP Garongkong Belum Operasi 1. PP Pasimasunggu	Melaksanakan pengawasan pemebuhan SPM untuk pelabuhan yang dikelola oleh pemda dan ASDP serta melaksanakan pemenuhan SPM dan pemeliharaan untuk pelabuhan yang dikelola oleh BPTD	PJSDP
		IKK 8.4Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	5	5	100%	1. PS Rammang-rammang 2. PD Sorowako 3. PD Nuha 4. PD Timampu 5. PD Beau Tokalimbo	Melaksanakan pengawasan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	PJSDP
		IKK 8.6Operasional dan Pemeliharaan	Lokasi	2	2	2	100%	Pengawasan Pelabuhan	Meningkatkan Pengawasan	LLAJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan						Penyebrangan Periode Januari-Desember 2025	Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyebrangan	
5.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	2	2	100%	Pengawasan Operasional dilakukan di 3 Lokasi yaitu 1. Terminal Induk Lumpue 2. Terminal Laten Sessu Pekkae 3. Terminal Petta Ponggawae	Dilaksanakan Pengawasan Yang Lebih Terhadap Kelengkapan Unsur Teknis Utama Dan Unsur Penunjang Untuk Keselamatan Penumpang	LLAJSDPP
		IKK 9.3Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8	8	8	100%	Kegiatan Operasional UPPKB dilakukan di 8 Lokasi yaitu: 1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Palangga 3. UPPKB Somba Opu 4. UPPKB Datae 5. UPPKB Tanahbatue 6. UPPKB Sajoangin	Peningkatan Pengawasan dan Penindakan Over Dimension Over Loading (ODOL) Dalam Mendukung Keselamatan Angkutan Barang	LLAJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan						Penyebrangan Periode Januari-Desember 2025	Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyebrangan	
5.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP. AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	2	2	100%	Pengawasan Operasional dilakukan di 3 Lokasi yaitu 1. Terminal Induk Lumpue 2. Terminal Laten Sessu Pekkae 3. Terminal Petta Ponggawae	Dilaksanakan Pengawasan Yang Lebih Terhadap Kelengkapan Unsur Teknis Utama Dan Unsur Penunjang Untuk Keselamatan Penumpang	LLAJSDPP
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8	8	8	100%	Kegiatan Operasional UPPKB dilakukan di 8 Lokasi yaitu: 1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Palangga 3. UPPKB Somba Opu 4. UPPKB Datae 5. UPPKB Tanahbatue 6. UPPKB Sajoangin	Peningkatan Pengawasan dan Penindakan Over Dimension Over Loading (ODOL) Dalam Mendukung Keselamatan Angkutan Barang	LLAJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								7. UPPKB Larompong 8. UPPKB Walenrang		
6.	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	12	12	100%	Pada bulan Desember telah dilaksanakan 12 kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor tahun 2026	SAJSDP
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	10	10	100%	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Uji Kalibrasi di UPUBKB pada 10 Lokasi di Sulawesi Selatan	Pemantauan dan Monitoring UPUBKB di Sulawesi Selatan	SAJSDP
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5	5	5	100%	Pada bulan Desember, terdapat penambahan UPUBKB yang telah menerapkan BLUe Fullcycle, sehingga total saat ini UPUBKB yang menerapkan BLUe Fullcycle di Sulawesi Selatan	Monitoring dan pengawasan lebih lanjut UPUBKB yang telah menerapkan BLUe Fullcycle	SAJSDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								berjumlah 5 UPUBKB		
7.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	50	51	102%	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) 1. TKIT Raffasya Baitul Makmur pada 17 Februari 2025 2. TK PAUD Al Maa"rif pada 05 Desember 2025	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berdasarkan evaluasi terakhir pelaksanaan SALUD	TU
8.	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%	Catatan RKKL Pagu Kebutuhan, Indikatif, Anggaran dan Alokasi	Monitoring RKKL Pagu Kebutuhan, Indikatif, Anggaran dan Alokasi	TU
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	5	5	100%	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Montiring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV	Evaluasi Laporan Montiring Capaian Kinerja (LMCK)	TU
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	2	2	100%	Laporan Triwulan MR Triwulan I-IV serta Kertas Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian	Evaluasi Laporan Triwulan I-IV Manajemen Resiko (MR)	TU

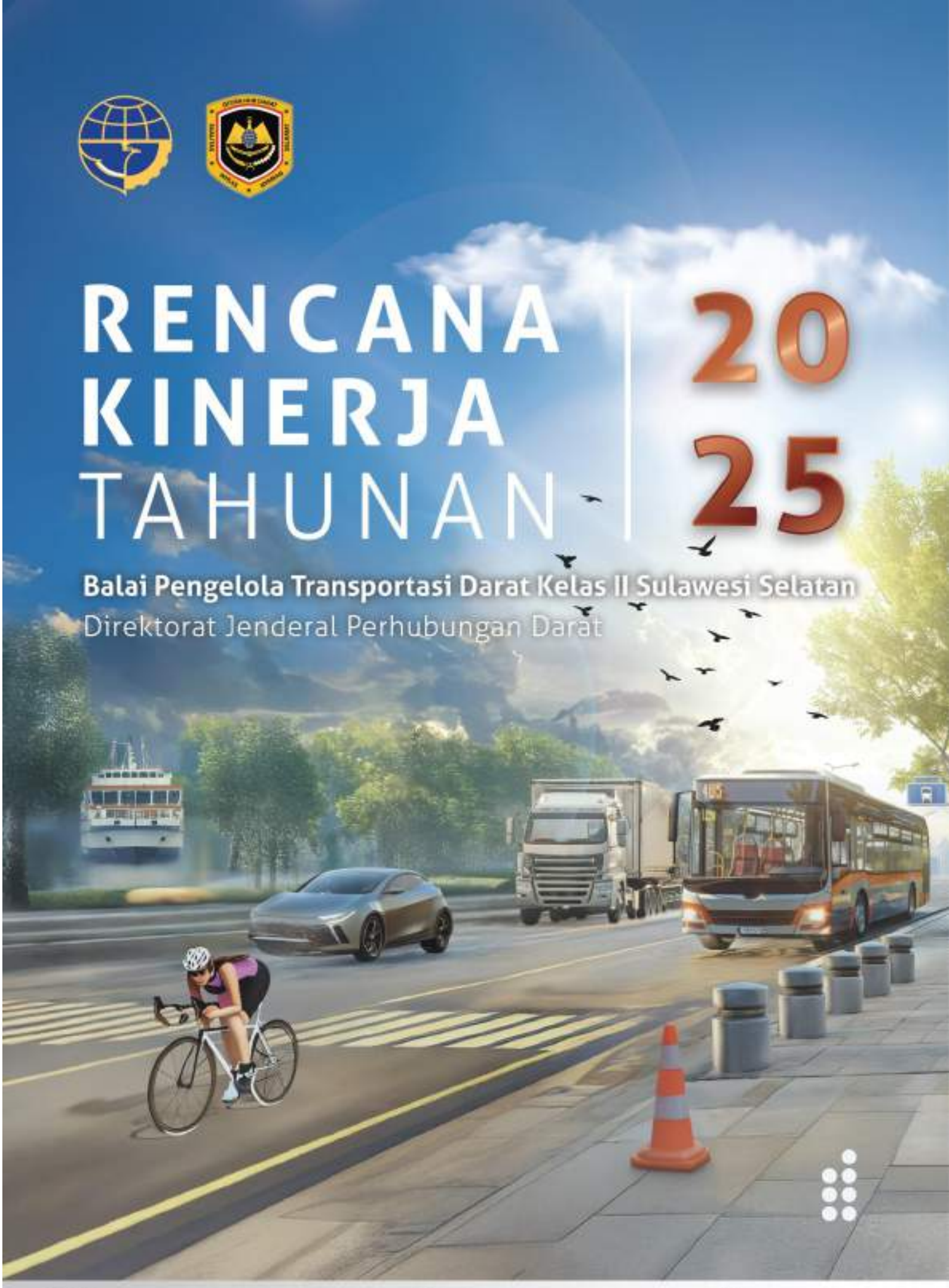
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025		
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100%	Berita acara audit fisik pada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Monitoring dan Tindak Lanjut Audit BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	TU
		IKK 4.6Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	2	2	100%	Catatan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester 2	Evaluasi Catatan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I dan II	TU
		IKK 4.8Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12	12	12	100%	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Desember	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Januari- Desember	TU
		IKK 4.9Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	5	5	100%	Laporan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Monitoring dan Pelaporan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	TU
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14	14	14	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Desember	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	TU
		IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	1	100%	Peningkatan SDM dan Fasilitas Operasional UPPKB Maccopa Dalam Mendukung Sistem Informasi Pendataan	Peningkatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di UPPKB Maccopa	TU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PJ
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Kendaraan dan Muatan Angkutan Barang Menuju Zona Integritas WBK/WBBM		

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK I Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	15
2.	SK 2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50
		IKK 2.2 Persentase penerapan Smart Terminal Tipe A	%	50
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25,04
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	83

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelengaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Makassar, 5 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Selatan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bahar, S.T., M.T.
NIP. 19711007 199803 1 008

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	**Annesi Putri Aprilia, A.Md.T.**	Pengatur Lalu Lintas	02-01-2025	
2.	Dikonsep	**Nur Tasya Rizkiyani, A.Md.Tra**	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	02-01-2025	
3.	Diperiksa	**Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.**	Kasubbag Tata Usaha	02-01-2025	
4.	Disetujui	**Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.**	Kasubbag Tata Usaha	02-01-2025	
5.	Disetujui	**Andy Sanjaya, S.SiT., M.M**	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	02-01-2025	
6.	Disetujui	**Thahir, S.Kom**	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	02-01-2025	
7.	Disetujui	**Adittya Mininda, S.T., M.T**	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	02-01-2025	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahar, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani,A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Pihak Pertama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan
AHMAD YANI,A.T.D., M.T	BAHAR, S.T., M.T.
NIP.19650930 199003 1 003	NIP. 19711007 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan nasional	%	100
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	15
2.	SK 2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50
		IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe A	%	50
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25,04
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	83
4	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelengaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

NO.	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	54.093.997.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.300.000.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	53.934.957.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.425.570.000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	534.000.000,-
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	26.816.241.000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	30.441.524.000,-

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI,A.T.D., M.T
NIP.19650930 199003 1 003

Makassar, 02 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Selatan

BAHAR, S.T., M.T.
NIP. 19711007 199803 1 008

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Annesi Putri Aprilia, A.Md.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	11/06/2025	
2.	Dikonsep	Sandiva Pangihutan Sitinjak, A.Md.T	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	11/06/2025	
3.	Diperiksa	Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.	Kasubbag Tata Usaha	11/06/2025	
4.	Disetujui	Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.	Kasubbag Tata Usaha	11/06/2025	
5.	Disetujui	Andy Sanjaya, S.SiT., M.M	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	11/06/2025	
6.	Disetujui	Thahir, S.Kom	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/06/2025	
7.	Disetujui	Ismawan Ahmad Prasetyo, S.SiT	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/06/2025	

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahar, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 02 Juli 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Pihak Pertama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan
Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001	BAHAR, S.T., M.T. NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahar, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 02 Juli 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Pihak Pertama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan
Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001	BAHAR, S.T., M.T. NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1694,5
2.	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3904
3.	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Unit	8
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
4	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10
		IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5
		IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Baranag	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Yang Di Bangun Dan Dioperasikan Untuk Mendukung Keselamatan	Lokasi	8
		IKK 9.4 Jumlah Kegiatan Pegawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5
6	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala Di Daerah	Kegiatan	10
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan ber-keselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50
	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12
		IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	54.093.997.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.300.000.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	53.934.957.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.425.570.000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	534.000.000,-
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	26.816.241.000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	30.441.524.000,-

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Makassar, 02 Juli 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Selatan

BAHAR, S.T., M.T.
NIP. 19711007 199803 1 008

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Vijai Tri Handiko Silalahi, A.Md.T	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi	14/10/2025	
2.	Dikonsep	Sandiva Pangihutan Sitinjak, A.Md.T	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	14/10/2025	
3.	Diperiksa	Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.	Kasubbag Tata Usaha	14/10/2025	
4.	Disetujui	Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.	Kasubbag Tata Usaha	14/10/2025	
5.	Disetujui	Andy Sanjaya, S.SiT., M.M	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	14/10/2025	
6.	Disetujui	Thahir, S.Kom	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	14/10/2025	
7.	Disetujui	Ismawan Ahmad Prasetyo, S.SiT	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	31/10/2025	

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Pihak Pertama Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan
Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001	Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M. NIP. 19761106 200012 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1694,5
2.	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3904
3.	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Unit	8
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
4.	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10
		IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5
		IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Baranag	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Yang Di Bangun Dan Dioperasikan Untuk Mendukung Keselamatan	Lokasi	8
		IKK 9.4 Jumlah Kegiatan Pegawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5
6.	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala Di Daerah	Kegiatan	10
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5
7.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan ber-keselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50
8.	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12
		IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	52,626,950,000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.300.000.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	54,554,307,000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6,275,570,000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	534.000.000,-
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	26,754,802,000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	36,426,168,000,-

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Makassar, 14 Oktober 2025
Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi III Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Vijai Tri Handiko Silalahi, A.Md.T	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi	28/11/2025	
2.	Dikonsep	Sandiva Pangihutan Sitinjak, A.Md.T	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	28/11/2025	
3.	Diperiksa	Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.	Kasubbag Tata Usaha	28/11/2025	
4.	Disetujui	Arif Setiawan, S.SiT., M.Sc.	Kasubbag Tata Usaha	28/11/2025	
5.	Disetujui	Andy Sanjaya, S.SiT., M.M	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	28/11-2025	
6.	Disetujui	Thahir, S.Kom	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	28/11/2025	
7.	Disetujui	Ismawan Ahmad Prasetyo, S.SiT	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	28/11/2025	

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Desember 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Pihak Pertama Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan
Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001	Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M. NIP. 19761106 200012 1 001

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316
2.	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000
3.	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	8
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
4.	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10
		IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
		IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2
		IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Yang Di Bangun Dan Dioperasikan Untuk Mendukung Keselamatan	Lokasi	8
6.	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala Di Daerah	Kegiatan	10
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5
7.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan ber-keselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Din Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50
8.	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Dara	Dokumen	5
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14
		IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 54,037,327,000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 2,300,000,000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 56,154,970,000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 6,275,570,000,-
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 534,000,000,-
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 27,489,802,000,-
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 35,435,330,000,-

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Makassar, Desember 2025
Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 1 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat dan Ketersediaan Aksesibilitas Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Supervisi/Audit Angkutan Jalan Nasional	%	100	Layanan angkutan jalan perintis provinsi Sulawesi Selatan	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	5.163.029.000	Bantara
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Jeneponto Tipe A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.181.565.000	Prasarana
		IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperlintasan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan angkutan penyebrangan perintis provinsi Sulawesi Selatan	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	41.030.968.000	
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	15	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4.705.012.000	Prasarana
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50	Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Watampone Stote	4,1	8,2	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9	40	45,1	50	130.000.000	Prasarana
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Lebani Sesao Pekkae Barru	4,1	8,2	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9	40	45,1	50	42.000.000	Prasarana
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Sofuh Lompoe Pinrang	4,1	8,2	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9	40	45,1	50	229.464.000	Prasarana
		IKK 2.2 Persentase Penumpang Sesuai Terminal Tipe A	%	80	Operasional Terminal Pencampang Tipe A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3.181.565.000	Lalu Prasarana
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	Monitoring pengelolaan dan pengembalian prasarana	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	800.775.000	Prasarana
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	15.076.655.000	Lalin
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	25,04	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	11.467.313.000	Lalin
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	750	750	250.000.000	TU
				200	Audit Laik Lintas Usia Diri (SAUDI)	0	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	107.142.000	TU
		IKK 3.6 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	83	Kalibrasi Peralatan Pengujian kendaraan bermotor	6,9	13,8	20,7	27,6	34,5	41,4	48,3	55,2	62,1	69	75,9	83	0	Semua
4	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pengelolaan bidang keselamatan	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	1.838.775.000	TU
5	SK 7 Meningkatnya Kinerja Ditjen Perhubungan Darat yang Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Pemerintah Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	83	4.104.043.000	TU

Makassar, 02 Januari 2020

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Salim, S.T., M.T.
NIP. 197110071 199802 1 008

REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
								Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1694	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	32	167	232	315	401	499	669	909	1079	1249	1525	1694	3.163.020.000	Sarana
2	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3904	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	352	608	994	1378	1762	2055	2348	2641	2934	3227	3520	3904	41.930.968.000	Sarana
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.017.947.000	Prasarana
							2). Operasional Terminal Tipe A Lateri Sesuai Prikso													774.664.000	
							3). Operasional Terminal Tipe A Induk Lungpue													1.570.304.000	
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Unit	8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11.500.963.000	Prasarana
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	890.775.000	Tata Usaha
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.084.698.000	Prasarana
							2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)													417.523.000	
							3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)													455.888.000	
							4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bira													601.112.000	
							5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)													351.428.000	
							6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang)													264.378.000	
							7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilambena)													112.500.000	
							8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu)													107.550.000	
							9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Talkbomerate)													107.550.000	
							10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarunggu)													66.050.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Rammang-rammang)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	129.420.000	Prasarana
						2). Operasional Pelabuhan Danau Sonowako													478.199.000	
						3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sonowako (PD Nuha)													72.721.000	
						4). Operasional Pelabuhan Danau Tinampo													384.837.000	
						5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Tinampo (PD Tokalimbo Bonu)													56.158.000	
		IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.000.000	Lalin
5	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	147.400.000	Lalin
		IKK 9.3	Jumlah fasilitas perimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11.500.963.000	Lalin
		IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pegawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	822.105.000	Lalin
6	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	68.700.000	Sarana
		IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala Di Daerah	Kegiatan	10	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	2	2	6	7	7	8	9	10	68.700.000	Sarana
		IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	5	830.000.000	Sarana
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude penggunan jalan ber-keselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak Guru Atau Pendamping Sesuai Peforman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	4	8	13	17	22	26	30	35	39	42	46	50	107.142.000	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
								Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
8	SK 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	100.000.000	Tata Usaha
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	1.858.775.000	Tata Usaha
			IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1.858.775.000	Tata Usaha
			IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	147.400.000	Tata Usaha
			IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	68.700.000	Tata Usaha
			IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	Pengadaan peralatan pendukung kehumasan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	134.000.000	Tata Usaha
			IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengelolaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	116.771.809.000	Tata Usaha
			IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	Gaji dan Tunjangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	30.441.524.000	Tata Usaha
			IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.104.043.000	Tata Usaha

Makassar, 05 Agustus 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Selatan

Bahar, S.T., M.T
NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
								Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1694	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	32	166,5	232	214,5	401	498,5	668,5	908,5	1078,5	1248,5	1524,5	1694	3.163.029.000	Sarana
2	SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3904	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	362	608	904	1378	1762	2055	2248	2641	2934	3227	3520	3904	41.930.968.000	Sarana
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.017.947.000	Prasarana
							2). Operasional Terminal Tipe A Latrini Sesuai Perkir													774.664.000	
							3). Operasional Terminal Tipe A Induk Lumpue													1.570.304.000	
			IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pemisahan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Unit	8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) diketik	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11.500.963.000	Prasarana
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	850.775.000	Tata Usaha
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.084.698.000	Prasarana
							2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)													417.523.000	
							3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)													455.868.000	
							4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bira													601.112.000	
							5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)													351.428.000	
							6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang)													264.378.000	
							7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilambena)													112.200.000	
							8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasimarannu)													107.550.000	
							9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Talkaboorate)													107.550.000	
							10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasimatunggu)													66.050.000	
			IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Rammagrammang)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	129.420.000	Prasarana
							2). Operasional Pelabuhan Danau Sonwalen													478.199.000	
							3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sonwalen (PD Ruha)													72.721.000	
							4). Operasional Pelabuhan Danau Timangu													384.837.000	
							5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Timangu (PD Tokalimbo Besi													56.158.000	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
								Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan		Unit	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.000.000	Lalin
5	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata		Kegiatan	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	147.400.000	Lalin
		IKK 9.3	Jumlah fasilitas pelimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan		Lokasi	8	Unit Pelaksana Pelimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11.500.963.000	Lalin
		IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pegawasan Bengkel Karoseri		Kegiatan	5	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	822.105.000	Lalin
6	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman		Kegiatan	12	Penerbitan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	68.700.000	Sarana
		IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah		Kegiatan	10	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	2	2	6	7	7	8	9	10	68.700.000	Sarana
		IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berasis yang menerapkan blue toll		Kegiatan	5	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	5	330.000.000	Sarana
7	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda		Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	4	8	13	17	22	30	30	35	39	42	46	50	107.142.000	Tata Usaha
8	SK 4	Meningkatnya kualitas tata kelola penerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat		Kegiatan	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	100.000.000	Tata Usaha
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat		Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	1.858.775.000	Tata Usaha
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan		Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1.858.775.000	Tata Usaha
		IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan		Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	147.400.000	Tata Usaha
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat		Dokumen	2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	68.700.000	Tata Usaha
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip		Kegiatan	1	Pengadaan peralatan pendukung kebumasan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	134.000.000	Tata Usaha
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		Kegiatan	3	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	116.771.809.000	Tata Usaha
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja		Kegiatan	12	Gaji dan Tunjangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	30.441.524.000	Tata Usaha
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI		Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.104.043.000	Tata Usaha

Makassar, 14 Oktober 2025

Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001

REVISI III RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1316	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	32	166,5	232	314,5	401	498,5	668,5	908,5	1078,5	1248,5	1280	1316	1.695.982.000	Sarana
2	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	352	608	994	1378	1762	2055	2348	2641	2934	3227	3520	4000	43.341.345.000	Sarana
3	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.147.401.000	Prasarana
					2). Operasional Terminal Tipe A Latoni Sesuai Pelikat													716.064.000	
					3). Operasional Terminal Tipe A Induk Lumpue													1.490.450.000	
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Peningbungan Keselamatan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	8	Unit Pelaksana Peningbungan Keselamatan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11.500.963.000	Prasarana
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	890.775.000	Tata Usaha
4	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.303.373.000	Prasarana
					2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Sinta)													390.212.000	
					3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)													455.888.000	
					4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bira													626.962.000	
					5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)													342.748.000	
					6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukang)													251.608.000	
					7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasitumbeni)													90.070.000	
					8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu)													87.070.000	
					9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takaboneate)													84.200.000	
					10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarenggu)													58.060.000	
		IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Sumanagumanang)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	121.430.000	Prasarana
					2). Operasional Pelabuhan Danau Sorowako													434.837.000	
					3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sorowako (PD Nuha)													61.158.000	
					4). Operasional Pelabuhan Danau Tinampu													326.238.000	
					5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Tinampu (PD Tokalimbo Bersi)													56.158.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
		IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.000.000	Lalin
5	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Kegiatan Pengawasan Teknis Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	200.000.000	Lalin
		IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8	Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Over Dimension Over Loading	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	550.000.000	Lalin
6	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Peloman	Kegiatan	12	Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	68.700.000	Sarana
		IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	2	2	6	7	7	8	9	10	150.000.000	Sarana
		IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berkala yang memenuhi blue full cycle	Kegiatan	5	Kalibrasi Perubatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	5	68.700.000	Sarana
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajuan Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	4	8	13	17	22	26	30	35	39	42	46	50	107.142.000	Tata Usaha
8	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	890.775.000	Tata Usaha
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	1.858.775.000	Tata Usaha
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pelaksanaan penguatan dan pemantauan tupoksi BPTD	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	282.100.000	Tata Usaha
		IKK 4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	147.400.000	Tata Usaha
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1.858.775.000	Tata Usaha
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12	Pengadaan peralatan pendukung kehumasan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	134.000.000	Tata Usaha
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	3.379.308.000	Tata Usaha
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14	Gaji dan Tunjangan	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	35.435.330.000	Tata Usaha
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.892.604.000	Tata Usaha

Makassar, 01 Desember 2025

Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Selatan

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

Apdi Wijaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN JANUARI TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN (Revisi I)		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	%	100	Layanan angkutan jalan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan perintis yang dilayani	Layanan angkutan jalan perintis	8,3	8,3	3.163.029.000	100	0,00	-	0,00	0,0	Kontrak dilakukan pada tanggal 23 Januari, sementara kegiatan masih proses	Pembayaran termin I dilakukan di bulan februari	Sarana
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Tipe A dikelola	Pelayanan pada Terminal Tipe A	3	100,0	3.298.465.000	100	3	15.523.310	100,00	0,47	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebanyak 3 (tiga) terminal, antara lain : 1. Terminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae, Barru 2. Terminal Tipe A Induk Lumpue, Parepare 3. Terminal Tipe A Petta Ponggawai, Bone	Melaksanakan pengawasan operasional di Terminal Tipe A di Wilayah Kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
		IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan angkutan penyeberangan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan angkutan penyeberangan perintis	8,3	8,3	41.930.968.000	100	0,00	-	0,00	0,00	Kontrak sudah dilaksanakan tanggal 1 Januari 2025, sebanyak 6 kapal dan 6 lintasan perintis	Pembayaran Termin I di bulan Februari, Proses pembayaran dilaksanakan 2 bulan sekali	Sarana
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	15	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang diawasi	pengawasan operasional pelabuhan SDP	15	100,0	4.577.474.000	100	11	-	73,33	0,00	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 11 Pelabuhan, antara lain : 1. PP Garongkong, PP Siwa, PP Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Bira , PP Pamatata, PP Pattumbukan, PD Sorowako, PD Nuha, PD Timampu, PD Beau Tokalimbo, PS Rammang-rammang	Melaksanakan pengawasan operasional di ke-11 Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Wilayah Kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana

2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50	Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Watampone Bone	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	4,1	8,2	130.000.000	100	50,83	-	101,66	0,00	SPM terkahir dilaksanakan pada bulan Februari 2024	Pelaksanaan SPM terminal selanjutnya sebelum masa Angleb 2025	Prasarana
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Latenri Sessu Pekkae Barru	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			100.000.000	100		-		0,00			
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Induk Lumpue Parepare	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			169.464.000	100		-		0,00			
		IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe A	%	50	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah penerapan SMART Terminal Tipe A	Penerapan SMART Terminal Tipe A	50	100,0	3.298.465.000	100	50,0	15.523.310	100,00	0,47	Pelaporan telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi strategi	Mengusulkan pengadaan perangkat pendukung SMART Terminal	Lalin Prasarana
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	Monitoring pengelolaan dan pengendalian prasarana	Persentase Pelabuhan SDP yang dilaksanakan pengawasan pemenuhan SPM	Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM di Pelabuhan Penyeberangan	8,3	8,3	742.886.000	100	100,0	-	100,00	0,00	Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP dilaksanakan terakhir pada Oktober 2024	Melaksanakan SPM sebelum Masa Angleb 2025	Prasarana
3	SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Perelngkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Perlengkapan jalan terpasang	8,3	8,3	15.076.655.000	100	0,0	-	0,00	0,00	Pekerjaan P3J masih dalam proses lelang dan sedang dalam tahap efesiensi	Melakukan kegiatan Tetap melakukan kedinasan dan melakukan perencanaan kegiatan kontraktual TA. 2026	Lalin
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	25,04	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah pelanggaran pada UPPKB	Pelanggaran pada UPPKB	25,04	100,0	10.786.833.000	100	23,0	563.408.365	91,85	5,22	dilaksanakan pada 8 UPPKB yaitu : 1. UPPKB Maccoppa 2. UPPKB Pallangga 3. UPPKB Somba Opu 4. UPPKB Tana Batue 5. UPPKB Datae 6. UPPKB Sajoanging 7. UPPKB Larompong 8. UPPKB Walenrang	Pengawasan Pelanggaran Angkutan Barang dengan Penegakan Hukum	Lalin
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat tersosialisasi pada Pekan Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0,0	250.000.000	100	0,00	-	0,00	0,00	Sosialisasi masih tahap perencanaan	Pekan Keselamatan Jalan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Tata Usaha
				250	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi sadar lalu lintas pada usia dini	Penyelenggaraan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	0	0,0	107.142.000	100	0,00	-	0,00	0,00	Sosialisasi masih tahap perencanaan	Sosialisasi akan dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2025	Tata Usaha
		IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	83	Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah UPUBKB terakreditasi	Pemeliharaan peralatan kalibrasi	6,9	8,3	330.000.000	100	0,00	-	0,00	0,00	Belum ada yang UPUBKB yang mengajukan permohonan kalibrasi	Melakukan koordinasi kepada Dinas terkait percepatan pelaksanaan kalibrasi	Sarana

4	SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pengelolaan bidang ketatausahaan	ketatausahaan terkelola	Pengelolaan ketatausahaan	7,5	8,3	961.885.000	100	64,25	-	71,39	0,00	Capaian Indikator Kinerja kegiatan diperoleh dari ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan , indeks profesionalisme ASN , tingkat penyerapan anggaran, dan indeks kepuasan pegawai penyelenggaraan perkantoran.	Melaksanakan pemantauan penyerapan anggaran dengan memerhatikan efisiensi pada tahun 2025	Tata Usaha
5	SK 5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah fasilitas dan kepuasan pegawai perkantoran	Fasilias dan kepuasan pegawai perkantoran	7	8,2	2.783.308.000	100	85,27	-	100,32	0,00	Capaian Indikator kinerja kegiatan diperoleh dari Tingkat kepuasan penyelenggaraan perkantoran Eselon III, IV dan staf serta tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran	Memastikan seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik.	Tata Usaha

Makassar, 04 Februari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Bahar, S.T., M.T
NIP. 19711007 199803 1 008

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	(SS) 1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat dan Terciptanya Aksesibilitas Transportasi	(KK) 1.1. Persentase Pelaksanaan Keselamatan Angkutan Jalan Memadai	%	100	Layanan angkutan jalan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan perintis yang dilayani	Layanan angkutan jalan perintis	16,8	16,8	1.161.929.000	100	13,19	0	11,19	0,0	Telah dilaksanakan verifikasi dokumen oleh tim verifikasi internal BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, selanjutnya Tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditelaah untuk pembayaran kepada Perum DAMRI Cabang Makassar	Melaksanakan verifikasi untuk bulan selanjutnya	Bakti
		(KK) 1.2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Tipe A dikelola	Pelayanan pada Terminal Tipe A	3	100,0	1.381.265.000	100	3	15.924.310	100,00	0,5	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebanyak 3 (tiga) terminal, antara lain : 1. Terminal Tipe A Lawasi Sinjai Timur, Kode 2. Terminal Tipe A Kabila Bone, Kode 3. Terminal Tipe A Pertiwi Penggerang Baru	Melaksanakan Pengoperasian UPT sesuai kewenangan yang berlaku.	Pemerintah
		(KK) 1.3. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan angkutan penyeberangan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan angkutan penyeberangan perintis	35,0	35,0	42.933.868.800	100	36,00	0	36,00	0,0	Untuk realisasi anggaran belum terlaksana sampai dengan bulan februari	Akan dilaksanakan pencairan untuk bulan Januari dan februari	Bakti
		(KK) 1.4. Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	15	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang dikelola	pengawasan operasional pelabuhan SDP	15	100,0	6.705.512.000	100	11	0	73,33	0,0	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 11 Pelabuhan, antara lain : 1. PP Garongkong, 2. Bira, PP Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Biru , PP Pattiarta, PP Pamatata, PP Sinjai Barat, PP Bulukumba, PP Selayar, PP Jeneponto, PP Kayuadi, PP Tanjung Bira, PP Jeneponto Tamalatea	Melaksanakan pengawasan operasional di Be. 11 Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Wilayah Kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan.	Pemerintah

2	SS. 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelabuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50	Pembangunan gedung dan fasilitas Terminal Tipe A Watampone Baru	Pembangunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	8,3	16,9	120.000.000	100	20,80	0	101,00	0,0	SPM terbaik ditindaklanjuti pada bulan Februari 2024	Pelaksanaan SPM terlaksana sesuai rencana Anggaran 2025	Pencapaian
					Pembangunan gedung dan fasilitas Terminal Tipe A Lapeng Desa Pekkae Baru	Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A			45.000.000	100		0		0,0			
					Pembangunan gedung dan fasilitas Terminal Tipe A Sabah Lampoe Pangkep	Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A			224.464.000	100		0		0,0			
		IKK 2.2 Persentase Pengerapan Smart Terminal Tipe A	%	80	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah penerapan SMART Terminal Tipe A	Penerapan SMART Terminal Tipe A	50	100,0	6.381.365.000	100	30,0	15.323.410	100,00	0,3	Pelayanan telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi android	Mengevaluasi pengadaan perangkat pendukung SMART Terminal	Lebih Pencapaian
		IKK 2.3 Persentase Pelabuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SGP	%	100	Monitoring pengelolaan dan pengevaluasian pemanenan	Pemenuhan Pelabuhan SDP yang dilaksanakan pengelolaan pemanfaatan SPM	Monitoring dan pengelolaan pemanfaatan SPM di Pelabuhan Penyeberangan	16,6	16,6	693.775.000	100	100,0	0	120,00	0,0	Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SGP dilaksanakan terakhir pada Oktober 2024	Melaksanakan SPM terbaik Mata Anggar 2025	Pencapaian
3	SE. 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Penanganan Jalan yang telah terpantau terhadap kondisi rawan	%	100	Penanganan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah pengelolaan dan pemantauan pelanggaran jalan	Penanganan jalan nasional	8,3	8,3	18.076.600.000	100	0,0	0	0,00	0,0	Pelayanan PJU masih dalam proses lelang dan evaluasi dalam tahap eksekusi	Tetap melakukan pemeliharaan Penanganan Jalan yg rusak supaya tidak lanjut kondisi jalan aman nyaman	Lebih
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Dapat Perhitungkan Dalam	%	≤5,04	Operasional Unit Pelaksana Pemalangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah penanganan pada UPPKB	Penanganan pada UPPKB	10,04	100,0	11.447.319.000	100	18,36	563.408.365	93,22	4,9	Belum Januari-Februari 2025 Kendaraan Masih 15700 dan kendaraan melanggar 4701	Meningkatkan Pengawasan di UPPKB	Lebih
		IKK 3.3 Jumlah transportasi yang terverifikasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	Pengembangan Pusat Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat sosialisasi pada Pusat Keselamatan Jalan	Pengembangan Pusat Keselamatan Jalan	0	0,0	650.000.000	100	0,00	0,00	0,00	0,0	Sosialisasi masih sangat pemerintah	Pusat Keselamatan Jalan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Tata Usaha
				250	Balai Lalu Lintas Uras Dan (BALUD)	Jumlah masyarakat yang terverifikasi balai lalu lintas pada tata (ln)	Pengembangan Balai Lalu Lintas Uras Dan (BALUD)	0	0,0	187.142.000	100	20,00	0,00	0,00	0,0	Untuk dilaksanakan sosialisasi Balai Lalu Lintas Uras Dan pada masih 1500 Kalinya Jadi Maknor pada 17 Februari 2025 di Barang cuput 8000 dibar 0 Sulawesi Selatan	Akan dilaksanakan pengujian pelaksanaan sosialisasi Balai Lalu Lintas Uras Dan berdasarkan evaluasi terakhir pelaksanaan BALUD	Tata Usaha
		IKK 3.4 Persentase Pemeliharaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah UPPKB terverifikasi	Pemeliharaan peralatan kalibrasi	12,9	16,6	103.000.000	100	0,00	0	0,00	0,0	Belum ada yang UPPKBnya yang mengajukan pemeliharaan kalibrasi	Melakukan pemberitahuan bagi UPPKB yang akan habis masa berlaku kalibrasinya	Turunan

4	16.4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkeretaapian Transportasi Darat	16.4.3.1	Kualitas Penyelenggaraan Perkeretaapian Transportasi Darat	Nilai	80	Pengelolaan kinerja pelabuhan	Pelaksanaan kegiatan	Pengelolaan kinerja pelabuhan	15	15,7	1.408.772.000	100	80,00	5	75,39	9,0	Hasil Kualitas Perkeretaapian Transportasi Darat UPTD Kelas II Kolaka Utara adalah sebagai berikut : 1. kinerja pelayanan sarana perkeretaapian dengan nilai 20 2. kinerja Prasarana perkeretaapian dengan nilai 22,5 3. Tingkat penyerapan anggaran sebesar 100% dengan nilai 1,13 4. kinerja kepatuhan pegawai penyelenggaraan perkeretaapian dengan nilai 11,38	Meningkatnya pelayanan penyerapan anggaran dengan sarana/fasilitas yang ada pada tahun 2025	Tidak Tercapai
5	16.5	Meningkatnya Sarana Objek Perkeretaapian Darat yang Aksesibel	16.5.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkeretaapian Objek Perkeretaapian Darat	Nilai	85	Optimalisasi dan pemeliharaan bandar	Lembah bandar dan kepatuhan pegawai perkeretaapian	Pandan dan kepatuhan pegawai perkeretaapian	15	14,3	1.138.304.000	100	85,27	0	100,00	9,0	Hasil tingkat penyelenggaraan perkeretaapian Objek Perkeretaapian Darat adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kepatuhan Pejabat Kelas III dan IV dengan nilai 17,9; 2. Tingkat kepatuhan awal dengan nilai 17,07; 3. Tingkat kepatuhan kualitas perkeretaapian dengan nilai 50	Meningkatkan sarana pegawai dapat terpelaksana lagas dengan baik	Tidak Tercapai

Watampone, 08 Maret 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Ir. Edhar, S.T., MT

NIP. 19681007 199803 1 001

MONITORING RENCANA AKSI ATAU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN MARET TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 1 Meningkatnya Kredibilitas Transportasi Darat dan Kesejahteraan Aparatur Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Kepentingan Angkutan Jalan Nasional	%	100	Layanan angkutan jalan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan perintis yang dilayani	Layanan angkutan jalan perintis	24,9	24,9	1.161.624.000	100	37,05	668.676.000	20,08	6,40	Telah dilaksanakan verifikasi dokumen oleh tim verifikasi internal BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, selanjutnya Tim verifikasi gabungan/validasi hasil verifikasi kepada Dephub Penyusun dokumen untuk dijadikan acuan pembayaran kepada Perum DAMRI Cabang Makassar	Melakukan verifikasi sesuai ketentuan	Nurnia
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Tipe A Aktivitas	Pelayanan pada Terminal Tipe A	3	100,0	2.681.260.000	100	3	268.154.111	100,00	7,5	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebanyak 3 (tiga) terminal, terinci dari : 1. Terminal Tipe A Lakici Kecamatan Pallatar, Daerah 2. Terminal Tipe A Sicikik Lampoe , Pasangan 3. Terminal Tipe A Pekka Enggamai, Soroa	Melakukan pengoperasian TPA sesuai keberadaan yang berlaku	Hamdah
		IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kepentingan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan angkutan penyeberangan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan angkutan penyeberangan perintis	24,9	24,9	61.840.000.000	100	38,47	0	38,47	0,0	Pembayaran tdp menyesuaikan target trip sesuai ketentuan	Rapat akan koordinasi sesuai dengan kontrak trip sesuai ketentuan	Semua
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan BOF yang Beroperasi	Lokasi	13	Operasional Pelabuhan Bongkar Dermaga Non Penyeberangan	Jumlah pelabuhan BOF yang dioperasi	pengoperasi operasional pelabuhan BOF	15	100,0	4.705.512.000	100	11	317.756.401	73,33	6,8	Jumlah Pelabuhan BOF yang beroperasi sebanyak 11 Pelabuhan, secara rinci : 1. PP Tanjungbarang, 10 Siwa, PP Sopa Pelabuhan Penyeberangan Bisa , PP Pamanah, PP Pelabuhan, PD Sejahtera, PD Bulu, PP Tanjungpu, PD Bina Pelabuhan, PS Pattimang (mobile)	Melaksanakan pengawasan operasional di 11 Pelabuhan Bongkar, Dermaga dan Penyeberangan di Wilayah Kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pratama

2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut	IKK 2.1 Persentase Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	10	Pemeliharaan gedung dan fungsinya Terminal Tipe A Batulinggou Utara	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A	12,9	24,0	150.000.000	100	50,60	0	101,04	0,0	Hasil pemenuhan SPM di Terminal Tipe A : 1. TTA Lasusua Siraja Pelabur, Rasta : 42,5% 2. TTA Lubuk Linggau, Pangsar : 87,5% 3. TTA Pitta Penggawea, Rasi : 55,5%	Melaksanakan pengawasan pemenuhan SPM di Terminal Tipe A	Pemantauan
					Pemeliharaan gedung dan fungsinya Terminal Tipe A Lasusua Siraja Pelabur Rasta	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A			45.000.000	100		0		3,5			
					Pemeliharaan gedung dan fungsinya Terminal Tipe A Lubuk Linggau Pangsar	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A			119.484.000	100		0		4,0			
		IKK 2.2 Persentase Pemenuhan Standar Alasan Terminal Tipe A	%	30	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah penerapan SMART Terminal Tipe A	Penerapan SMART Terminal Tipe A	30	100,0	3.381.365.000	100	98,0	205.109.113	100,00	7,9	Aplikasi SMART Terminal yang sudah dikoneksikan sebelah pelaporan online	Mengaktifkan penggunaan aplikasi SMART terminal lainnya	Lalu Pemantau
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan TDP	%	100	Monitoring pengelolaan dan pengevaluasian pemenuhan	Pemenuhan Pelabuhan TDP yang dilaksanakan pengawasan pemenuhan SPM	Monitoring dan pengevaluasi pemenuhan SPM di Pelabuhan Penyeberangan	24,9	24,9	600.775.000	100	100,0	0	100,00	3,0	Pelaksanaan monitoring SPM Pelabuhan pada bulan Februari 2025	Monitoring SPM sebagaimana diamanahkan sebelum Meta Anggaran 8457AWJ 2025/2026	Pemantauan
3	SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Laut	IKK 3.1 Persentase Terlenggaranya Jalur yang telah terpetakan terhadap seluruh alur	%	100	Perlengkapan Jalur Pelayaran Nasional	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalur	Perlengkapan jalur terpasang	14,9	24,8	15.076.628.800	100	0,0	0	0,00	3,0	Proses pelaksanaan pekerjaan yang dikerjasamakan belum dapat dicairkan dikarenakan anggaran yang tersedia di dalam DIPA belum ditetapkan (Efisiensi Anggaran)	Mesti dilaksanakan koordinasi dengan Dapat Perencanaan dan siap berjalan dilaksanakan pelaksanaan PJ yang sudah terpasang	Lalu
		IKK 3.2 Persentase Terlenggaranya pada UPPKB Unpas, Perhubungan Darat	%	35,04	Operasional Unit Pelaksana Pemerintah Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah pelanggaran pada UPPKB	Pelanggaran pada UPPKB	23,04	100,0	11.467.313.000	100	16,00	884.468.614	130,00	7,0	Penerapan pelanggaran pada di UPPKB pada bulan Januari - Maret 2025 sebesar 16%	Pemanfaatan tersinghat terlinggu berdasarkan yang terlenggar tersedia sedua	Lalu

		IKK 2.3 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	330	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Pekan Nasional)	Jumlah masyarakat tersosialisasi pada Pekan Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0,0	250.000.000	100	0,00	0,00	0,00	0,0	Kesalahan sendiri tidak pernah ada	Pekan Keselamatan Jalan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Tata Usaha
				350	Sadar Lalu Lintas Data Dini (SALUD)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi sadar lalu lintas pada usia dini	Penyelenggaraan Sadar Lalu Lintas Data Dini (SALUD)	20	10,0	107.142.500	100	20,00	0,00	10,00	0,0	Tidak dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Data Dini pada usia anak TKIT Rahmya Bakti Bakaru pada 17 Februari 2025 di Ruang rapat BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Akan dilaksanakan pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Data Dini berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
		IKK 3.a Persentase Pembuktian Pengujian Berkala kendaraan bermotor	%	83	Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah UPPKB terverifikasi	Pemeliharaan peralatan kalibrasi	20,7	24,9	300.000.000	100	0,00	0	0,00	0,0	Realisasi nihil pemeliharaan kalibrasi sensor dan dikan terlaksana, standar pembayaran PNBP	Melaksanakan koordinasi lebih intensif dengan UPPKB yang terkait agar pemeliharaan kalibrasi alat	Sarinah
4	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 3.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pengelolaan Uang kendaraan	Administrasi kendaraan	Pengelolaan administrasi	22,3	25,0	1.838.775.000	100	67,50	1.890.000	75,00	3,3	Hasil Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat (DTD) Kelas II Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1) Kategori waktu pelaksanaan dokumen pemeriksaan dengan nilai 25. 2) Indeks Perbaikan/akurasi A6N dengan nilai 12,5. 3) Tingkat penyerapan anggaran satuan kerja dengan nilai 2,07. 4) Indeks kepuasan pegawai penyelenggaraan perkantoran dengan nilai 27,28	Melaksanakan pemeriksaan penyerapan anggaran dengan memperhatikan efisiensi pada tahun 2025	Tata Usaha
5	SK 5 Meningkatnya Akuntabilitas Dirjen Perhubungan Darat yang Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dirjen Perhubungan Darat	Nilai	85	Operasionalisasi, pemeliharaan kantor	Jumlah fasilitas dan kepuasan pegawai pelayanan	Fasilitas dan kepuasan pegawai pelayanan	21	24,7	2.128.369.000	100	68,67	139.102.584	100,32	4,6	Hasil tingkat penyelenggaraan perkantoran Dirjen Perhubungan Darat adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III dan IV dengan nilai 37,5; 2. Tingkat kepuasan staf dengan nilai 37,37; 3. Tingkat kepuasan fasilitas perkantoran dengan nilai 30	Memastikan seluruh pegawai dapat mengakses tugas dengan baik.	Tata Usaha

Makassar, 11 April 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

Saher, S.T., M.T.
NIP. 19711107 199803 1 006

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN APRIL TAHUN 2025

No	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET SUBKEGIATAN			REALISASI SUBKEGIATAN		CAPAIAN SUBKEGIATAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 1 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat dan Terciptanya Aksesibilitas Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Inspeksi/non Anggaran Jalur Nasional	%	100	Layanan angkutan jalan provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan perkotaan yang dilayani	Layanan angkutan jalan provinsi	93,2	23,2	2.150.029.000	100	27,28	295.964.800	27,28	9,86	Telah dilaksanakan verifikasi dokumen oleh tim verifikasi internal MPTO Kelas II Sulawesi Selatan, sebagaimana Tim verifikasi sebelumnya, hasil verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditindak lanjuti pelaporannya kepada Dewan DKBPC Cabang Makassar	Melakukan/dan verifikasi verifikasi oleh untuk tersebut/selanjutnya	Sarana
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Tipe A dikelola	Pelayanan pada Terminal Tipe A	3	100,0	2.280.360.000	100	0	601.814.200	100,00	26,4	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi sebanyak 3 (tiga) terminal, antara lain : 1. Terminal Tipe A Lestari Maju Pelabuhan Bantaeng 2. Terminal Tipe A Indah Lompoe, Pangkep 3. Terminal Tipe A Perisa Penggawea, Bone	Melakukan/dan Penggerakan TIA sesuai kewenangan yang berlaku	Sarana/Prasa
		IKK 1.4 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperluan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan angkutan penyeberangan pertama penumpang Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan angkutan penyeberangan perintis	93,2	93,2	41.500.968.000	100	68,85	5.194.332.849	68,85	12,6	Pemeliharaan rutin serta pemenuhan target kinerja sesuai aplikasinya	Kapal akan beroperasi sesuai dengan kontrak kerja sesuai aplikasinya	Sarana
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan DLP yang Beroperasi	Lokasi	13	Operasional Pelabuhan Bangeli, Dapora, dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan DLP yang dioperasi	pengoperasian operasional pelabuhan DLP	13	100,0	4.705.611.000	100	11	1.211.320.209	73,33	23,7	Jumlah Pelabuhan DLP yang beroperasi sebanyak 11 Pelabuhan, antara lain : 1. DP Garongkong, DP Biaa, DP Bapa, Pelabuhan Penyeberangan Biaa , 2. Pelabuhan, PP Pamatata, PD Rammalia , PD Bulu, PD Tinanggea, PD Bean Tolaadoko, PP Manasang rammang	Melakukan/dan pengoperasi operasional di ke-11 Pelabuhan Bangeli, Dapora, dan Penyeberangan & Wilayah Kerja MPTO Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50	Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Watampone Baru	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	40,4	80,8	130.000.000	100	90,83	0	181,66	0,0	Hasil pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A : 1. TTA Lestari Maju Bulukumba - Bapa : 42,3% 2. TTA Indah Lompoe, Pangkep : 37,5% 3. TTA Perisa Penggawea, Bone : 52,5%.	Melakukan/dan pengawasan/ pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Prasarana
		Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Lestari Maju Bulukumba Bapa			Pemeliharaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar (Layanan) Minimal SPM) di Terminal Tipe A				45.000.000	100		0		0,0		
		Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Indah Lompoe Pangkep			Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A				124.464.000	100		0		0,0		
		IKK 2.2 Persentase Pelayanan Standar Minimal SMART Terminal Tipe A	%	50	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah penumpang SMART Terminal Tipe A	Penumpang SMART Terminal Tipe A	50	100,0	6.181.363.000	100	50,0	602.814.400	100,00	10,2	Indikator SMART Terminal yang sudah dilaksanakan adalah pelayanan online	Mengoptimalkan pengadaan software SMART terminal layanan	UPT Prasarana
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan DLP	%	100	Monitoring pengelolaan dan pengevaluasi prasarana	Pemenuhan Pelabuhan DLP yang dilaksanakan pengawasan pelaksanaan SPM	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan SPM di Pelabuhan Penyeberangan	0,0	50,0	600.175.000	100	100,0	0	100,00	0,0	Pelaksanaan monitoring SPM Pelabuhan pada bulan Februari 2025	Monitoring SPM selanjutnya dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2025/2026	Prasarana

3	SS. 3 Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah memenuhi standar	%	100	Perlengkapan Jalan (Provinsi, Nasional)	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Perlengkapan jalan terpasang	83,3	33,3	10.070.650.000	100	0,0	0	0,00	0,0	Belum ada pemenuhan standarisasi yang berdampak pada sistem dalam proses administrasi anggaran	Akan tetap melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan secara maksimal dan yang berkesinambungan	Lanjut
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Dapat Ditindaklanjuti Cepat	%	25,5%	Operasional Unit Pelaksana Pengoperasian Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah pelanggaran pada UPPKB	Penanganan pada UPPKB	25,04	100,0	11.447.313.000	100	15,00	2.854.467.134	140,04	22,3	Persentase pelanggaran pada 6 UPPKB pada bulan Januari - Maret 2025 sebesar 100%	Pemeliharaan berkelanjutan sehingga kendaraan yang melanggar semakin berkurang	Lanjut
		IKK 3.3 Jumlah masyarakat yang memandatkan urusan kewenangan transportasi jalan	Orang	750	Penyelenggaraan Bidang Keselamatan Nasional (Provinsi Nasional)	Jumlah masyarakat terosialisasi pada Pekan Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan PKJ Keselamatan Jalan	0	0,0	250.000.000	100	0,00	0,00	0,00	0,0	Sosialisasi masih sedang persiapkan	Pihak Kwartanas Akan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Tata Ulang
				120	Radar Lalu Lintas Ular Dan (RALUD)	Jumlah masyarakat yang terosialisasi radar lalu lintas pada lalu lint	Penyelenggaraan Radar Lalu Lintas Ular Dan (RALUD)	66	33,0	107.142.000	100	36,00	0,00	10,40	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Radar Lalu Lintas Ular Dan pada awal tahun 2025 bertempat di Watampone pada 17 Februari 2025 di Hotel yang rapat UPTD Kelas II Sulawesi Selatan	pelaksanaan sosialisasi Radar Lalu Lintas Ular Dan berikutnya akan disesuaikan dengan jadwal	
		IKK 3.4 Persentase Manajemen Penegakan Berbasis Kecelakaan Berulang	%	85	Aktifitas penaktifan penegakan berbasis kecelakaan berulang	Jumlah UPTD/BPTD terdocilitasi	Penaktifasan penaktifan kelalulintas	27,8	33,3	300.000.000	100	4,30	0	5,04	0,0	UPTD/BPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba Nihil Aktifitas/aktifitas Kalibrasi dan Kalibrasi UPTD/BPTD Dinas Hanya terbatas pelaksanaan PBBT	Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan UPTD/BPTD yang sudah terverifikasi kalau akan berlaku kalibrasi alat ujinya	Stagnan
4	SS. 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Dalam Transportasi Darat	IKK 5.1 Nilai Penyelenggaraan Unit Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	90	Pengadaan bidang keamanan	keamanan dan sekolah	Pengadaan keamanan	30	33,3	1.888.772.000	100	69,91	1.000.000	77,68	0,1	Hasil Kualitas Pelayanan Pelayan Transportasi Darat UPTD Kelas II Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1) Kinerjanya waktu pelaksanaan dokumen permohonan dengan nilai 25. 2) Indeks Profesionalisme ASN dengan nilai 23,5. 3) Tingkat penyerapan anggaran selama kerja dengan nilai 3,67. 4) Indeks kepuasan pegawai penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 17,28	Melaksanakan pemeliharaan penyelesaian anggaran dengan mempertahankan efisiensi pada tahun 2025	Tata Ulang
5	SS. 5 Meningkatnya Kualitas Objek Perhubungan Darat yang Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Objek Perhubungan Darat	Nilai	85	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah tenaga pelayanan pegawai perkantoran	Tunjangan dan kesejahteraan pegawai pelayanan	28	32,9	2.100.000.000	100	83,27	1.750.230.380	100,31	50,0	Hasil tingkat penyelenggaraan perhubungan Objek Perhubungan Darat adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III dan IV dengan nilai 17,9. 2. Tingkat kepuasan staf dengan nilai 17,07. 3. Tingkat kepuasan dalam pelayanan dengan nilai 20	Memastikan seluruh pegawai dapat menyelesaikan tugas dengan baik	Tata Ulang

Mei 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

M.T

NIP. 19680[illegible] 199803 1 008

MONITORING DAN CATATAN AGAR ATAU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II SULAWESI SELATAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET SUASAN				REALISASI SUASAN		CAPAIAN SUASAN		EVALUASI	KENDALA TIDAK CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 1. Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat dan Kelancaran Aksesibilitas Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan Memadai	%	100	Layanan angkutan jalan perintis penumpang berjadwal	Jumlah lintasan angkutan jalan perintis yang disubsidi	Lintasan angkutan jalan perintis	93,3	93,3	2.160.320.000	100	19,00	410.870.720	18,26	12,92	Nihil Gangguan baik layanan kapal dan sekitarnya kondisi di pelabuhan tetap aman	Wawasan dibutuhkan pejabat dan Pemda V	Selesai
		IKK 1.2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Pengawasan	Lokasi	8	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Tipe A disiarkan	Pengawasan pada Terminal Tipe A	3	100,0	6.962.815.000	100	3	4.236.725.032	100,00	30,3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang mengawasi selengkapnya 3 unit pemantau, Makassar, Bau-Bau	Mengkoordinasi pengawasan terhadap operasional	PPK/KSO
																Terminal Tipe A Lantai Bone Pelabuhan, Bau-Bau 2. Terminal Tipe A Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh 3. Terminal Tipe A Terminal Penumpang, Bone	Terminal Tipe A di wilayah kerja BPTD kawasan II Sulawesi Selatan	
		IKK 1.3 Terwujudnya pelaksanaan pelayanan angkutan penyeberangan Sesuai dengan	%	100	Layanan angkutan penyeberangan perintis	Jumlah lintasan angkutan penyeberangan perintis yang disiarkan	Lintasan angkutan penyeberangan perintis	40,7	41,3	43.900.000.000	100	44,23	9.254.303.804	43,23	21,0	Setelah dilakukan pelaksanaan, terdapat 16 penyeberangan lagi, yaitu dari hasil perhitungan target angkutan dilampaikan sejumlah 100 penyeberangan	Perlu ada sosialisasi lagi mengenai penibangan tarif, tapi masih ada, tidak lagi mengikuti penibangan tarif yang ditentukan, tapi ada, dikenal sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan	30/9/22
		IKK 1.4 Jumlah terminal SDP yang beroperasi	Lokasi	13	Operasional Pelabuhan Bongo, Tanah, dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang disiarkan	pengawasan operasional pelabuhan SDP	13	100,0	4.580.811.000	100	12	1.403.877.920	92,00	30,0	Adapun Pelabuhan yang dilaksanakan pengawasan pada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, : 1. Pelabuhan Bantaeng 2. UPT Bontosua 3. PP Bulukumba 4. PP Tanjung 5. Pelabuhan Garongkong 6. PP Selayar 7. PP Biru 8. PP Dare 9. PP Jeneponto 10. PP Pamatata 11. PP Pattumbukang 12. PP Pattumbukang (Pelabuhan pengawasan Operasional) 13. PP Takalarsembe (Pelabuhan pengawasan Operasional) 14. PP Pambarumma 15. PP Pandjalikang (Pelabuhan belum selesai Operasional)	Melakukan koordinasi pengawasan operasional pelabuhan SDP di Wilayah Kerja UPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pelabuhan
2	SK 2. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50	Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Wonomporo Soroa	Pemeliharaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A	0,00	-45,0	100.000.000	100	80,40	0	80,40	0,0	Hasil pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A : 1. TPA Lakessi Parepare Pelabuhan Nusa : 45,5% 2. TPA Bulukumba Pelabuhan Nusa : 37,20% 3. TPA Pantai Penggaweang Bone : 32,5%	Melakukan koordinasi pengawasan pemeliharaan SPM di Terminal Tipe A	Pemeliharaan
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Lasolo Kendari Pelabuhan Kendari	Pemeliharaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A			100.000.000	100		0		0,0			
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Bulukumba Pelabuhan Bulukumba	Pemeliharaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal SPM di Terminal Tipe A			100.000.000	100		0		0,0			

		IKK 2.2	Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe A	%	50	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah penerapan SMART Terminal Tipe A	Terlaksana SMART Terminal Tipe A	50	100,0	7.282.515.000	100	50,0	1.515.975.651	103,00	05,1	Indikator SMART Terminal yang sudah diukur dan sudah terlaksana nilai	Mengacu pada pedoman indikator SMART	Sudah Tercapai
		IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Studi dan Pelayanan Angkutan [SPM] di Pelabuhan HCP	%	100	Rasionalisasi pengelolaan dan pengembalian pemasaran	Persentase Pelaksanaan SDM yang dikembangkan pelayanan prasarana SPM	Rasionalisasi dan pengembalian pemasaran di Pelabuhan Penyeberangan	41,3	41,3	800.773.000	100	100,0	0	100,00	0,0	Pelaksanaan sosialisasi SPM Pelabuhan pada bulan Februari 2025	Masih ada SPM yang belum tersosialisasikan, Mohon Anggaran Tahun 2026	Tidak Tercapai
3	RK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Pelanggaran Jalan yang telah ditindaklanjuti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	Pelanggaran Jalan (Prioritas Nasional)	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti pelanggaran jalan	Ditindaklanjuti pelanggaran	41,3	41,3	17.671.658.000	100	0,0	0	0,00	0,0	Belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya SOP/JUKNIS pelaksanaan penindaklanjutan pelanggaran jalan	Tetap melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara manual dan melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait	Tidak
		IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Sesuai Perkembangan Teknologi	%	20,00	Operasional Unit Pelaksana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah pelanggaran pada UPPKB	Pelanggaran pada UPPKB	20	0,00	14.000.000.000	100	14,00	2.310.000.000	140,00	33,7	Pencapaian Pelanggaran Angkutan Barang pada Januari 2025	Rekomendasi Pengadaan Jembatan timbang	Tidak
		IKK 3.3	Jumlah rambu-rambu yang terpasang pada ruas jalan	Unit	750	Pemasangan Rambu Keselamatan Bermotor (Prioritas Nasional)	Jumlah rambu yang terpasang pada ruas jalan Nasional Kewenangan Pusat	Pengadaan dan pemasangan rambu keselamatan jalan	0	0,0	250.000.000	100	0,00	0,00	0,00	0,0	Rambu belum terpasang	Pihak Kecelakaan Jalan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Tidak Tercapai
					250	Sarana Lalu Lintas Jalan Darat (SKLJD)	Jumlah sarana yang terpasang pada ruas jalan pada satu titik	Pengadaan dan pemasangan Sarana Lalu Lintas Jalan Darat (SKLJD)	75	30,0	297.342.000	100	40,00	0,00	133,33	0,0	Pihak pelaksana akan melakukan pengadaan pada bulan Juni 2025 pada saat acara TEST Infrastruktur Bhakti pada 17 Februari 2025 di Kampung BPSDP Jasa di Bekasi Selatan	Akan dilaksanakan pengadaan pada bulan Juni Lalin Lintas Darat Dan melakukan koordinasi dengan UPPKB	Tidak Tercapai
		IKK 3.4	Persentase Pemeriksaan Penggunaan Kendaraan Bermotor	%	80	Kendaraan yang telah diperiksa sesuai standar keselamatan	Jumlah kendaraan yang diperiksa	Pemeriksaan kendaraan	20	10,0	300.000.000	100	8,00	0	80,00	0,0	Belum dilaksanakan dikarenakan belum ada SOP/JUKNIS pelaksanaan	Proses Pembentukan Unit/Balai UPPKB di Kabupaten Bekasi	Tidak
4	RK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Transportasi Darat	IKK 4.1	Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Transportasi Darat	Nilai	80	Pengelolaan Sarana Terminal	Terlaksananya pengelolaan	Terpeliharanya sarana/fasilitas	57,8	45,7	1.000.775.000	100	78,72	1.500.000	98,44	2,1	Hasil kualitas Pelayanan Publik Transportasi Darat (IKPTD) Kelas II Nasional mencapai nilai sebesar sebagai berikut : a. Kategori waktu pelayanan dengan perolehan Angka 100,00, b. Indeks Perilaku adalah 80,00 dengan nilai 21,5 (3) Tingkat penyelesaian anggaran sebesar 0,00 [4] Indeks kepuasan pegawai penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 37,30	Pengelolaan anggaran dengan pemeliharaan dan pengelolaan sebesar Rp 0	Tidak Tercapai

3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN JUNI TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	%	100	Layanan angkutan jalan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan perintis yang dilayani	Layanan angkutan jalan perintis	49,8	49,8	3.163.029.000	100	39,51	509.638.124	29,51	16,11	Capaian ritase sampai dengan bulan juni sebesar 29,51%	Verifikasi bulan Juli, pembayaran termin VII	Sarana
		IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Beroperasi	Lokasi	3	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Tipe A dikelola	Pelayanan pada Terminal Tipe A	3	100,0	3.363.915.000	100	3	1.374.676.218	100,00	40,9	1. TTA Lateni Sesau Pekkae Barru 2. TTA Indak Lumpue, Parepare 3. TTA Petta Ponggawae, Bone	Melakukan pengawasan operasional terhadap terminal yang beroperasi	Prasarana
		IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Layanan angkutan penyeberangan perintis provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lintasan angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan angkutan penyeberangan perintis	49,8	49,8	41.600.968.000	100	58,17	11.148.152.596	58,17	26,8	Rata-rata hasil capaian realisasi trip sebesar 58,17% sesuai target trip tahunan	Memenuhi atau menjalankan trip sesuai dengan kontrak	Sarana
		IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	15	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jumlah pelabuhan SDP yang dilayani	pengawasan operasional pelabuhan SDP	15	100,0	4.690.012.000	100	11	1.661.639.784	73,33	35,4	11 Pelabuhan beroperasi, 4 pelabuhan belum beroperasi	Mengoperasikan pelabuhan yang sudah selesai dibangun	Prasarana
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	50	Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Watampone Bone	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	24,6	49,2	130.000.000	100	50,83	0	101,66	0,0	1. TTA Lateni Sesau Pekkae, Barru = 42,5% 2. TTA Indak Lumpue, Parepare = 57,5% 3. TTA Petta Ponggawai, Bone = 52,5%	Melaksanakan SPM Sebelum masa angkutan NATARU 2025/2026	Prasarana
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Lateni Sesau Pekkae Barru	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			100.000.000	100		0		0,0		
					Pemeliharaan gedung dan bangunan Terminal Tipe A Indak Lumpue Parepare	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			169.464.000	100		0		0,0		

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe A	%	50	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah penerapan SMART Terminal Tipe A	Penerapan SMART Terminal Tipe A	50	100,0	3.362.915.000	100	50,0	1.374.676.218	100,00	40,9	Indikator yang terpenuhi hanya pelaporan data produksi secara online	Mengusulkan pengadaan indikator yang belum terpenuhi	Lalin Perasrana
		IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	Monitoring pengelolaan dan pengendalian perasrana	Persentase Pelabuhan SDP yang dilaksanakan pengawasan pemenuhan SPM	Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM di Pelabuhan Penyeberangan	40,8	40,8	890.775.000	100	100,0	0	100,00	0,0	Penevilesaan SPM terakhir pada bulan juni 2025 pada 15 lokasi Pelabuhan SDP	Melaksanakan pemeriksaan SPM Pelabuhan sebelum masa angkutan nataru 2025/2026	Prasarana
3	SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase Peningkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Peningkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Jumlah pengadaan dan pemasangan peningkapan jalan	Peningkapan jalan terpasang	40,8	40,8	15.076.665.000	100	0,0	0	0,00	0,0	Sedang dilakukan efisiensi dan telah dilakukan USULAN relokasi pemasangan peningkapan jalan	Tetap melakukan pemeliharaan secara mandiri dan melakukan koordinasi untuk melakukan relokasi	Lalin
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	25,04	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah pelanggaran pada UPPKB	Pelanggaran pada UPPKB	25	99,8	11.500.963.000	100	13,16	2.675.298.683	147,36	23,3	Presentase Pelanggaran Angkutan Barang pada 8 UPPKB	Melaksanakan Penegakan hukum secara maksimal	Lalin
		IKK 3.3 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)	Jumlah masyarakat sosialisasi pada Pekan Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0,0	250.000.000	100	0,00	0,00	0,00	0,0	Masih tahap perencanaan	Pekan Keselamatan Jalan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	Tata Usaha
				250	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi sadar lalu lintas pada usia dini	Penyelenggaraan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	100	40,0	107.112.000	100	26,00	0,00	10,40	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini pada anak-anak TKIT Raihaya Baitul Makmur pada 17 Februari 2025 di Ruang rapat BPTD Kelas II Sulawesi	Akan dilaksanakan peningkatan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berdasarkan evaluasi terakhir pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
		IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	83	Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah UPUBKB terakreditasi	Peralihasan peralatan kalibrasi	39,6	47,7	330.000.000	100	8,30	0	10,00	0,0	Tidak ada pelaksanaan kalibrasi di Bulan Juni	Kalibrasi Dishub Kab. Bone	Sarana

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	Pengelolaan bidang ketatausahaan	ketatausahaan terlaksana	Pengelolaan ketatausahaan	45	50,0	1.858.775.000	100	73,69	1.390.000	81,88	0,1	Hasil Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat BPTD Kelas II Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1) Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan dengan nilai 25. (2) Indeks Profesionalisme ASN dengan nilai 21,5. (3) Tingkat penyerapan anggaran semua kerja dengan nilai 9,81. (4) Indeks kepuasan pegawai penyelenggaraan perkantoran	Penyerapan anggaran dengan memerhatikan efisiensi pada tahun 2025	Tata Usaha
5	SK 5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah fasilitas dan kepuasan pegawai perkantoran	Fasilitas dan kepuasan pegawai perkantoran	42	49,4	3.158.308.000	100	85,27	487.737,592	100,32	15,4	Hasil tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III dan IV dengan nilai 17,9; 2. Tingkat kepuasan staf dengan nilai 17,37; 3. Tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran dengan nilai 50	Memastikan seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik.	Tata Usaha

Makassar, 23 Juli 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi

Selatan

Bambang, S.T., M.T

NIP. 19711009 199803 1 008

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN JUNI TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(a)	(b)	(c)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Rit/unit	1609,3	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek	668,5	39,8	3.163.029.000	100	584	509.638.124	39,86	16,11	Rit realisasi sampai dengan bulan juli 2025	Verifikasi PME extra darat bulan agustus, penyelesaian termin VIII	Semua
2	SK 3	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4156	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Perintis Trayek Transportasi Angkutan ASDP	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	2526	60,8	41.920.968.000	100	2.326	11.148.132.996	60,79	25,6	Presentase trip terrealisasi sampai dengan Bulan Juli 2025	Merealisasikan trip sesuai dengan target trip tahun 2025	Semua
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	3	100,0	1.617.947.000	100	3	480.087.394	100,00	48,0	1. TPA Lateni Sesuai Pelikan, Ilustrasi 2. TPA Imbak Lompoe, Ilustrasi 3. TPA Petta Pongpongi, Ilustrasi	Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan SPM di terminal-terminal tersebut	Prasarana
							2). Operasional Terminal Tipe A Lateni Sesuai Pelikan	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			774.664.000	100		296.170.459		38,2			
							3). Operasional Terminal Tipe A Imbak Lompoe	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			1.370.304.000	100		628.347.722		40,0			
		IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Perimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Unit	8	Unit Pelaksana Perimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Perimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Perimbangan Kendaraan Bermotor	8	100,0	11.300.963.000	100	8	3.046.047.209	100,00	26,9	1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Soroba Opu 3. UPPKB Pallangga 4. UPPKB Datae 5. UPPKB Tana Ilatuo 6. UPPKB Rajoangin 7. UPPKB Lanrangpang 8. UPPKB Wahoreng	Melaksanakan pengawasan operasional UPPKB tersebut	Prasarana
		IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Tugas dan Pokok	2	50,0	800.773.000	100	2	0	50,00	0,0	Melakukan Monitoring Pelayanan Tugas dan Pokok	Meningkatkan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Tata Usaha
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	10	100,0	1.089.669.000	100	6	585.712.355	60	54,0	1. PP Bajoe 2. PP Biru 3. PP Garongkong 4. PP Pamatata 5. PP Pattimbulilin 6. PP Siwa 7. PP Tahalanrutate (Belum ada personil, operasional masih di laut) 8. PP Pasimarannu (Belum ada personil, operasional masih di laut) 9. PP Pankalbeteng (Belum ada personil, operasional masih di laut) 10. PP Bantaeanggo (Belum di bangun)	Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan SPM di setiap pelabuhan	Prasarana
							2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			917.525.000	100		363.119.419		63,0			
							3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			450.888.000	100		178.400.064		39,1			
							4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Biru	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			601.112.000	100		184.307.744		30,7			
							5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Biru (PP Pamatata)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			251.428.000	100		58.164.848		16,6			

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
						6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Patumbukung)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			264.379.000	100		83.282.018		31,5			
						7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasilaccibessi)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			112.500.000	100		0		0,0			
						8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarannu)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.000	100		0		0,0			
						9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Tekaloborata)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.000	100		0		0,0			
						10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Passimarenggi)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			66.030.000	100		0		0,0			
		IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Bantaeng-pattenang)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	5	100,0	129.420.000	100	5	35.809.000	100	27,7	1. PB Bantaeng-pattenang 2. PD Tinanrpu 3. PD Besu Tokalimbo 4. PD Sorowako 5. PD Buha	Melaksanakan pengawasan pemenuhan SPM di setiap pelabuhan sungai dan danau	Pemerintah
						2). Operasional Pelabuhan Danau Sorowako	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			478.199.000	100		187.053.629		39,1			
						3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sorowako (PD Buha)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			72.721.000	100		0		0,0			
						4). Operasional Pelabuhan Danau Tinanrpu	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			384.837.000	100		155.636.657		40,4			
						5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Tinanrpu (PD Tokalimbo Besu)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			50.158.000	100		0		0,0			
		IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2	Pemeliharaan Local Fort Service (LFS)	Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	1	50,0	100.000.000	100	1	0	50	0,0	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Periode Januari-Juli 2023	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan	Lalin
3	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional ASAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Pengawasan Operasional ASAP, AJAP, dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan operasional ASAP, AJAP, dan Pariwisata di	1	50,0	147.400.000	100	1	0	50,00	0,0	Penyelenggaraan Pengawasan Operasional Angkutan Orang	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang	Lalin
		IKK 9.3	Jumlah fasilitas pemerbengin yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung kenelancaran	Lokasi	8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilimba	Kegiatan Operasional Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	100,0	11.502.065.000	100	8	3.046.047.209	100,00	26,5	Persentase Pelanggaran dari Bulan Januari - Juli 2023 sudah mengalami penurunan	Pelaksanaan Penegakan Hukum yang lebih optimal	Lalin

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
		IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Pengawasan Operasional Bengkel Karoseri	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	2	40,0	822.105.000	100	0	0	0,00	0,0	Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Meningkatkan Pengawasan pada bengkel karoseri	Lalfin
8	SK 10 Meningkatnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Menerapkan Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Penerbitan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	Penerbitan Rekomendasi Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Penerbitan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	7	58,3	68.700.000	100	7	0,0	58,33	0,0	Terlaksanannya kegiatan penerbitan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman pada Bulan Januari sampai Bulan Juli 2025	Pelaksanaan kegiatan penerbitan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman pada Bulan Agustus 2025	Seksie
		IKE 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala Di Daerah	Kegiatan	10	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala	Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	6	60,0	68.700.000	100	6	0	60,00	0,0	Pada bulan juli terdapat 4 kegiatan kalibrasi alat uji	Kegiatan Kalibrasi di Dishub Kab Takalar	Seksie
		IKE 10.4	Jumlah Alat Pengujian berbasis yang terintegrasi blue full cycle	Kegiatan	5	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	1	20,0	330.000.000	100	1	0	20,00	0,0	Laporan indikator kinerja kegiatan 10.4 Bulan Juli	Bimbingan dan monitoring lebih lanjut terkait lanjutan UPUEKD di Sulawesi Selatan	Seksie
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude penggguna jalan ber-kendaraan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak Guru Atau Pendamping Sesuai Peluang Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Peluang di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah masyarakat TersosialisasI pada Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	30	60,0	107.142.000	100	20	0	52,00	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini pada anak-anak TKIT Rullanya Bantul Makassar pada 17 Februari 2025 di Ruang rapat BPTD Kelas II Sulawesi	Akan dilaksanakan peningkatan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berkesinambungan evaluasi modifikasi pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
6	SK 9 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 9.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Penyusunan RKKL, Pagu Kebutuhan, Indikatif, dan Alokasi	Dokumen Pelaporan	2	66,7	100.000.000	100	2	0	66,67	0,0	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Monitring Capaian Kinerja Triwulan II	Dilaksanakan pemantauan perbulan dengan Monitoring Rencana Aksi	Tata Usaha
		IKK 9.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Dokumen Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	2	40,0	1.858.775.000	100	2	1.990.000	40,00	0,1	Pelaporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Melaporkan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Semua	Tata Usaha
		IKK 9.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Penyusunan SPIP dan Penyusunan Dokumen MR	Dokumen Laporan SPIP dan Dokumen MR	1	50,0	1.858.775.000	100	2	1.990.000	100,00	0,1	Pelaporan Dokumen SPIP	Melaporkan Dokumen SPIP sesuai dengan jadwal	Tata Usaha
		IKK 9.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	Laporan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	1	100,0	147.400.000	100	1	0	100,00	0,0	Melaksikan Tindak lanjut Rekomendasi Audit	Mencocokan Rekomendasi Tindak Lanjut	Tata Usaha
		IKK 9.6	Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Dokumen Laporan/Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	1	50,0	68.700.000	100	1	0	50,00	0,0	Melaksikan Monitoring dan Pengawasan Aset	Meningkatkan Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Aset	Tata Usaha
		IKK 9.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	Pengadaan peralatan pendukung kearsipan	Kegiatan layanan perkantoran	Dokumen Laporan Digitalisasi Arsip	1	100,0	134.000.000	100	1	0	100,00	0,0	Memonitoring Arsip Surat Keluar Pada Bagian Sub Tata Usaha	Melaksikan Kegiatan Penyimpan Surat Keluar Pada Aplikasi SRIKANDI Setiap Bulan	Tata Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaporan Dokumen Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	2	40,0	115.771.809.000	100	2	0	40,00	0,0	Barang dan Jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan	Melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku	Tata Usaha
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	Gaji dan Tunjangan	Kegiatan terkait Pengembangan SDM Unit Kerja	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Unit Kerja	7	58,3	30.441.324.000	100	7	15.556.167.340	58,33	51,1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Tata Usaha
		IKK 4.11 Kegiatan pembinaan Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Monitoring Kegiatan pembangunan ZI/WBK/WBBM	1	100,0	4.304.043.000	100	1	2.599.087.280	100,00	63,4	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan Pengisian Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) pada Aplikasi	Tata Usaha

Makassar, 05 Agustus 2025

Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

Jufriadi Nur, S.T., M.T
NIP. 19711007 199803 1 008

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET SULARAN			REALISASI SULARAN		CAPAIAN SULARAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Rtrip	1999	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek	998.5	50.0	3.163.029.000	100	564	881.833.931	56,47	27,9	Dokumen dan laporan untuk verifikasi bulan agustus telah diverifikasi oleh DAMRI	Verifikasi dokumen untuk termin VIII dan pembayaran termin VIII	Sarana
2	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3999	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Perintis Trayek Transportasi Angkutan ASDP	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	2541	67,6	41.400.868.000	100	2.818	30.198.431.814	72,18	48,2	Presentase Realisasi Trip sampai dengan agustus 2025	Angkutan penyeberangan perintis realisasi sesuai dengan target trip di tahun 2025	Sarana
3	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	3	100,0	1.017.647.000	100	3	826.287.304	100,00	81,9	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM dilakukan pada 3 TTA yaitu : 1. TTA Lasoni Sesoe Pelikan, 2. TTA terbik Luwuk Pamparo, 3. TTA Pelni Penggaweai Bone	Peningkatan dalam rangka Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM yang dilakukan pada 3 TTA yaitu : 1. TTA Lasoni Sesoe Pelikan, 2. TTA terbik Luwuk Pamparo, 3. TTA Pelni Penggawai Bone	Prasarana
						2). Operasional Terminal Tipe A Lasoni Sesoe Pelikan	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			774.664.000	100		628.631.439		42,4			
						3). Operasional Terminal Tipe A terbik Luwuk	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			1.970.269.000	100		730.926.492		86,0			
		IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bertaraf sesuai SPM	Unit	8	Unit Pelaksana Pembangun Bersharan Bermotor (UPPKB) diSelda	Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bermotor (UPPKB) diSelda	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bermotor sesuai SPM	8	100,0	11.500.963.000	100	8	3.404.040.619	100,00	29,6	1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Sumba Opu 3. UPPKB Pallangga 4. UPPKB Dasoi 5. UPPKB Tana Beru 6. UPPKB Bajoangin 7. UPPKB Larompong 8. UPPKB Watansoreng	Peningkatan Operasional Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bermotor sesuai SPM dengan jumlah UPPKB 8 yang beroperasi	Prasarana
		IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Tugas dan Pokok	2	50,0	890.775.000	100	2	0	50,00	0,0	Telah Dilaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan II (periode bulan April s.d Juni 2025)	Akan Melaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan III	Tata Usaha
4	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	10	100,0	1.084.698.000	100	7	670.222.405	50	61,8	1. PP Bajoe 2. PP Biru 3. PP Garongkong 4. PP Pamatata 5. PP Pattumbukan 6. PP Siwa 7. PP Takabanarate (Belum ada personil, operasional masih di laut) 8. PP Pasimasunggu (Belum ada personil, operasional masih di laut) 9. PP Pasilambena (Belum ada personil, operasional masih di laut) 10. PP Pasimarannggu (Belum di beroperasi	Peningkatan dalam Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM ada 7 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi dari 8 pelabuhan penyeberangan yang belum beroperasi dengan catatan terbanjir	Prasarana
						2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			417.520.000	100		280.000.038		67,1			
						3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			455.868.000	100		187.917.568		41,2			
						4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Biru	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			601.112.000	100		200.200.003		33,3			

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ibra (PP Pamatata)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			551.428.000	100		64.728.316		18,4			
					4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ibra (PP Parumbukang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			264.378.000	100		96.354.018		36,4			
					7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ibra (PP Pasilambena)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			113.500.000	100		8.030.000		7,1			
					8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ibra (PP Pasimasunggu)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.500.000	100		2.920.000		2,7			
					9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ibra (PP Talabonrarang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.000	100		5.110.000		4,8			
					10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ibra (PP Pasarangnggal	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			66.030.000	100		3.650.000		5,5			
	IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Pantaingpatenteng)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			129.420.000	100		38.512.000		29,8	1. PS Pantaing-pantaing 2. PD Timangu 3. PD Siwa Tuleskabo 4. PD Sowaulo 5. PD Suha	Peningkatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM yang dilakukan pada 5 Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemusatan
					2). Operasional Pelabuhan Danau Sowaulo	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			478.190.000	100		220.454.145		46,1			
					5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sowaulo (PD Suha)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	5	100,0	72.721.000	100	5	33.066.000	100	45,5			
					6). Operasional Pelabuhan Danau Timangu	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			384.837.000	100		166.147.030		43,2			
					10). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Timangu (PD Tuleskabo Siwa)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			56.108.000	100		30.660.000		54,6			
	IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	1	50,0	100.000.000	100	1	0	50	0,0	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Periode Januari-Agustus 2025	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan	Lain
5	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AASP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Pengawasan Operasional AASP, AJAP, dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan operasional AASP, AJAP, dan Pariwisata di	1	50,0	147.400.000	100	2	0	100,00	0,0	Pendataan Rendaman Angkutan orang yang di lakukan di 3 Lokasi Terminal yang ada di wilayah kerja SPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Menyelesaikan pemeriksaan kelengkapan dan dokumen pada Angkutan Orang	Lain

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penyeberangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung konektivitas	Lokasi	8	Unit Pelaksana Penyebrangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Kegiatan Operasional Fasilitas Penyebrangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah Unit Pelaksana Penyebrangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	100,0	11.000.963.000	100	8	2.404.040.414	100,00	29,0	Pemeliharaan pengadaan kuncian angkutan barang pada 8 UPPKB	Memerintahkan pelanggaran kendaraan angkutan barang dan meningkatkan pemindahan kuncian pada angkutan barang yang melanggar	Lalin
		IKK 9.4 Jumlah kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5	Pengawasan Operasional Bengkel Karoseri	Pengawasan Operasional Bengkel Karoseri	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	2	40,0	922.105.000	100	0	0	0,00	0,0	Tidak terlaksananya kegiatan pengawasan Bengkel Karoseri di karenakan Anggaran Terblokir	Terlaksananya pengajuan tangerang ke Bengkel Karoseri	Lalin
6	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Aspek dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Peforma	Kegiatan	13	Pemeriksaan kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	8	66,7	68.500.000	100	8	0	66,67	0,0	Terlaksanannya kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman pada Bulan Januari sampai Bulan Agustus 2025	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman pada Bulan September 2025	Seksi
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala	Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	7	70,0	68.700.000	100	6	0	60,00	0,0	Pada bulan Agustus tidak ada kegiatan kalibrasi	Kalibrasi Kab. Yalimo dan Kab. Lowu Timur	Seksi
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berkala yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	1	20,0	530.060.000	100	1	0	20,00	0,0	Persentase Jumlah UPUBKB yang Menerapkan BLUe Fullcycle di lingkungan BPTD Kelas II Sulawesi Selatan sampai Bulan Agustus 2025 sebesar 20%	Perlu koordinasi UPUBKB terkait penerapan BLUe Fullcycle melalui koordinasi dan update data menerapkan penagihan	Sarana
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengawas Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Peloton Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	80	Penyelenggaraan Kegiatan Satlur Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Peloton di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah masyarakat Tersosialisasi pada kegiatan Satlur Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	35	70,0	107.142.000	100	26	0	52,00	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Satlur Lalu Lintas Usia Dini pada anak-anak TKIT Raffaya Sertul Makassar pada 17 Februari 2025 di Ruang rapat BPTD Kelas II Sulawesi	Agar dilaksanakan peningkatan pelaksanaan sosialisasi Satlur Lalu Lintas Usia Dini berkesinambungan evaluasi terhadap pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
8	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1 Kegiatan Pemeliharaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Penyusunan RKAL Pagu Kebutuhan, Indikatif, dan Alokasi	Dokumen Pelaporan	2	66,7	100.000.000	100	2	0	66,67	0,0	Catatan Pagu Kebutuhan dan Indikatif	Penyusunan RKA Pagu Alokasi	Tata Usaha
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Dokumen Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	2	40,0	1.858.775.000	100	2	1.300.000	40,00	0,1	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II	Dilaksanakan pemantauan perbulan dengan Monitoring Rencana Aksi	Tata Usaha
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Penyusunan SPIP dan Penyusunan Dokumen MR	Dokumen Laporan SPIP dan Dokumen MR	1	50,0	1.858.775.000	100	2	1.300.000	100,00	0,1	Laporan Triwulan I dan II SPI serta Siviau Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025	Laporan Triwulan III Manajemen Risiko (MR)	Tata Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	Laporan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	1	100,0	147.400.000	100	1	1	100,00	0,0	Berita acara audit fisik pada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Monitoring dan Tindak Lanjut Audit BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Tata Usaha
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Dilpen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Dokumen LaporanUrusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	1	50,0	68.700.000	100	1	1	50,00	0,0	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 1	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 2	Tata Usaha
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	Pengadaan peralatan pendukung kehumasan	Kegiatan layanan perkantoran	Dokumen Laporan Digitalisasi Arsip	1	100,0	134.000.000	100	1	1	100,00	0,0	Pengarsipan Surat Keluar Dokus Agustus	Pengarsipan Surat Keluar Bulan September	Tata Usaha
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaporan Dokumen Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	3	60,0	116.771.809.000	100	4	4	80,00	0,0	Laporan Strangka Acuan Kerja (KAK)	Monitoring dan Pelaporan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Tata Usaha
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	Gaji dan Tunjangan	Kegiatan terkait Pengembangan SDM Unit Kerja	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Unit Kerja	8	66,7	30.441.524.000	100	9	21.166.372.468	75,00	69,5	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Dokus September	Tata Usaha
		IKK 4.11 Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Monitoring Kegiatan pembangunan SI/WBK/WBBM	1	100,0	4.104.043.000	100	1	2.744.737.280	100,00	66,9	Peningkatan SDM dan Fasilitas Operasional UPPKB Maccopa Dalam Mendukung Sistem Informasi Pelaporan Kendaraan dan Muatan Angkutan Barang Menuju Zona Integritas WBK/WBBM	Peningkatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di UPPKB Maccopa	Tata Usaha

Makassar, 03 September 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan

Bahar, S.T., MT
NIP. 19711007 199803 1 008

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SS. 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1094	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek	1078,5	60,7	3.163.029.300	100	957	88.1.653.751	50,09	27,9	Capaian Kinerja Sampai Septembar 2025 sebanyak 957 rit	Verifikasi Dokumen Sampai Bulan Oktober	Sarana
2	SS. 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3004	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Perintis Trayek Transportasi Angkutan ASDP	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	2504	75,2	41.930.968.000	100	2.029	22136.389.922	77,06	52,8	Presentase Realisasi Trip sampai dengan September 2025	Anggaran penyeberangan perintis realisasi sesuai dengan target trip di tahun 2025	Sarana
3	SS. 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	3	100,0	1.017.047.000	100	3	347.746.124	100,00	33,8	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM dilaksanakan pada 3 TTA yaitu : 1. TTA Latemi Sesuai Pelkhar, 2. TTA Induk Lompoa Pasapare, 3. TTA Pelita Penggawai Baru	Melaksanakan pendataan dan pengawasan terhadap operasional Terminal Tipe A di lingkungan Wilayah DPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
					2). Operasional Terminal Tipe A Latemi Sesuai Pelkhar	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			774.664.000	100		351.086.274		45,3			
					3). Operasional Terminal Tipe A Induk Lompoa	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			1.570.304.000	100		775.122.287		49,4			
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Unit	8	Unit Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	8	100,0	11.300.953.000	100	8	3.879.976.204	100,00	33,7	1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Sentra Opu 3. UPPKB Pallinggia 4. UPPKB Datae 5. UPPKB Tana Batue 6. UPPKB Sajoangin 7. UPPKB Lawonpong 8. UPPKB Walenrang	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional UPPKB di wilayah kerja DPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Tugas dan Pokok	3	75,0	890.775.000	100	3	0	75,00	0,0	Telah Dilaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan II (periode bulan April s.d Juni 2025)	Akan Melaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan III	Tata Usaha
4	SS. 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 4.3 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	10	100,0	1.084.608.000	100	6	735.314.816	60	67,8	1. PP Garonggong 2. PP Siwa 3. PP Bajoe 4. PP Ulra 5. PP Pamanato 6. PP Pattumbukkang 4 Pelabuhan lokasi berpencar 1. PP Tolubonronge 2. PP Pasimarannu 3. PP Pasimassunggu 4. PP Pasilambena	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional pelabuhan penyeberangan di wilayah kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
					2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			417.923.000	100		293.500.136		70,3			
					3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garonggong)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			455.888.000	100		202.804.411		44,5			
					4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Ilira	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			601.112.000	100		218.339.983		36,3			
					5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ilira (PP Pamanato)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			351.429.000	100		74.123.898		21,1			

MONITORING SECARA ANSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PE	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ilira (PP Tanamalanang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			264.378.008	100		303.192.018		39,0			
					7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ilira (PP Pasilambena)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			112.500.008	100		8.500.000		7,1			
					8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ilira (PP Pasimarannu)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.008	100		2.920.000		2,7			
					9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ilira (PP Tolitoliversus)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.008	100		5.110.000		4,8			
					10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Ilira (PP Pasimasunggu)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			56.050.000	100		3.450.000		3,5			
	IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajo (PS Barawang-rammang)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			120.420.000	100		40.501.000		31,3	1. PS Barawang-rammang 2. PD Sorowako 3. PD Nuha 4. PD Timunyu 5. PD Beau Tolodoho	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional pelabuhan sungai dan danau di wilayah kerja BPTD kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
					2). Operasional Pelabuhan Danau Sorowako	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			478.199.000	100		229.362.643		48,0			
					3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sorowako (PD Nuha)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	3	100,0	72.721.000	100	3	33.066.000	100	45,5			
					4). Operasional Pelabuhan Danau Tanasipu	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			384.837.000	100		177.184.130		46,0			
					5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Tanasipu (PD Tolitoliversus)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			56.158.000	100		30.660.000		54,6			
	IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	1	50,0	100.000.000	100	1	0	50	0,0	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Periode Januari-September 2025	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan	Lalin
5	SK 9 : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberang dan Barang	IKK 9.1 : Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di	1	50,0	147.400.000	150	2	94.873.450	100,00	87,6	Pengawasan Operasional dilaksakan di 3 Lokasi yaitu 1. Terminal Induk Lompoe 2. Terminal Lanuni Sesau Pekkae 3. Terminal Porta Punggawae	Akan dilaksanakan pengawasan yang lebih terhadap kelengkapan utama kerja utama dan sarana penunjang untuk keselamatan penyeberang	Lalin

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
									VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(a)	(b)	(c)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
		IKK 9.3	Jumlah fasilitas pemberhentian yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	8	Unit Pelaksana Pemberhentian Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Kegiatan Operasional Fasilitas Pemberhentian Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah Unit Pelaksana Pemberhentian Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	100,0	11.300.963.000	100	8	3.879.079.209	100,00	33,7	Fasilitas Pemberhentian Yang Di Bangun Dan Dioperasikan Untuk Mendukung Keselamatan ada 8 UPPKB yaitu Maccopa, Dutse, Sombaopu, Pallangga, Sajoanging, Lawanjeng, Wakunang, dan Tanahbetor	Pengawasan terhadap optimalnya UPPKB dalam mendukung keselamatan angkutan barang	Lalin
		IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	5	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Pengawasan Operasional Bengkel Karoseri	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	3	60,0	922.105.000	100	0	0	0,00	0,0	Tidak dilaksanakan kegiatan demikian, dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran	Diharapkan kegiatan ini dapat dialokasikan jika anggaran telah di buka	Lalin
6	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	12	Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	9	75,0	66.700.000	100	9	0	75,00	0,0	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor Bulan September	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor Bulan Oktober	Sarana
		IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berbasis di Daerah	Kegiatan	10	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berbasis	Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Berbasis di Daerah	7	70,0	66.700.000	100	6	0	60,00	0,0	Kegiatan kalibrasi belum ada penambahan pada bulan September	Bulan Oktober akan dilaksanakan penambahan terhadap alat kalibrasi BPTD	Sarana
		IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berbasis yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	2	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	1	60,0	330.000.000	100	1	0	20,00	0,0	Alat pengujian belum memenuhi standar	Monitoring terlebih lanjut penerapan penerapan BLUe Fullcycle	Sarana
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude penggunaan jalan berkeselamatan	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	30	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Pedoman di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah masyarakat Tersosialisasi pada Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	26	78,0	107.142.000	100	26	0	52,00	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini pada anak-anak TKIT Raffaaya Batua Makassar pada 17 Februari 2025 di Ruang rapat BPTD Kelas II Sulawesi	Akan dilaksanakan peningkatan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berdasarkan evaluasi terakhir pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
8	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kegiatan Pencerminan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan Dokumen Penyelarasan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Penyusunan RKAL Pagu Kebutuhan, Indikatif, dan Alokasi	Dokumen Pelaporan	3	100,0	100.000.000	100	2	0	66,67	0,0	Catatan Pagu Kebutuhan dan Indikatif	Penyusunan RKA Pagu Alokasi	Tata Usaha
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Dokumen Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	3	60,0	1.858.775.000	100	2	1.390.000	40,00	0,1	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Monitring Capaian Kinerja Triwulan II	Penyusunan Laporan Monitring Capaian Kinerja Triwulan III	Tata Usaha
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Materitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Penyusunan SPIP dan Penyusunan Dokumen MR	Dokumen Laporan SPIP dan Dokumen MR	1	50,0	1.858.775.000	100	2	1.390.000	100,00	0,1	Laporan Triwulan I dan II MR serta Kertas Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025	Laporan Triwulan III Manajemen Risiko (MR)	Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PE	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	Laporan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	1	100,0	147.400.000	100	1	0	100,00	0,0	Berita acara audit fisik pada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Monitoring dan Tindak Lanjut Audit BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Tata Usaha
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Dokumen LaporanUrusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	1	50,0	58.700.000	100	1	0	50,00	0,0	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 1	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 2	Tata Usaha
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	Pengadaan peralatan pendukung kehumasan	Kegiatan laporan perkantoran	Dokumen Laporan Digitalisasi Arsip	1	100,0	134.000.000	100	1	0	100,00	0,0	Pengarsipan Surat Keluar Bulan September	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Oktober	Tata Usaha
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaporan Dokumen Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	3	60,0	116.771.869.000	100	4	0	80,00	0,0	Laporan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Monitoring dan Pelaporan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Tata Usaha
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	Gaji dan Tunjangan	Kegiatan terkait Pengembangan SDM Unit Kerja	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Unit Kerja	9	75,0	30.441.524.000	100	10	24.105.424.020	83,33	79,2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober	Tata Usaha
		IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Monitoring Kegiatan pembangunan ZI/WBK/WBBM	1	100,0	4.109.043.000	100	1	2.888.936.630	100,00	70,4	Peninghatan SDM dan Fasilitas Operasional UPPKB Maccopa Dalam Mendukung Sistem Informasi Pendataan Kendaraan dan Muatan Angkutan Barang Menuju Zona Integritas WBK/WBBM	Peninghatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di UPPKB Maccopa	Tata Usaha

Makassar, 06 Oktober 2025

Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.St.T., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN OKTOBER TAHUN 2020

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
										VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1896	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek	1248,3	72,7	5.163.000.000	100	985	987.766.572	58,21	32,5	Capaian ritase sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar 58,21%	Pembayaran ritase K bulan Oktober, Verifikasi bukti pencairan dan pembayaran ritase K bulan November	Sarana
2	SK 3	Meningkatnya Basis Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	3909	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Perintis Trayek Transportasi Angkutan ASDP	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	3227	82,7	41.930.968.000	100	3.304	26.878.214.924	86,17	64,1	Persentase realisasi trip angkutan penyeberangan perintis bulan oktober- bulan 2020	Melaksanakan trip sebanyak-nya sesuai dengan target	Sarana
3	SK 7	Meningkatnya Pelayanan Public Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watansoppeng	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	3	100,0	1.017.947.000	100	3	553.628.124	100,00	54,4	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM dilaksanakan pada 3 TTA yaitu : 1. TTA Lateteri Sesuai Perkiraan, 2. TTA Indah Lampur Pangsan, TTA Perta Penggawai Nusa	Melaksanakan pendataan dan pengawasan terhadap operasional Terminal Tipe A di lingkungan Wilayah KPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pranoto
							2). Operasional Terminal Tipe A Lateteri Sesuai Perkiraan	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			779.669.000	100		366.519.379		47,0			
							3). Operasional Terminal Tipe A Indah Lampur	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			1.370.334.000	100		923.108.201		69,0			
		IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bernotor sesuai SPM	Unit	8	Unit Pelaksana Pendukung Keselamatan Bernotor (UPPKB) diaktifkan	Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bernotor (UPPKB) diaktifkan	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Pendukung Keselamatan Bernotor	8	100,0	11.500.962.000	100	8	6.686.168.961	100,00	58,0	1. UPPKB Macanga 2. UPPKB Bumba Ciju 3. UPPKB Pallanga 4. UPPKB Dasir 5. UPPKB Tana Beru 6. UPPKB Bajoangin 7. UPPKB Lasanggong 8. UPPKB Watampone	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional UPPKB di wilayah kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pranoto
		IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terhadap Penegakkan Pelayanan Tugas dan Polisi	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Pramarana	Monitoring dan Evaluasi terkait Penegakkan Pelayanan Tugas dan Polisi	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Penegakkan Tugas dan Polisi	2	75,0	800.775.000	100	0	0	75,00	0,0	Telah Dilaksanakan Monitoring Unit Kegiatan Internal (SKI) Triwulan II (periode bulan April s.d Juni 2020)	Akan Melaksanakan Monitoring Unit Kegiatan Internal (SKI) Triwulan III	Tata Usaha
4	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Public Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Unit	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	10	100,0	1.584.026.000	100	9	778.022.800	83	71,8	1. PP Garongkong 2. PP Biaa 3. PP Bajoe 4. PP Bira 5. PP Pamatata 6. PP Partiolibakaa 4 Pelabuhan belum beroperasi 1. PP Tabakoreang 2. PP Pamatatan 3. PP Pasimasunggu 4. PP Pandandarua	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional pelabuhan penyeberangan di wilayah kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pranoto
							2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Biaa)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			417.035.000	100		297.100.158		71,2			
							3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			455.888.000	100		214.557.862		47,1			
							4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bira	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			601.112.000	100		233.078.480		47,1			
							5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pamatata)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			351.428.000	100		77.083.112		21,9			

					6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Sira (PP Pariaman)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			264.278.000	100		105.656.018		40,0			
					7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Sira (PP Tandurbono)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			112.500.000	100		8.000.000		7,1			
					8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Sira (PP Pasiamanang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.000	100		2.500.000		2,7			
					9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Sira (PP Talaibarantin)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			107.550.000	100		5.110.000		4,8			
					10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Sira (PP Pasimasseggit)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			66.350.000	100		2.692.000		3,3			
	DLL II.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	3	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Dapat (PP Rantonagaranang)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	3	100,0	129.420.000	100	3	42.221.000	100	32,5	1. PB Pasaman sementara 2. PD Sawunto 3. PD Rohil 4. PD Tanampo 5. PD Riau Tebelahbo	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional pelabuhan sungai dan danau di wilayah kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Prasarana
					2). Operasional Pelabuhan Danau Sawunto	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			478.100.000	100		232.524.643		48,6			
					3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sawunto (PD Rohil)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			72.731.000	100		33.068.000		45,5			
					4). Operasional Pelabuhan Danau Tanampo	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			384.837.000	100		162.587.120		47,4			
					5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Tanampo (PD Tebelahbo Bratu)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			56.156.000	100		30.660.000		54,6			
	DLL II.5	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan UPP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	2	Pemeliharaan Local Area Network (LAN)	Operasional Pengawasan UPP di Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan UPP di Pelabuhan Penyeberangan	1	50,0	100.000.000	110	2	0	100	0,0	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Periode Januari-September 2025	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan	Lain-lain

5	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan dan Danau	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Fungsional Operasional ASAP, AMP, dan Pariwisata	Kegiatan	2	Pengawasan Tahun Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Pengawasan Operasional ASAP, AMP, dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan operasional ASAP, AMP, dan Pariwisata di	1	50,0	147.400.000	100	2	80.872.450	100,00	97,5	Pengawasan Operasional dilaksanakan di 3 Lokasi yaitu: 1. Terminal Induk Luwuppa 2. Terminal Lantoci Senen Pelabuhan 3. Terminal Pelabuhan Penggunaan	Kinerja dilaksanakan pengawasan yang lebih terfokus keberagaman sarana lebaran standar dan sistem pengawasan untuk keselamatan penumpang	Lulus
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun dan dapat mendukung Keselamatan	Lokasi	8	Unit Pelaksana Pembangun Kendaraan Bermotor (UPPKB) dibentuk	Kegiatan Operasional Pembina Pembangun Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah Unit Pelaksana Pembangun Kendaraan Bermotor (UPPKB) dibentuk	8	100,0	11.500.861.000	100	8	4.486.198.981	100,00	39,0	Kegiatan Operasional UPPKB dilaksanakan di 8 Lokasi yaitu: 1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Pelanggo 3. UPPKB Soroba Opu 4. UPPKB Datae 5. UPPKB Tanahlibukue 6. UPPKB Sajoangin 7. UPPKB Larompong 8. UPPKB Walotewng	Pengawasan terhadap operasional UPPKB dalam mendukung keselamatan angkutan barang	Lulus
			IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	8	Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Pengawasan Operasional Bengkel Karoseri	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	2	50,0	602.105.000	100	0	0	0,00	0,0	Tidak dilaksakan kegiatan dikarenakan tidak adanya aktivasi anggaran	Dilaksanakan kegiatan ini dapat dilaksanakan jika anggaran telah di buka	Lulus
6	SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rutinang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Peduman	Kegiatan	12	Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rutinang Bangun Kendaraan Bermotor	Pemeriksaan Fisik Rutinang Bangun Kendaraan sesuai dengan peduman	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rutinang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Peduman	10	83,2	68.700.000	100	9	0	75,00	0,0	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor Bulan Oktober	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor Bulan Bermotor	Success
			IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berbasis di Daerah	Kegiatan	10	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berbasis	Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Berbasis di Daerah	8	80,0	68.700.000	100	8	7	80,00	0,0	Kegiatan kalibrasi belum ada perusahaan pada bulan September	Bulan Oktober akan dilakukan pemeliharaan terhadap alat kalibrasi BPTD	Success
			IKK 10.4	Jumlah Alat Pengujian berbasis yang menerapkan Idue full cycle	Kegiatan	5	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	2	60,0	200.000.000	100	2	0	40,00	0,0	Pemeliharaan 5 UPPKBB pengujian	Koordinasi kegiatan terkait pupilih yang masuk tahap proses blue lullycle	Success
7	SK 13	Meningkatnya kemahiran & attitude penggunaan jalan berkeselamatan	IKK 13.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Alat Pendamping Sosial Pedoman Pada Lokasi Yang Ditetapkan	Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sosial Pedoman di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah masyarakat Tersosialisasi pada Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	42	84,0	105.142.000	100	20	0	52,00	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini pada anak-anak TKIT Balikpapa Baitul Muttaqin pada 17 Februari 2020 di Kantor repat BPTD Kelas II Sidrapsi	Kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berdasarkan evaluasi kualitas pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
8	SK 4	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Aparatur Perhubungan	IKK 4.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Kegiatan	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Penyusunan RKAL Pagu Kebutuhan, Indikasi, dan Alokasi	Dokumen Pelaporan	2	100,0	200.000.000	200	2	0	100,00	0,0	Catatan Pagu Kebutuhan dan Indikasi	Penyusunan RKA Pagu Alokasi	Tata Usaha
			IKK 4.3	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP (Survei Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Dokumen Laporan SAKIP (Survei Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	1	60,0	1.858.775.000	100	3	1.200.000	60,00	0,1	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II	Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II	Tata Usaha
			IKK 4.5	Tersedianya Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Dokumen	3	Pengelolaan Bidang Keuangan	Penyusunan SPP dan Penyusunan Dokumen MR	Dokumen Laporan SPP dan Dokumen MP	1	50,0	1.858.775.000	100	2	1.000.000	100,00	0,1	Laporan Triwulan I dan II MP serta Kertas Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2020	Laporan Triwulan II Manajemen Risiko (MR)	Tata Usaha
			IKK 4.6	Tersedianya Dokumen Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	Laporan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	1	100,0	147.400.000	100	1	0	100,00	0,0	Rincian status tindak lanjut pada BPTD Kelas II Sidrapsi Selama Tahun 2020	Monitoring dan Tindak Lanjut Audit BPTD Kelas II Sidrapsi Selama Tahun 2020	Tata Usaha

		BSE 4.5	Kegiatan Pengelolaan Aset Diluar Perkeretapian Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Dokumen Laporan/Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	1	50,0	68.700.000	100	1	0	50,00	0,0	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 1	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 2	Tata Usaha
		BSE 4.6	Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	1	Pengadaan peralatan pendukung kebutuhan	Kegiatan layanan perkantoran	Dokumen Laporan Digitalisasi Arsip	1	100,0	139.000.000	100	1	0	100,00	0,0	Penggunaan Surat Keluar Bulan Oktober	Penggunaan Surat Keluar Bulan Berjalan	Tata Usaha
		BSE 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	9	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaporan Dokumen Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	9	80,0	116.771.809.000	100	8	0	100,00	0,0	Laporan Keuangan Akuan Kerja (SAK)	Monitoring dan Pelaporan Keuangan Akuan Kerja (SAK)	Tata Usaha
		BSE 4.10	Kegiatan Pengoperasian SDM Unit Kerja	Kegiatan	12	Uji dan Tunjangan	Kegiatan terkait Pengadaangan SDM Unit Kerja	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Unit Kerja	10	83,3	30.441.324.000	100	10	97.222.477.108	83,33	89,6	Pembayaran Uji dan Tunjangan Tepat Waktu	Pembayaran Uji dan Tunjangan Bulan Sesember	Tata Usaha
		BSE 4.11	Kegiatan pendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Monitoring Kegiatan pembangunan ZI/ WBK/ WBBM	1	100,0	4.104.040.000	100	1	3.665.853.627	100,00	74,7	Peningkatan SDM dan Pendidan Operasional UPPKB Macoppa Dalam Mendukung Sistem Informasi Pendataan Kendaraan dan Muatan Angkutan Barang Menuju Zona Integritas WBK/ WBBM	Peningkatan Kedisiplinan Pendelegasian Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di UPPKB Macoppa	Tata Usaha

Makassar, 06 November 2023

Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan

Amty Sanjaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN NOVEMBER TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi UPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Ritase	1.316	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek Perintis Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek	1280	97,3	1.895.982.000	100	1.119	1.191.999.754	87,63	70,3	Total presentase Ritase sebesar 85%	Capaian kinerja sangat dengan bulan November sebesar 85% dengan total ritase tercapai 1.119 RR	Semua
2	SK 5 Meningkatnya Basis Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Perintis Trayek Transportasi Angkutan ASDP	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	3520	88,0	40.561.345.000	100	3.632	28.974.474.914	90,80	66,9	Presentase Realisasi Trip Angkutan Penyeberangan Perintis Bulan November Tahun 2025	Melaksanakan trip sesungguhnya sesuai dengan target	Semua
3	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	3	100,0	1.147.403.000	100	2	903.631.602	100,00	78,8	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM dilaksakan pada 3 TTA yaitu : 1. TTA Lezosi Sesua Pelihan. 2. TTA Induk Lompoe Bangaro. 3. TTA Pelta Penggawai Bone	Melaksanakan Pendataan dan Pengawasan Terhadap Operasional Terminal Tipe A di lingkungan Wilayah BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pengawas
					2). Operasional Terminal Tipe A Lezosi Sesua Pelihan	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			716.004.000	100		520.082.456		72,6			
					3). Operasional Terminal Tipe A Induk Lompoe	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			1.099.450.000	100		1.001.479.724		65,8			
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Perimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	5	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor	8	100,0	11.300.963.000	100	8	5.580.627.276	100,00	46,8	1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Sentra Ojo 3. UPPKB Pallangga 4. UPPKB Dalae 5. UPPKB Tana Bakti 6. UPPKB Sajoangin 7. UPPKB Lamenpong 8. UPPKB Wakamong	Melaksanakan pendataan dan pengawasan operasional UPPKB di wilayah kerja BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Pengawas
		IKK 7.5 Monitoring Realisasi terhadap Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Tugas dan Fungsi	2	75,0	499.375.000	100	2	0	75,00	0,0	Tidak Dilaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan II (periode bulan Juli s.d	Akan Melaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan IV	Tata Usaha
4	SK 9 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	10	100,0	1.303.373.000	100	6	1.041.422.492	90	79,9	1. PP Bajoe 2. PP Bira 3. PP Pamatata 4. PP Pattumbukang 5. PP Takaboonrate 6. PP Pasiaraoreng 7. PP Pasiberita 8. PP Sinjai 9. PP Garongkong PP Pasiaraoreng belum ada pembangunan	Melaksanakan pengawasan pemenuhan SPM dan pemeliharaan fasilitas prasarana untuk pelabuhan yang dikelola oleh BPTD	Pengawas
					2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Sinjai)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			390.312.000	100		315.413.951		80,8			
					3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garongkong)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			455.888.000	100		200.604.891		80,0			
					4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bira	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			626.062.000	100		298.686.618		47,6			
					5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			342.748.000	100		93.822.142		27,4			
					6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pattumbukang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			251.668.000	100		115.871.019		46,1			
					7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			90.070.000	100		11.032.500		12,2			
					8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasiaraoreng)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			87.070.000	100		2.930.000		3,4			

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takalekaruta)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			44.200.000	100		5.110.000		6,1			
					10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Mra (PP Pamatarrenggeh)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			58.060.000	100		3.630.000		6,3			
	IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PP Rantetingimatarang)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			121.430.000	100		42.496.000		35,0	1. PP Rantetingi-rantetang 2. PD Sorowako 3. PD Nuha 4. PD Timampu 5. PD Besu Tolosibebo	Melaksanakan pengawasan pemenuhan SPM	Pemerintah
					2). Operasional Pelabuhan Danau Sorowako	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			434.837.600	100		240.742.645		55,7			
					3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sorowako (PD Nuha)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	2	100,0	61.188.000	100	5	33.066.000	100	54,1			
					4). Operasional Pelabuhan Danau Towuti	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			496.239.000	100		302.271.499		60,9			
					5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Tinanjo (PD Tokaliobo Besu)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			56.158.000	100		30.660.000		54,6			
	IKK 8.8	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	2	100,0	100.000.000	100	2	0	100	0,0	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Periode Januari-November 2023	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan	Lalu
5	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional ASAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Kegiatan Pengawasan Teknis Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Multi dan Taksi Baru	Pengawasan Operasional ASAP, AJAP, dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan operasional ASAP, AJAP, dan Pariwisata di	2	100,0	300.000.000	100	2	84.873.650	100,00	42,4	Pengawasan Operasional dilakukan di 3 lokasi yaitu 1. Terminal Induk Lampia 2. Terminal Latemu Sesuai Pelikan 3. Terminal Pelta Penggawae	Akan Dilaksanakan Pengawasan Yang Lebih Terhadap Kelengkapan Untuk Teknis Utama Dan Unsur Penunjang Untuk Keselamatan Penumpang	Lalu
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas pemeliharaan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Konektivitas	Lokasi	8	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Over Dimension Over loading	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di Unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Jumlah Unit Pelaksana Pembinaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) diBekin	8	100,0	550.000.000	100	8	320.013.900	100,00	92,8	Kegiatan Operasional UPPKB dilakukan di 8 lokasi yaitu 1. UPPKB Maccipa 2. UPPKB Pulangga 3. UPPKB Sumbu Opu 4. UPPKB Lamasi 5. UPPKB Tanalodoloe 6. UPPKB Sajoangin 7. UPPKB Lanrampong 8. UPPKB Walenrang	Pengawasan Terhadap Optimalnya UPPKB Dalam Mendukung Keselamatan Angkutan Barang	Lalu
6	SK 10 Meningkatnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Penerbitan Path Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	kegiatan	12	Penerbitan Keterangan Path Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Penerbitan Path Rancang Bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Jumlah Kegiatan Penerbitan Path Rancang Bangun kendaraan Sesuai dengan Pedoman	11	91,7	66.700.000	100	11	0	91,67	0,0	Pada bulan November telah dilaksanakan 11 kegiatan penerbitan Ijin rancang bangun kendaraan bermotor	Melaksanakan kegiatan rutin penerbitan Ijin rancang bangun kendaraan bermotor	Sarana
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala	Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	9	90,0	130.000.000	100	10	148.296.000	100,00	98,9	Terdapat 2 UPUBKB yang melaksanakan kalibrasi pada bulan November	Pemantauan UPUBKB di Sulawesi Selatan	Sarana
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berbasis yang menerapkan Uji full cycle	Kegiatan	5	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Pengawasan Penerapan Uji Full Cycle	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Penerapan Uji Full Cycle	3	60,0	66.700.000	100	4	0	80,00	0,0	Pada bulan November, terdapat penambahan 2 UPUBKB yang telah menerapkan BLDC Pulleyde, sehingga total saat ini UPUBKB yang menerapkan BLDC Pulleyde di Sulawesi	Pendampingan dan monitoring terkait berkala UPUBKB yang belum menerapkan BLDC Pulleyde	Sarana

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN			REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude penggunaan jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Kesehatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sesuai Perkiraan Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Kegiatan Pengajaran Kesehatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Perkiraan di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah masyarakat Teranalisasi pada Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	46	92,0	107.142.000	100	26	0	52,00	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini pada anak-anak TKIT Raffinya Bakul Makmur pada 17 Februari 2025 di Ruang rapat DPTD Kelas II Sulawesi	Akan dilaksanakan peningkatan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan SALUD	Tata Usaha
8	SK 9 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 9.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan, Indikatif, dan Alokasi	Dokumen Pelaporan	3	100,0	890.973.000	100	3	0	100,00	0,0	Catatan RKKL Pagu Kebutuhan, Indikatif dan Alokasi	Monitoring RKKL Pagu Kebutuhan, Indikatif dan Alokasi	Tata Usaha
		IKK 9.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Dokumen Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	3	60,0	1.858.775.000	100	4	908.827.214	80,00	48,9	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III	Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV	Tata Usaha
		IKK 9.3 Kegiatan terkait Naskah RPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan kapsul DPTD	Penyusunan RPIP dan Penyusunan Dokumen MR	Dokumen Laporan RPIP dan Dokumen MR	2	100,0	262.100.000	100	2	1.000.000	100,00	0,0	Laporan Triwulan MR serta Isian Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun	Laporan Triwulan IV Manajemen Risiko (MR)	Tata Usaha
		IKK 9.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	Laporan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan	1	100,0	147.400.092	100	1	0	100,00	0,0	Berita acara audit Hak pada DPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2024	Monitoring dan Tindak Lanjut Audit DPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Tata Usaha
		IKK 9.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Dokumen Laporan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	2	100,0	1.858.775.000	100	1	908.827.214	50,00	48,9	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester I	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 2	Tata Usaha
		IKK 9.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12	Pengadaan peralatan pendukung kehumasan	Kegiatan layanan perkantoran	Dokumen Laporan Digitalisasi Arsip	11	91,7	124.000.000	100	11	0	91,67	0,0	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Nopember	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Desember	Tata Usaha
		IKK 9.9 Kegiatan Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	5	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaporan Dokumen Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	5	100,0	3.379.308.000	100	5	908.707.214	100,00	0,2	Laporan Rangkuman Actuan Kerja (KAK)	Monitoring dan Pelaporan Rangkuman Actuan Kerja (KAK)	Tata Usaha
		IKK 9.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	19	Gaji dan Tunjangan	Kegiatan terkait Pengembangan SDM Unit Kerja	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Unit Kerja	19	92,9	35.438.100.000	100	14	31.304.100.501	100,00	88,3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Desember	Tata Usaha
		IKK 9.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Monitoring Kegiatan pendaftaran ZI/WBK/WBBM	1	100,0	3.892.104.000	100	1	3.220.824.624	100,00	82,7	Peningkatan SDM dan Fasilitas Operasional UPPKD Maccopa Dalam Mendukung Sistem Informasi Pendataan Kendaraan dan Muatan Angkutan Barang Menuju Zona Integritas WBK/WBBM	Peningkatan Fasilitasi Pendaftaran Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di UPPKD Maccopa	Tata Usaha

Makassar, 05 Desember 2025

Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.St.T., M.M.

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN

BULAN DESEMBER TAHUN 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN		
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	SK 2 Meningkatnya Konektifitas Jaringan Transportasi DPTK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Rilnie	1316	Layanan Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Perintis Trayek	1316	100,0	1.000.982.000	100	1.068	1.815.492.478	96,35	89,4	Capaian Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 Sebesar 96,31% Dengan Total Rit 1.268 Rit	Pembayaran Termin XII
2	SK 5 Meningkatnya Sosio Konektifitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trip	4000	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan Subsidi Perintis Trayek Transportasi Angkutan ASDP	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	4000	100,0	43.341.345.000	100	3.980	42.319.005.934	99,50	90,8	Pembahasan Realisasi Trip Angkutan Penyeberangan Perintis Bulan Desember Tahun 2025	Realisasi berakhir dan realisasi trip sesuai dengan tabel. Selanjutnya melakukan kontrak kembali untuk tahun anggaran 2026
3	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM	Lokasi	3	1). Operasional Terminal Tipe A Watampone	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	3	100,0	1.147.401.000	100	3	910.786.602	100,00	79,4	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM (dilakukan pada 3 TTA yaitu : 1. TTA Lateri Sesuai Pelaksc, 2. TTA Induk Lompie Parepare, 3. TTA Pelra Penggawai Bone	Melaksanakan pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas prasarana Terminal Tipe A
					2). Operasional Terminal Tipe A Lateri Sesuai Pelaksc	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			735.084.000	100		847.488.436		76,5		
					3). Operasional Terminal Tipe A Induk Lompie	Pengoperasian dan Pengelolaan Terminal Tipe A	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			1.499.490.000	100		1.020.087.827		58,3		
		IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor	8	100,0	11.000.953.000	100	8	3.935.683.051	100,00	51,8	1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Soroba Opu 3. UPPKB Pallanggo 4. UPPKB Danau 5. UPPKB Tana Batue 6. UPPKB Bajoangin 7. UPPKB Lamenpong 8. UPPKB Wolterang	Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas prasarana UPPKB
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terhadap Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Register Monitoring dan Evaluasi terhadap Peningkatan Tugas dan Pokok	4	100,0	890.775.000	100	4	0	100,00	0,0	Telah Dilaksanakan Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan IV (periode bulan Oktober s.d Desember 2025)	Terlaksananya Monitoring Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan I-IV
4	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	Lokasi	10	1). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	10	100,0	1.303.073.000	100	9	1.196.990.027	90	91,8	1. PP Bajoe 2. PP Biru 3. PP Pamatata 4. PP Pattumbukan 5. PP Takabonerate 6. PP Pasimarannu 7. PP Pasilambena 8. PP Rava 9. PP Garanglong Belum Operasi 1. PP Pasimasunggu	Melaksanakan pengawasan pemeliharaan SPM untuk pelabuhan yang dikelola oleh pemda dan ASDP serta melaksanakan pemenuhan SPM dan pemeliharaan untuk pelabuhan yang dikelola oleh BPTD
					2). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Siwa)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			390.212.000	100		650.055.511		80,7		
					3). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bajoe (PP Garanglong)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			455.886.000	100		268.512.061		58,9		
					4). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Biru	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			626.562.000	100		372.821.104		59,5		
					5). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Biru (PP Pamatata)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			343.748.000	100		112.585.042		32,8		
					6). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Biru (PP Pattumbukang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			251.938.000	100		126.009.618		50,1		

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN		
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					7). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Paunkendeng)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			90.070.000	100		11.000.500		12,2		
					8). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasalemberang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			87.070.000	100		18.258.000		21,0		
					9). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Takaberenang)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			84.200.000	100		20.948.000		24,8		
					10). Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilker Bira (PP Pasalemberanggi)	Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM			58.660.000	100		3.630.000		6,3		
	IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5	1). Operasional Pelabuhan Sungai Wilker Bajoe (PS Bantenggaromang)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	5	100,0	121.430.000	100	3	45.494.200	100	37,5	1. PS Bantaeng-rantaeng 2. PD Sarowako 3. PD Nuha 4. PD Timampu 5. PD Danau Towuti/Mbo	Meningkatnya pengawasan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
					2). Operasional Pelabuhan Danau Sarowako	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			434.827.000	100		262.102.121		60,3		
					3). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Sarowako (PD Nuha)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			61.158.000	100		33.056.000		54,1		
					4). Operasional Pelabuhan Danau Timampu	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			226.226.000	100		221.815.000		68,0		
					5). Operasional Pelabuhan Danau Wilker Timampu (PD Tokalimbo Bawa)	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau	Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM			98.158.000	100		32.650.000		54,0		
	IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	2	100,0	300.000.000	100	2	0	100	0,0	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Periode Januari-Desember 2025	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan
3	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	Kegiatan	2	Kegiatan Pengawasan Teknis Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru	Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di	2	100,0	200.000.000	100	2	195.942.245	100,00	98,0	Pengawasan Operasional dilakukan di 3 Lokasi yaitu 1. Terminal Induk Lampia 2. Terminal Lasuri Sesui Pelabuh 3. Terminal Pesta Penggawan	Dilaksanakan Pengawasan Yang Lebih Terhadap kelengkapan Unsur Teknis Utama Dan Unsur Penunjang Untuk Keselamatan Penumpang
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas pendukungan yang dibangun dan dipemeliharakan untuk mendukung keselamatan	Lokasi	8	Kegiatan Pengawasan dan Pendalaman Over Dimension Over Loading	Kegiatan Pengawasan dan Pendalaman di Unit Pelaksanaan Keselamatan Sumatera (UPPKB)	Jumlah Unit Pelaksana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	8	100,0	850.000.000	100	8	826.900.848	100,00	97,6	Kegiatan Operasional UPPKB dilakukan di 8 Lokasi yaitu: 1. UPPKB Maccopa 2. UPPKB Palanggo 3. UPPKB Simbuh Opu 4. UPPKB Dolue 5. UPPKB Yasalibatua 6. UPPKB Sajoangin 7. UPPKB Larompong 8. UPPKB Walenrang	Peningkatan Pengawasan dan Pendalaman Over Dimension Over Loading (ODOL) Dalam Mendukung Keselamatan Angkutan Barang

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULANAN				REALISASI BULANAN		CAPAIAN BULANAN		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN		
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	SK 10 Meningkatnya Kepastian Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Perkiraan	Kegiatan	12	Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun kendaraan sesuai dengan perkiraan	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Perkiraan	12	100,0	58.700.000	100	12	0	100,00	0,0	Pada bulan Desember telah dilaksanakan 12 kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor tahun 2026
		IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	10	Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala	Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	10	100,0	150.000.000	100	10	148.296.000	100,00	98,9	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Uji Kalibrasi di UPUBKB pada 10 Lokasi di Sulawesi Selatan	Pemantauan dan Monitoring UPUBKB di Sulawesi Selatan
		IKK 10.4 Jumlah Alat Pengujian berbasis yang menerapkan blue full cycle	Kegiatan	5	Kalibrasi Peralatan Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Penerapan Blue Full Cycle	5	100,0	68.700.000	100	5	0	100,00	0,0	Pada bulan Desember, terdapat penambahan UPUBKB yang telah menerapkan BLUe Fullcycle, sehingga total saat ini UPUBKB yang menerapkan BLUe Fullcycle di Sulawesi Selatan berjumlah 5 UPUBKB	Monitoring dan pengawasan lebih lanjut UPUBKB yang telah menerapkan BLUe Fullcycle
7	SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude penggguna jalan berkeselamatan	IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru Atau Pendamping Sosial Peloton Pada Lokasi Yang Berbeda	Orang	50	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	Kegiatan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sosial Peloton di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah masyarakat Tersosialisasi pada Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	50	100,0	107.142.000	100	51	0	102,00	0,0	Telah dilaksanakan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) 1. TKIT RaTaya Bantul Maksnar pada 17 Februari 2025 2. TK PAUD Al Muttaqin pada 05 Desember 2025	Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini berdasarkan analisis pelaksanaan SALUD
8	SK 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan	IKK 4.1 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Penyusunan RKKL Pagu kebutuhan, Indikatif, Anggaran dan Aksesi	Dokumen Pelaporan	3	100,0	890.775.000	100	3	0	100,00	0,0	Output RKKL Pagu kebutuhan, Indikatif, Anggaran dan Aksesi	Monitoring RKKL Pagu kebutuhan, Indikatif, Anggaran dan Aksesi
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Dokumen Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	5	100,0	1.858.775.000	100	5	1.667.810.077	100,00	89,7	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV	Evaluasi Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK)
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Monitoring SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tupoksi BPTD	Penyusunan SPIP dan Penyusunan Dokumen MR	Dokumen Laporan SPIP dan Dokumen MR	2	100,0	282.100.000	100	2	1.340.000	100,00	0,5	Laporan Triwulan MR Triwulan I-IV serta Kertas Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025	Evaluasi Laporan Triwulan I-IV Manajemen Resiko (MR)
		IKK 4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Tindak Lanjut Hasil Audit/PemeRksaan	Laporan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit/PemeRksaan	1	100,0	147.400.000	100	1	0	100,00	0,0	Hasil nonor audit Baik pada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025	Monitoring dan Tindak Lanjut Audit BPTD Kelas II Sulawesi Selatan Tahun 2025
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	Dokumen Laporan/Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, dan Humas	2	100,0	1.858.775.000	100	2	1.667.810.077	100,00	89,7	Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester 2	Evaluasi Catatan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK) Semester I dan II
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip	Kegiatan	12	Pengadaan peralatan pendukung kehumasan	Kegiatan layanan perkantoran	Dokumen Laporan Digitalisasi Arsip	12	100,0	134.000.000	100	12	0	100,00	0,0	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Desember	Pengarsipan Surat Keluar Bulan Januari-Desember

No	SASARAN KEGIATAN	INDICATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET SULAWAN				REALISASI SULAKAR		CAPAIAN SULAKAR		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN		
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaporan Dokumen Terkait Pengadaan Barang dan Jasa	2	100,0	3.079.308.000	100	2	1.006.509.224	100,00	0,3	Laporan Keringka Acuan Kerja (KAK)	Monitoring dan Pelaporan Keringka Acuan Kerja (KAK)
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	14	Gaji dan Tunjangan	kegiatan terkait Pengembangan SDM Unit Kerja	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Unit Kerja	14	100,0	33.435.330.000	100	14	30.090.322.587	100,00	90,0	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Desember	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu
		IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Monitoring Kegiatan pembangunan ZI/WBK/WBBM	1	100,0	3.892.694.000	100	1	3.330.886.618	100,00	90,7	Peningkatan SDM dan Fasilitas Operasional UPPKB Maccopa Dalam Mendukung Sistem Informasi Penelusuran Sandaran dan Muatan Angkutan Barang Menuju Zona Integritas WBK/WBBM	Peningkatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di UPPKB Maccopa

Makassar, 07 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sulawesi Selatan

Andy Sanjaya, S.ST., M.M.
NIP. 19761106 200012 1 001